PERAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI HUBUNGAN PERUSAHAAN YANG MEMILIKI KONEKSI POLITIK TERHADAP *AUDIT FEE* DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Erna Kusuma Wardhani
NIM. 19.52.21.315

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023

PERAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI HUBUNGAN PERUSAHAAN YANG MEMILIKI KONEKSI POLITIK TERHADAP *AUDIT FEE* DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Erna Kusuma Wardhani
NIM. 19.52.21.315

Sukoharjo, 26 Januari 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Adhelia Desi Prawestri, S.Pd., M.Akun
NIP. 199212242020122014

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Erna Kusuma Wardhani
NIM	: 195221315
Program Studi	: Akuntansi Syari'ah
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"PERAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI HUBUNGAN PERUSAHAAN YANG MEMILIKI KONEKSI POLITIK TERHADAP *AUDIT FEE* DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021"**
Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 26 Januari 2023

Erna Kusuma Wardhani

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Erna Kusuma Wardhani
NIM	: 195221315
Program Studi	: Akuntansi Syari'ah
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi saya yang berjudul **"PERAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI HUBUNGAN PERUSAHAAN YANG MEMILIKI KONEKSI POLITIK TERHADAP *AUDIT FEE* DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021"**
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data laporan keuangan perusahaan *go-publik* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari www.idx.com dan *website* perusahaan terkait. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 26 Januari 2023

Erna Kusuma Wardhani

Adhelia Desi Prawestri, S.Pd., M.Akun
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Erna Kusuma Wardhani

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Erna Kusuma Wardhani, NIM: 19.52.2.1.315 yang berjudul:

"PERAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI HUBUNGAN PERUSAHAAN YANG MEMILIKI KONEKSI POLITIK TERHADAP *AUDIT FEE* DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021"

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 26 Januari 2023

Dosen Pembimbing Skripsi

Adhelia Desi Prawestri, S.Pd., M.Akun

NIP. 199212242020122014

PENGESAHAN

PERAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI HUBUNGAN PERUSAHAAN YANG MEMILIKI KONEKSI POLITIK TERHADAP *AUDIT FEE* DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021

Oleh:

ERNA KUSUMA WARDHANI
NIM.19.52.21.315

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 M / 26 Rajab 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Fitri Laela Wijayati, S.E., M.Si.
NIP. 19860625 201403 2 001

Penguji II
Sayekti Endah Retno Meilani, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19830523 201403 2 001

Penguji III
Mohammad Irsyad, Lc., M.E.
NIP. 1990603 201903 1 005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

"Cukuplah Allah menjadikan penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung"
(QS. Ali 'Imron: 173)

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"
(QS. Al Baqarah: 286)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"
(QS. Al Insyirah: 6)

"Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar, agar memperoleh hasil yang maksimal"
(Penulis)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses, lakukan yang terbaik, dan jangan lupa beri apresiasi untuk diri sendiri (*you've done a good job*)"
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulis mengucap syukur kepada Allah SWT, atas segala kenikmatan, keberkahan, kemudahan, serta limpahan kerunia-Nya selama penulis berjuang untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta.
2. Segenap *civitas* akademika Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Almamater Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Teman-teman Akuntansi Syariah H angkatan tahun 2019.
5. Sahabat yang selalu menemani disaat senang maupun susah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Hubungan Perusahaan Yang Memiliki Koneksi Politik Terhadap *Audit fee* Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa telah mendapatkan dorongan, dukungan serta bimbingan dari banyak pihak dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dengan setulus hati kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. H. Khairul Imam, S.H.I, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Akuntansi Syariah.
4. Fitri Laela Wijayanti, S.E, M.Si.Ak. selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah.
5. Anim Rahmayati, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Syariah dan Akuntansi Syariah.

6. Fuad Hasyim, S.E.I., M.E.K. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Adhelia Desi Prawestri, S.Pd., M.Akun selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, bimbingan, dan motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Zulfanita Dien Rizqiana, S.Stat, M.Si selaku Dosen Statistika Manajemen Bisnis Syariah yang telah memberikan ilmu, perhatian, dan bimbingan untuk membantu penulis dalam pengerjaan skripsi.
9. Bapak Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Kedua orang tua, Bapak Sigit Setyoko dan Ibu Siswanti, terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dukungan, dan doa untuk penulis selama menempuh pendidikan Sarjana di Perguruan Tinggi Negeri. Semoga penulis dapat terus membanggakan dan membalas atas apa yang sudah dikorbankan.
11. Nenek dan kakekku yang sudah memberikan semangat, doa, dan restu dalam setiap ujian yang penulis lakukan.
12. Adik-adikku Arlindha Sekar Lupitasari, Anggraini Nurafni Setyaningrum, dan Erlangga Pradifta Nur Ramadhani, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulis dapat terus memberikan contoh yang baik dan selalu menginspirasi kepada adik-adiknya.

13. Sahabat Otak-otak udang yaitu Ayu, Eka, Finka, dan Ira, terima kasih telah membersamai dan selalu memberikan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
14. Seluruh pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalas semua hal baik yang telah diberikan, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT yang dapat membalas segala kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, Februari 2023

Penulis

ABSTRACT

This study aims to determine political connections and the role of the independen board of commissioners with company size, profitability, company risk, company complexity and KAP type as a control variabel for audit fees by using the research object, namely all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2021 period who have met the criteria.

The sample in this study after going through certain criteria resulted in 420 companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2021 period, which match the specified criteria. The sampling technique in this study used a purposive sampling technique. The data analysis used in this study is MRA analysis using the SPSS 23 application

Based on data analysis with data regression, the results show that political connections and the role of the independent board of commissioners have a positive effect on audit fees. Meanwhile, the role of an independent board of commissioners cannot moderate political connections with an audit fee. Meanwhile, the addition of control variables, namely the complexity and type of KAP, is proven to be able to have a positive effect on the audit fee. However, the company's profitability and risk control variables are unable to have a significant influence on the audit fees of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2021 period.

Keywords: Political Connection, Independen Board of Commissioners, Company Size, Profitability, Company Risk, Company Complexity, and Type of KAP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui koneksi politik dan peran dewan komisaris independen dengan profitabilitas, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan dan jenis KAP sebagai variabel kontrol terhadap *audit fee* dengan menggunakan objek penelitian yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021 yang telah memenuhi kriteria.

Sampel pada penelitian ini setelah melalui kriteria tertentu menghasilkan 420 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2021, yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *MRA* menggunakan bantuan aplikasi SPSS 23

Berdasarkan analisis data dengan regresi data menunjukkan hasil bahwa variabel koneksi politik dan peran dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Sedangkan peran dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi koneksi politik dengan *audit fee*. Sedangkan penambahan variabel kontrol yaitu kompleksitas dan jenis KAP terbukti mampu membawa pengaruh positif terhadap *audit fee*. Namun, variabel kontrol profitabilitas dan risiko perusahaan tidak mampu membawa pengaruh yang signifikan terhadap *audit fee* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021.

Kata Kunci: Koneksi Politik, Dewan Komisaris Independen, Profitabilitas, Risiko Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, dan Jenis KAP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii

HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN iv

HALAMAN NOTA DINAS v

HALAMAN PENGESAHAN vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

ABSTRACT xii

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR TABEL xviii

DAFTAR GAMBAR xix

DAFTAR LAMPIRAN xx

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 14

1.3 Batasan Masalah 15

1.4 Rumusan Masalah 15

1.5 Tujuan Penelitian 15

1.6 Manfaat Penelitian 16

1.7 Sistematika Penelitian.....17

BAB II LANDASAN TEORI 19

2.1 Kajian Teori 19

2.1.1 Teori Agensi 19

2.1.2 *Audit fee* 21

2.1.3 Koneksi Politik 22

2.1.4 Dewan Komisaris Independen.....24

2.1.5 Risiko Perusahaan.....26

2.1.6 Profitabilitas.....27

2.1.7 Jenis KAP 28

2.1.8 Kompleksitas 29

2.2 Penelitian yang Relevan 30

2.3 Kerangka Berpikir 39

2.4 Hipotesis 40

2.4.1 Peran Koneksi Politik terhadap *Audit Fee*.....40

2.4.2 Peran Dewan Komisaris Independen terhadap *Audit Fee* 42

2.4.3 Peran Koneksi Politik terhadap *Audit Fee* dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi 45

BAB III METODE PENELITIAN.....47

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 47

3.2 Jenis Penelitian 47

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Penelitian 47

3.3.1 Populasi 47

3.3.2 Sampel 48

3.3.3 Teknik Pengumpulan Sampel.....48

3.4 Data dan Sumber Data.....49

3.5 Teknik Pengumpulan Data 49

3.6 Variabel Penelitian.....50

3.7 Definisi Operasional Variabel 50

3.8 Teknik Analisis Data 54

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif.....54

3.8.2 Uji Asumsi Klasik 55

3.8.2 Teknik *Moderated Regression Analysis* (MRA) 56

3.8.3 Uji Hipotesis.....56

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....59

4.1 Gambaran Umum Penelitian.....59

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 60

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....60

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 64

4.2.3 Hasil Uji Hipotesis.....66

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data 73

4.3.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Audit Fee*.....73

4.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Audit Fee* 76

4.3.3 Peran Koneksi Politik terhadap *Audit Fee* dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi 78

4.3.4 Profitabilitas Perusahaan 81

4.3.5 Risiko Perusahaan terhadap *Audit Fee* 81

4.3.6 Kompleksitas Perusahaan terhadap *Audit Fee*.....83

4.3.7 Jenis KAP terhadap *Audit Fee*.....84

BAB V PENUTUPAN.....85

5.1 Kesimpulan.....85

5.2 Keterbatasan Penelitian 87

5.3 Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN.....95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pelantikan Dewan Komisaris BUMN……..…….11

Tabel 2. 1 Penelitian yang Relevan…….……...……30

Tabel 3. 1 Penjelasan Sampel…….……49

Tabel 3. 2 Variabel Operasional.....51

Tabel 4. 1 Kriteria Sampel…….…….....59

Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....60

Tabel 4. 3 Distribusi Variabel Dummy.....61

Tabel 4. 4 Distribusi Variabel Dummy.....63

Tabel 4. 5 Distribusi Variabel Dummy.....64

Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov.....64

Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....65

Tabel 4. 8 Hasil Determinasi (R^2) Sebelum Moderasi.....66

Tabel 4. 9 Hasil Determinasi (R^2) Setelah Moderasi.....67

Tabel 4. 10 Hasil Signifikansi Simultan (F) Sebelum Moderasi.....67

Tabel 4. 11 Hasil Signifikansi Simultan (F) Setelah Moderasi.....68

Tabel 4. 12 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) Sebelum Moderasi.....69

Tabel 4. 13 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) Setelah Moderasi.....69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 5

Gambar 1.2 6

Gambar 2.1 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian.....96

Lampiran 2 :Daftar Sampel Penelitian.....97

Lampiran 3: Data Mentah Variabel Dependen dan Independen.....107

Lampiran 4: Hasil Uji Statistik Deskriptif 118

Lampiran 5: Hasil Uji Asumsi Klasik.....118

Lampiran 6 : Hasil Uji Hipotesis 120

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup.....122

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah perusahaan dapat dipercaya publik apabila perusahaan tersebut mampu mempublikasi laporan keuangan, sehingga informasi dalam laporan keuangan dituntut untuk, terpercaya, transparan, relevan,dapat diandalkan dan tepat waktu (Naibaho *et al.*, 2021). Hal ini karena laporan keuangan memiliki informasi terkait aktivitas perusahaan yang dapat memperlihatkan kondisi keuangan perusahaan, dimana informasi yang tercantum sering digunakan oleh pengguna laporan keuangan contohnya investor, pemerintah, masyarakat maupun kreditor dalam mengambil keputusan (Adelina & Rachmawati, 2018). Sehingga laporan keuangan wajib diaudit oleh pihak eksternal guna mengoptimalkan kualitas laporan keuangan yang telah disusun dan dilaporkan oleh manajemen (Tat & Murdiawati, 2020).

Dengan adanya audit terhadap laporan keuangan, maka hal tersebut berperan untuk menilai laporan keuangan yang dilaporkan oleh manajemen agar terhindar dari salah saji material sehingga dapat menyakinkan pengguna laporan keuangan (Sutanto & Listiani, 2021). Pengguna laporan keuangan mengandalkan auditor eksternal untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi sehingga, hal ini membuktikan peran auditor eksternal sangat penting bagi berbagai pihak (Naibaho *et al*., 2021).

Auditor eksternal mampu menyediakan jaminan atas ketidak adanya salah saji material kepada publik dengan memberikan nilai dan opini atas laporan

keuangan suatu perusahaan (Naibaho *et al*., 2021). Imbalan *audit fee* diberikan perusahaan kepada auditor eksternal hal ini menunjukan bahwa auditor eksternal merupakan pihak yang memiliki profesionalitas tinggi (Tat & Murdiawati, 2020). *Audit fee* ialah upah yang dihasilkan oleh auditor eksternal atas pekerjaan yang telah ia lakukan (Surya *et al*., 2021).

Besaran upah jasa audit didasarkan upaya auditor seperti tanggung jawab auditor yang terdapat pada penugasan audit, kompleksitas transaksi atau kompleksitas divisi usaha, dan pengalamannya atas perusahaan yang diaudit (Arum & Ardianingsih, 2021). Mengaudit laporan keuangan membutuhkan langkah yang panjang dan seringkali menemukan kendala dalam menghadapi masalah yang terjadi di lapangan (Naibaho *et al.*, 2021). *Audit fee* yang tinggi diperlukan untuk mengimbangi tindakan khusus yang diambil oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan (Harymawan *et al*., 2020).

Permasalahan dilematis terletak pada besar kecilnya *audit fee*, dikarenakan auditor harus independen dalam memberikan opini audit, namun auditor juga menerima imbalan dari klien atas jasa yang dilakukan (Taqi, 2020). Arum & Ardianingsih (2021) mengungkapkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa audit laporan keuangan tidak wajib mengungkapkan besaran upah jasa auditor eksternalnya, dikarenakan pengungkapannya masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No. 201/PNK.04/2020. Hal ini membuat tidak semua perusahaan mencantumkan total *audit fee* dalam laporan keuangan tahunan (Pandia & Fachriyah, 2021).

Regulasi yang mengatur besaran *audit fee* di Indonesia hingga saat ini belum

ada kejelasan berapa *audit fee* yang diterima oleh auditor eksternal (Paramitha, 2022). Hal ini mengakibatkan sering terjadinya persaingan tarif *audit fee* antar Kantor Akuntan Publik (KAP) dikarenakan besaran *audit fee* masih tergantung dari kesepakatan antara klien dan KAP, sehingga hal tersebut dapat melemahkan independensi auditor eksternal sebagai seorang profesional (Prawira, 2017).

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengeluarkan Surat Keputusan PP No.2 Tahun 2016 tentang penetapan upah jasa audit, KAP berhak mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya (Nurjanah & Amrozi, 2021). Surat Keputusan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi profesi akuntan publik serta KAP dalam menentukan upah jasa audit, dikarenakan masih banyak auditor eksternal yang tidak menjelaskan bagaimana cara mereka menentukan besaran *audit fee* yang akan mereka terima (IAPI, 2016).

Audit fee ditentukan berdasarkan proses negosiasi antara pemegang saham dan KAP (Wea, 2019) IAPI telah mengeluarkan PP No. 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. IAPI mengungkapkan pada tahun 2016 terkait mekanisme regulasi *audit fee* sejauh ini kurang optimal, yang mengakibatkan masih terdapat auditor eksternal yang tidak mengungkapkan bagaimana mereka menentukan jumlah *audit fee* yang akan mereka terima (Nurjanah & Amrozi, 2021).

International Forum of Independen Auditor Regulators (IFIAR) melakukan survei yang mengatakan terkait kualitas kinerja auditor masih tergolong rendah,

dikarenakan adanya perang tarif antar KAP dalam menentukan besaran upah jasa audit yang berhubungan dengan tata kelola Profesi Akuntan Publik (Yuniarti & Riswandi, 2021).

Prosedur penetapan *audit fee* oleh KAP ialah salah satu faktor penting dalam kualitas dan pengendalian mutu KAP (Yuniarti & Riswandi, 2021). Auditor wajib melakukan penilaian risiko terlebih dahulu sebelum auditor melakukan prosedur audit, sehingga risiko audit merupakan hal yang penting sebagai faktor dalam menentukan *audit fee*, terdapat ada tiga jenis risiko audit yakni; (1) *inherent risk* yang berhubungan dengan perusahaan yang memiliki koneksi politik dan; (2) *kontrol risk* yang muncul akibat adanya faktor internal perusahaan contohnya adalah pengendalian internal; serta (3) *detection risk* muncul adanya faktor eksternal yakni pemilihan auditor eksternal atau KAP yang memberi jasa *assurance* terhadap perusahaan (Oksaviani & Laksito, 2021).

Risiko *inheren* bernilai tinggi dikaitkan dengan adanya perusahaan yang memiliki koneksi politik (Anggriani & Susanti, 2020). Hal ini disebabkan koneksi politik diyakini perusahaan akan meningkatkan praktik penipuan (Tat & Murdiawati, 2020). Koneksi politik sering terjadi di lingkungan negara berkembang, salah satunya Indonesia, negara ini mempunyai sejarah koneksi politik yang kuat dalam lingkungan bisnis (Harymawan & Nowland, 2016).

Harymawan *et al*. (2019) menyatakan bahwa hubungan politik negara akan mencapai titik optimal di negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Poin lainnya, *Executive Opinion Survey* 2019 (*World Economic Forum*, 2019) hasil di antara sepuluh faktor paling bermasalah untuk melakukan bisnis di Indonesia,

korupsi menempati posisi pertama, dan sisanya didominasi oleh faktor terkait pemerintah.

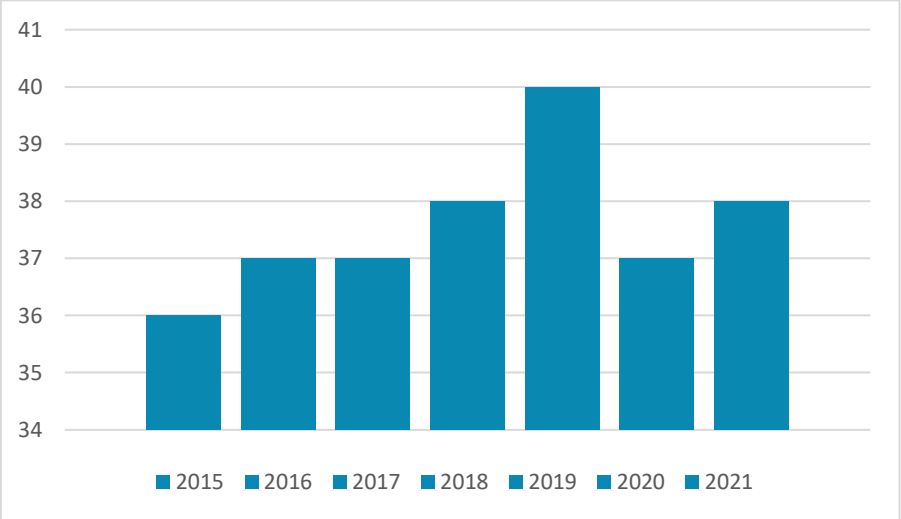

Gambar 1.1
Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Sumber Data: Laporan Transparency International

Berdasarkan Gambar I.1 diatas dapat dilihat bahwa sepanjang 2015-2021 korupsi di Indonesia mengalami fluktuasi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) sendiri ialah sebuah penilaian indikator korupsi pada suatu negara yang dijalankan oleh *transparency international*. Sistem penilaiannya menerapkan survei penilaian publik suatu negara terhadap kinerja pemerintah dalam Tindakan memberantas kasus pidana korupsi. IPK sendiri diungkapkan secara rutin setiap tahunnya dengan nilai skala 0-100. Semakin mendekati skala 100 maka dikatakan baik. Pada tahun 2021 IPK Indonesia tercatat meningkat 1 poin sehingga poin indonesia menjadi 38.

Peningkatan poin Indonesia ini turut menetapkan posisi Indonesia lebih baik dalam urutan IPK global. Posisi Indonesia berada di 96 dari 180 negara dari yang sebelumnya peringkat 102. Hal ini menyiratkan bahwa bahkan Indonesia tidak memiliki kondisi politik terburuk, tetapi tidak juga yang terbaik (Mutia, 2021).

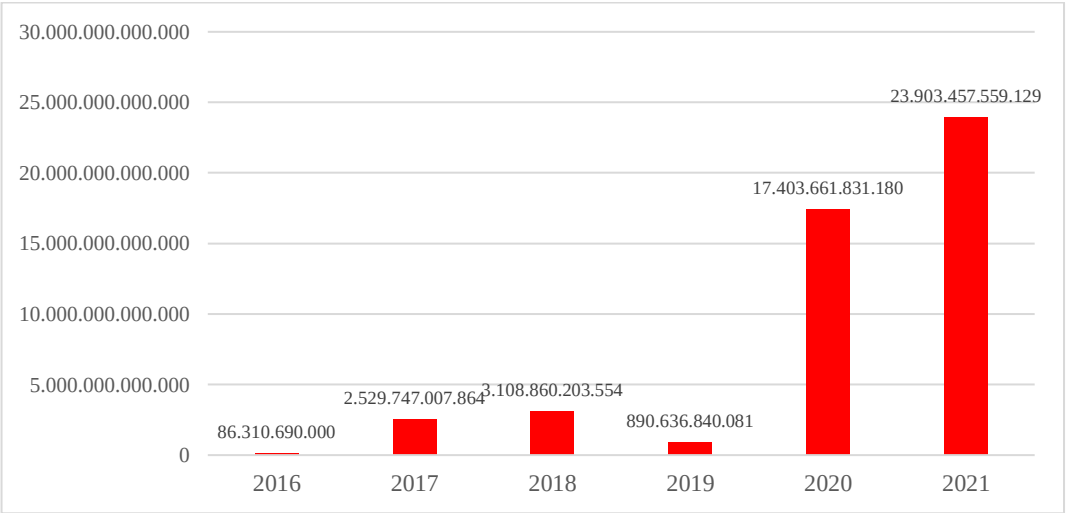

Gambar 1.2
Jumlah Kerugian Negara Akibat Korupsi
Sumber: Data *Indonesia Corruption Watch* 2016-2021

Namun Berdasarkan Gambar 1.2 data Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan pada kasus korupsi masih tinggi, salah satunya di perusahaan BUMN periode 2016-2021 kerugian yang dialami negara mencapai Rp. 47,9 Triliun. Kasus korupsi di pemerintahan paling banyak terjadi di BUMN, dengan total kasus 119 kasus selama tahun 2016-2021 (Novianto, 2022). Kerugian mencapai Rp 23.907.457.559.129-, terjadi pada tahun 2021. Salah satu kasus korupsi terdapat di PT PANN Pembiayaan Maritime (Persero) dimana nilai total kerugian negara mencapai angka Rp. 1,3 triliun. Terdapat 12 kasus korupsi diduga terjadi pada pembiayaan, pengalihan utang dan pengoperasian dan pemberi dana talangan oleh PT PANN Pembiayaan Maritime (Persero) kepada PT Meranti Maritime. Selain itu terdapat kasus dugaan korupsi pada dana pensiun PT Pertamina (Persero) yang kerugian negaranya terhitung Rp. 599,29 miliar berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dalang dalam kasus ini, ialah mantan presiden direktur dana pensiun PT Pertamina, diduga melakukan transaksi pembelian saham dengan menggunakan uang pengelolaan dana pensiun (Primayogha & Aulia, 2022).

Dengan tingginya kasus korupsi maka dapat dikatakan kondisi politik Indonesia belum dapat diandalkan, khususnya dalam hal pemisahan bisnis dan politik (Chandrarin & Parawiyati, 2021). Di Indonesia sendiri politik dan bisnis dual yang tidak dipisahkan dan saling berkaitan, sehingga hubungan kedekatan antara pemerintah dan bisnis di Indonesia cukup tinggi, perusahaan yang secara sengaja menjalin koneksi politik memiliki tujuan untuk mengamankan dan memudahkan akses bisnis mereka serta terdapat fenomena payung politik bahwa pebisnis (Harijanto, 2022).

Apabila sebuah perusahaan terkoneksi secara politik melalui dewan direksi maupun dewan komisaris maka dianggap perusahaan tersebut memperoleh keuntungan diantaranya: pinjaman dari bank, pembayaran pajak yang lebih ringan, adanya hubungan koneksi politik juga dapat berdampak buruk bagi perusahaan yang berpotensi terpapar dampak negatif dari keberadaan koneksi politik itu sendiri seperti aktivitas *tunneling*, proporsi hutang yang tinggi, kinerja keuangan negatif, dsb (Harymawan *et al.*, 2020).

Adanya rangkap jabatan dalam perusahaan melalui dewan komisaris atau dewan direksi dengan politisi yang memiliki hubungan dengan partai politik, pejabat pemerintah pusat maupun mantan pejabat pemerintah merupakan bentuk sebuah koneksi politik yang ada di Indonesia (Wulandari, 2018). Koneksi politik dilakukan dengan mengikutsertakan pihak yang memiliki dekat dengan pemerintah, dengan ini perusahaan mempunyai koneksi atau hubungan dengan pemerintah, melalui komisaris, direksi atau sekretaris perusahaan (Harymawan *et al.*, 2020).

Perusahaan yang memiliki kualitas pelaporan keuangan yang buruk, dan

berisiko melakukan kesalahan salah saji material kerap dikaitkan perusahaan yang memiliki koneksi politik sehingga perusahaan cenderung dinilai mengandung banyak risiko seperti tidak transparan dalam penyampaian pelaporan keuangan (Chandrarin & Parawiyati, 2021). Risiko audit menjadi salah satu indikator dalam menentukan jumlah upah yang harus dibayar oleh perusahaan yang didasarkan pada upaya auditor dalam melaksanakan rangkaian audit (Nurjanah & Sudaryati, 2019). Semakin besar risikonya, semakin besar pula upaya yang dilakukan auditor untuk melakukan pemeriksaan perusahaan yang terhubung secara politik sehingga memiliki dampak pada tingginya *audit fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan (Ariningrum & Diyanty, 2017).

Adanya koneksi politik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain: akses pembiayaan utang, pajak yang lebih rendah, kekuatan pasar yang lebih kuat (Wea, 2019). Penelitian yang dilakukan Riswandi *et al. (*2021) menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*. Hasil pengujian pada variabel koneksi politik memperlihatkan terkait perusahaan yang terhubung dengan koneksi politik mengeluarkan *audit fee* yang lebih mahal daripada yang tidak memiliki koneksi politik, karena perusahaan dianggap *risk taker*.

Sebagai contoh kasusnya terkait perusahaan yang terkoneksi politik yakni PT Indosat Tbk (ISAT) pada tahun 2021 yang menjabat sebagai komisaris utama ialah Bapak Halim Alamsyah yang merakap jabatan dan masih menduduki jabatan sebagai Advisor Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2020-2022. PT ISAT juga menggunakan KAP *big four* yaitu KAP Tanudireja Rintis dan Rekan

(PWC) dimana *audit fee* yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2021 sebesar Rp 44.517.000.000 yang meningkat signifikan sebesar 224% yang sebelumnya tahun 2020 PT ISAT *audit fee* yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp 19.803.000.000.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nurjanah & Sudaryati (2019) yang menyatakan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik membayarkan *audit fee* yang lebih murah berbeda dengan perusahaan yang terkoneksi politik karena dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi sehingga auditor akan meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan kualitas audit yang baik sesuai dengan permintaan perusahaan dan hal ini berdampak pada *audit fee* yang lebih mahal. Penelitian yang dilakukan Wea (2019) serta Yulinar (2017) menyimpulkan hasil bahwa semakin tinggi nilai koneksi politik maka *audit fee* yang dibebankan akan semakin mahal.

Sebuah perusahaan yang memiliki koneksi politik memerlukan peran dewan komisaris independen, karena dewan komisaris independen sebagai organ perusahaan, yang memiliki tugas dan tanggungjawab secara kolektif untuk menjalankan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melakukan *good corporate governance* (Sitompul, 2019)

Dengan adanya dewan komisaris independen maka akan berimplikasi pada peningkatan *good corporate governance* dan juga mengurangi salah saji pelaporan laporan keuangan (Chandrarin & Parawiyati, 2021). Keberadaan komisaris independen suatu perusahaan memiliki peran penting dalam menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, serta dapat menjaga *fairness* sehingga dapat memberikan keseimbangan jangka panjang yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan terkait kepentingan pemegang saham mayoritas dan

perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholder* lainnya (Yulinar, 2017).

Keberadaan dewan komisaris independen di dalam perusahaan telah diatur di Bursa Efek Jakarta (BEJ) melalui peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000. Menyatakan terkait perusahaan yang tercatat di bursa, wajib mempunyai dewan komisaris independen proporsional yang sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas serta terdapat syarat jumlah minimal komisaris independen yakni sebesar 30% dari jumlah anggota dewan komisaris (Arum & Ardianingsih, 2021).

Koneksi politik yang dimiliki oleh pejabat eksekutif biasanya dianggap kuat karena mereka akan menggunakan hak istimewanya, seperti memperkuat posisi mereka serta dapat mempengaruhi keuntungan bagi perusahaan (Khan *et al*., 2016). Berdasarkan Pasal 4 Permen BUMN 3/2021, kriteria pengangkatan dewan komisaris yakni komisaris bukan merupakan pengurus partai politik, dan tidak sedang menduduki rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (Peraturan BUMN, 2021).

Kehadiran dewan komisaris di BUMN merupakan salah satu bentuk kepercayaan pemerintah, seharusnya mampu menolak intervensi partai politik atau pejabat partai politik (Wulandari, 2018). Pada kenyataanya tahun 2021 Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat beberapa dewan komisaris yang disinyalir memiliki koneksi politik antara lain

Tabel 1. 1
Pelantikan Dewan Komisaris BUMN

No	Nama	Jabatan/Pernah Menduduki Jabatan	Rangkap Jabatan	Perusahaan
1.	M. Herinda	Wakil menteri pertahanan Republik Indonesia (RI)	Dewan Komisaris	PT LEN
2.	Emir Moies	Mantan nara pidana korupsi dan masih aktif menjadi anggota partai politik	Dewan Komisaris	PT Pupuk Iskandar Muda
3.	Tuan Guru Bajang	Pernah menduduki sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB)	Wakil Dewan Komisaris	PT Bank Syariah Indonesia
4.	Heru Pambudi	Sekretaris jenderal (SEKJEN) kementerian RI	Dewan Komisaris	PT Pertamina
5.	Iggi Haruman Achsie	SEKJEN masyarakat ekonomi Syariah	Dewan Komisaris	PT Pertamina

Sumber: *Indonesia corruption watch* (2021)

Dewan komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai *good corporate governance* yang baik karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen telah menerapkan prosedur pengendalian internal yang memadai dan menyusun laporan keuangan dengan andal (Ariningrum & Diyanty, 2017). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sukaniasih (2016) menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen mempengaruhi *audit fee* karena dewan komisaris independen memiliki sifat bebas intervensi dan dapat menurunkan risiko yang berhubungan dengan pelaporan keuangan, maka dewan komisaris independen akan melakukan pengawasan yang lebih sering, sehingga reliabilitas dan validitas laporan keuangan yang lebih baik

akan dicapai.

Penelitian yang dilakukan tinggi Nurjanah & Amrozi (2021) menyatakan bahwa tingginya *audit fee* dapat dipengaruhi adanya peran dewan komisaris independen yang dapat menuntut kualitas lebih tinggi, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan *audit fee* yang akan dikenakan lebih mahal. Dalam mempertahankan reputasi dan citra perusahaan maka seorang dewan komisaris independen akan melakukan hal yang terbaik untuk memenuhi fungsinya sebagai pengawas perusahaan, pada akhirnya dewan komisaris independen akan memilih menggunakan KAP *big four* dan bersedia membayar *audit fee* lebih mahal untuk mendapatkan hasil audit yang berkualitas (Wilasti, 2017).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitompul (2019) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *audit fee* yang menunjukkan bahwa untuk dapat menaikkan nilai perusahaan, perusahaan yang mempunyai *corporate governance* yang kuat akan mencari jasa audit yang lebih berkualitas. Dapat dikatakan bahwa tingginya kualitas audit yang dihasilkan akan mempengaruhi tingginya *audit fee* yang dikeluarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Harymawan *et al*., (2020) dan Nurjanah (2019) menyimpulkan bawah keberadaan dewan komisaris independen berhasil memoderasi koneksi politik, karena dengan adanya berbagai keuntungan yang ditawarkan perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan *audit fee*, dewan komisaris independen sebisa mungkin akan memilih meminimalkan risiko yang ditimbulkan adanya kerugian adanya koneksi politik daripada mengorbankan perusahaan masuk pada koneksi politik.

Berbeda dengan penelitian Chandrarin & Parawiyati (2021) menunjukan bahwa dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan koneksi politik dengan *audit fee*, sehingga disimpulkan adanya praktik dewan komisaris independen tidak bisa menurunkan risiko *inherent* yang ditimbulkan dari adanya koneksi politik dalam perusahaan karena adanya dewan komisaris independen berarti tidak membantu perusahaan dalam melakukan pengawasan yang efektif. Sehingga dewan komisaris independen tidak dapat menurunkan penaksiran risiko oleh auditor yang menunjukan tidak dapat menurunkan *audit fee*.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan peran dewan komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi dan mengendalikan manajemen. Dengan adanya kehadiran dewan komisaris independen diduga dapat mempengaruhi *audit fee* dan menurunkan risiko perusahaan yang timbul adanya koneksi politik, sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil secara empiris pengaruh dari perusahaan yang terkoneksi politik terhadap *audit fee* dan apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen dapat memoderasi hubungan antara koneksi politik dan *audit fee*.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yang digunakan untuk mengendalikan variabel independen terhadap dependen agar tidak dipengaruhi faktor lain diluar yang diteliti (Sugiyono, 2017). Variabel kontrol yang digunakan peneliti yakni: risiko perusahaan, profitabilitas, jenis KAP, dan kompleksitas perusahaan. Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021.

Periode ini dipilih karena terdapat isu terkait rencana *reshuffle* Kabinet

Indonesia Maju, dimana Presiden dapat menggunakan hak prerogatifnya yakni untuk memilih dan memberhentikan Menteri sesuai dengan preferensi presiden atau disebut bagi-bagi kekuasaan, dimana mengeserkan beberapa Menteri yang bukan dari PARPOL pengusung dikarenakan menjelang pemilihan umum (PEMILU) 2024 suhu politik meningkat dan kinerja kabinet Jokowi berisiko menurun (Umah, 2021). Sebagai contoh adanya dua anggota keluarga Presiden Joko Widodo yang dilantik menjadi Walikota Solo dan Walikota Medan (Syahban, 2021).

Adanya kenaikan IPK di Indonesia seharusnya menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia berkurang. Namun kenyataanya pada tahun 2021 justru mengalami peningkatan dimana korupsi paling banyak di lingkungan BUMN. Berdasarkan fenomena yang ada terdapat banyak penjabat publik yang rangkap jabatan menjadi dewan komisaris atau dewan komisaris independen, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul "Peran Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Hubungan Perusahaan Yang Memiliki Koneksi Politik Terhadap *Audit fee* Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka identifikasi masalah yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

1. Di Indonesia hingga saat ini belum ada regulasi yang menetapkan berapa besaran *audit fee* yang diterima oleh auditor eksternal, sehingga menimbulkan perang tarif antar KAP yang dapat merusak independensi auditor sebagai seorang yang profesional.Keberadaan pemerintah dan politik dalam perusahaan

sangat mempengaruhi struktur keuangan dan risiko yang dihadapi perusahaan serta besaran *audit fee* yang akan diterima auditor. Dengan adanya dewan komisaris dan komisaris independen diharapkan dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan adanya koneksi politik.

2. Ditemukannya perbedaan *research gap* terkait hasil penelitian terdahulu variabel-variabel yang mempengaruhi *audit fee*, diantaranya koneksi politik dan dewan komisaris independen.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menguji variabel independen, yaitu koneksi politik dengan variabel dependen *audit fee* serta variabel moderasi dewan komisaris independen.
2. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol seperti risiko perusahaan, profitabilitas, jenis KAP, dan kompleksitas perusahaan.
3. Penelitian ini menguji seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2021.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh koneksi politik terhadap *audit fee*?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *audit fee*?
3. Apakah dewan komisaris independen memoderasi hubungan antara perusahaan yang terkoneksi politik dengan *audit fee*?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat peneliti jelaskan berdasarkan rumusan masalah,

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh koneksi politik terhadap *audit fee*.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap *audit fee*.
3. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris independen dapat memoderasi hubungan perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan *audit fee*.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

   Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu akuntansi dan dapat digunakan sebagai referensi sekaligus pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca yang berkaitan dengan peran dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi hubungan perusahaan yang memiliki koneksi politik terhadap *audit fee* di bursa efek indonesia.

2. Bagi Perusahaan

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan terkait peran dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi hubungan perusahaan yang memiliki koneksi politik mengenai *audit fee* dengan kantor akuntan publik, sehingga *audit fee* yang diberikan perusahaan dapat sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik.

3. Bagi Investor

   Bagi para investor, penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam pertimbangan pengambilan keputusan investasi.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat sebagai acuan untuk menilai kinerja perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki koneksi politik.

1.7 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab untuk menggambarkan secara keseluruhan sistematika penelitian. Sistematika isi penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menggambarkan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian dengan didukung beberapa fenomena *gap* untuk memperkuat penelitian yang dilakukan. Selanjutnya dalam bab ini akan dijelaskan mengenai rumusan masalah untuk memperluas tujuan dalam penelitian, yang kemudian dalam bab ini juga terdapat mengenai beberapa manfaat dari penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menggambarkan mengenai teori yang menjadi pedoman penulis serta menjelaskan beberapa *research gap* terdahulu untuk mendukung penelitian. Dalam bab ini juga menggambarkan variabel yang digunakan dalam penelitian serta hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menggambarkan tentang definisi variabel penelitian baik variabel independen, dependen maupun kontrol serta variabel moderasi, selanjutnya juga disediakan data mengenai populasi dan sampel yang digunakan

dalam penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisisnya.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan serta menjelaskan pembahasan gambaran umum dari penelitian.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian dan juga saran guna membantu penelitian selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori
2.1.1 Teori Agensi

Pada tahun 1976 seorang peneliti Jensen & Meckling mengemukakan sebuah teori keagenan. Teori keagenan menelaah mengenai interaksi keagenan antara pihak *principal* yang merupakan pihak yang memberikan sebuah interaksi dan yang melakukan evaluasi terhadap suatu informasi dengan pihak agen yang merupakan pihak yang menjalankan sebuah kegiatan perusahaan. Prinsip utama dari teori keagenan adalah adanya ikatan kerja antara pihak yang melimpahkan wewenang (principal), pemangku kepentingan, dan pihak yang memperoleh wewenang (agent), yaitu pemimpin (Yuniarti & Riswandi, 2021).

Teori ini bertumpu pada dua masalah besar yang berkonsentrasi mengenai perbedaan kepentingan yang disebabkan oleh hubungan antara pihak *principal* dan pihak *agent* yang sering menimbulkan *asimetry information*. Kedua berkonsentrasi mengenai adanya benturan kepentingan yang sering menimbulkan konflik kepentingan atau konflik keagenan antara pihak *principal* dan pihak *agent* (Yulinar, 2017). Perspektif hubungan keagenan dalam teori agensi ialah landasan yang dapat digunakan untuk menelaah lebih jauh mengenai koneksi politik dalam penelitian ini (Riswandi *et al*., 2021).

Dalam sebuah perusahaan tak jarang sering terjadi konflik agensi yang disebabkan karena adanya pihak *principal* yang tidak memiliki wewenang dalam sebuah perusahaan (Tat & Murdiawati, 2020). Hal tersebut dikarenakan pihak *principal* cenderung akan melimpahkan wewenang untuk mengelola manajemen

yang dilimpahkan ke pihak agen, yang kemudian pihak agen akan bekerja untuk manajemen perusahaan (Wulandari, 2018).

Dalam sebuah perusahaan tak jarang manajemen sering menemukan dan memiliki masalah dengan beberapa pihak seperti pihak internal maupun pihak eksternal dengan masalah yang kompleks. Masalah yang terjadi antara pihak internal dan eksternal akan menjadi semakin kompleks ketika sebuah manajemen perusahaan terkoneksi politik. Hal tersebut dikarenakan jumlah pihak yang terlibat akan semakin banyak jangkauanya dan semakin luas. Teori keagenan dianggap bisa menengahi konflik antara manajemen perusahaan dan investor pemegang saham, khususnya pada perusahaan dengan keterlibatan politik yang lewat dari dewan komisaris dan direksi (Wea, 2019).

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan teori agensi dalam penelitian ini dapat difungsikan guna mengetahui interaksi antara dewan komisaris independen dengan auditor eksternal. Konflik keagenan terjadi antara internal perusahaan dan *stakeholder* dimana apabila perusahaan terkoneksi politik maka *stakeholder* menilai perusahaan tersebut terdapat suatu kecurangan maka dibutuhkan agen yakni dewan komisaris independen dan auditor eksternal.

Auditor ditugaskan secara objektif dan adil dalam memantau kinerja manajer (*agent*) guna mengetahui .kemampuan perusahaan akankah telah sejalan dengan tujuan awal sesuai kepentingan dari *principal*. Penilaian auditor eksternal dikomunikasikan dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Pada akhir tugasnya, auditor eksternal mendapatkan sebuah imbalan atau menerima upah dari jasa yang telah dilakukannya dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan.

2.1.2 *Audit fee*

Mulyadi (2012) menyatakan bahwa *audit fee* ialah sebuah biaya yang diberikan kepada akuntan publik dengan jumlah tertentu yang diberikan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah *audit fee* seperti masa auditor dalam melakukan penugasan audit laporan keuangan, jenis pemeriksaaan yang dilakukan akuntan publik, dan kebutuhan staf dalam proses pemeriksaan laporan keuangan.

Audit fee ialah imbalan yang diterima oleh auditor atas jasa yang telah diberikan pada klien, yang memiliki arti, besarnya upah jasa yang diterima auditor sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan peraturan pengurus No. 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar disesuaikan dengan hak profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntunan standar profesi akuntan publik yang berlaku.

Akuntan publik maupun kantor akuntan publik dalam memberikan jasanya berhak mendapatkan imbalan jasa berdasarkan kesepakatan antara akuntan publik dengan entitas kliennya berdasarkan surat perserikatan (Rizaldy *et al*., 2022). Imbalan jasa yang terlalu rendah menimbulkan ancaman kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik (Anggriani & Susanti, 2020).

Immanuel dan Yuyetta (2014) mendefinisikan *audit fee* sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar jasa yang dilakukan oleh auditor

eksternal. Dalam sebuah perusahaan dengan besar kecil perusahaan akan mempengaruhi *audit fee* yang ditentukan karena akan mempengaruhi risiko yang diberikan juga tingkat kerumitan atau kompleksitas audit yang dijalankan . Skema pembentukan *audit fee* memiliki dua bagian utama yakni:

1. Biaya sumber daya yang dikeluarkan dalam upaya untuk melakukan prosedur audit.
2. Biaya perkara yang dihasilkan dari masa depan sebagai akibat apabila terjadi kegagalan audit.

Renzy *et al.* (2022) menyimpulkan bahwa *audit fee* ialah upah jasa yang terbentuk rumit tidaknya suatu pekerjaan, serta kualitas jasa yang diberikan terhadap laporan audit. *Audit fee* ialah pendapatan yang diterima oleh auditor dimana besarnya bervariasi tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, ukuran kantor akuntan publik, keahlian auditor tentang industri (*industry expertise*), ukuran perusahaan klien (*client size*), kondisi keuangan (*financial of client*), dan efisiensi yang dimiliki auditor (Huri & Syofyan, 2019).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwah *audit fee* ialah biaya yang akan dibebankan kepada entitas klien atas imbalan jasa yang telah dilakukan auditor eksternal dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, dimana besaran *audit fee* berdasarkan tawar menawar klien dan KAP.

2.1.3 Koneksi Politik

Dalam penelitian Gomez dan Jomo (2011) mendefinisikan bahwa suatu entitas dianggap terhubung koneksi politik apabila entitas tersebut memiliki sebuah koneksi atau hubungan yang dekat dengan pemerintahan dan merupakan entitas

milik konglomerat. Perusahaan atau entitas yang memiliki hubungan koneksi yang dekat dengan pemerintah atau entitas milik pemerintah seperti BUMN atau BUMD. Sebaliknya, konglomerat (pemilik) perusahaan memiliki arti apabila pemilik memiliki kedekatan dengan pemerintah atau pemilik entitas menjadi salah satu tokoh politik.

Seseorang yang memiliki sebuah jabatan dalam pemerintahan pusat atau seseorang yang memiliki anggota partai politik adalah gambaran dari tokoh politik. Sehingga dapat dikatakan, koneksi politik ialah taraf kedekatan terkait ikatan bisnis dengan pemerintah (Yulinar, 2017). Koneksi politik dapat terlihat dari apakah suatu perusahaan memiliki kepemilikan langsung oleh pemerintah. Yuniarti & Riswandi (2021) menyatakan kriteria perusahaan yang mempunyai hubungan koneksi politik perusahaan sebagai berikut:

1. Mempunyai persentase minimal 10% dari bagian pemegang saham yang masih menduduki anggota parlemen atau anggota militer, menteri, pernah menduduki jabatan sebagai menteri, militer, kepala daerah atau;
2. Mempunyai persentase atau bagian minimal satu direktur yang memiliki rangkap jabatan sebagai politisi yang berafiliasi dengan partai politik, menduduki jabatan di pemerintahan, militer, pernah menduduki jabatan sebagai menteri, militer, kepala daerah atau;
3. Minimal salah satu *board of commissioner* mempunyai rangkap jabatan sebagai politisi yang berafiliasi dengan partai politik, menduduki jabatan di pemerintahan, militer, pernah menduduki jabatan sebagai menteri, militer,

kepala daerah atau;

4. Profil dewan komisaris serta direksi perusahaan tersebut adalah pernah menduduki jabatan sebagai menteri/militer/kepala daerah selama periode penelitian.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koneksi politik dalam perusahaan merupakan suatu hubungan istimewa antara perusahaan dan pemerintah yang akan memberikan keuntungan ataupun kerugian dalam perusahaan, dimana hubungan tersebut berasal dari memasukan orang ke dalam perusahaan melalui dewan komisaris maupun direksi.

2.1.4 Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris sebagai suatu badan hukum secara kolektif memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi serta memastikan Perseroan menerapkan *good corporate governance* perusahaan yang baik, dewan komisaris tersusun atas pihak yang terafiliasi dan pihak yang tidak terafiliasi komisaris independen (Sitompul, 2019).

Dewan komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi hasil laporan keuangan suatu entitas dan juga mengawasi capaian atau hasil dari usaha yang dilakukan oleh manajemen (Chandrarin & Parawiyati, 2021). Dengan adanya dewan komisaris independen dapat memberikan pengawasan yang ekstra dan berdampak terhadap *good corporate governance* perusahaan menjadi semakin baik, serta mampu mengurangi risiko salah saji dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan (Tat & Murdiawati, 2020).

Persentase komisaris independen dan ukuran dewan komisaris digunakan

untuk melihat komposisi dewan komisaris dalam sebuah perusahaan. Semakin kuatnya independensi dewan komisaris merupakan salah satu struktur *good corporate governance* yang memiliki keinginan terhadap akuntan publik untuk meningkatkan kualitas audit guna meningkatkan nilai perusahaan di hadapan para pemegang saham. Tingginya *audit fee* perusahaan terjadi karena permintaan dewan komisaris independen terhadap kualitas audit yang dilaporkan akuntan publik (Renzy *et al.*, 2022).

Beberapa kriteria tentang dewan komisaris independen adalah sebagai berikut (BEJ, 2000):

1. Dewan komisaris independen tidak mempunyai kedekatan dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Dewan komisari independen tidak mempunyai hubungan dengan direktur dan atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Dewan komisaris independen tidak mempunyai atau menduduki rangkap jabatan pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Dewan komisaris independen wajib mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
5. Dewan komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan komisaris merupakan anggota dewan

komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang memiliki tugas sebagai pengawas serta pemberi nasehat kepada direksi. Dengan adanya keberadaan dewan komisaris independen diharapkan memiliki iklim yang objektif dan independen serta *fairness* yang dapat melindungi para pemegang saham.

2.1.5 Risiko Perusahaan

Gambaran mengenai suatu keadaan perusahaan yang terdapat kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas atau kinerja perusahaan kearah yang lebih buruk dibandingkan dengan tujuan awal atau visi dan misi perusahaan adalah pengertian dari risiko perusahaan (Naibaho *et al.,* 2021). Risiko perusahaan dapat mempengaruhi laporan keuangan, tingginya risiko perusahaan sering dikaitkan dengan salah saji material laporan keuangan, dengan demikian auditor harus mengidentifikasikan risiko perusahaan dan meminimalisir adanya potensi salah saji (Sibuea, 2019).

Irma (2018) menyebutkan, risiko perusahaan adalah risiko yang dapat menggambarkan hubungan antara kewajiban perusahaan dengan ekuitas dan asetnya. Risiko perusahaan terjadi karena adanya indikasi kesulitan keuangan pada perusahaan sehingga hal tersebut dapat menunjukan kondisi kesehatan perusahaan (Nova *et al.,* 2019). Risiko perusahaan memiliki pengaruh terhadap *audit fee*. Hal ini dikarenakan semakin tingginya risiko akan mengakibatkan proses audit semakin lama yang membutuhkan jam kerja panjang, sehingga perusahaan mengeluarkan *audit fee* yang bisa mahal. (Chandra, 2015).

Sanusi & Purwanto (2017) menunjukkan risiko perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee*. Dikarenakan adanya *leverage*, perusahaan

diharapkan dapat memberikan informasi yang mereka butuhkan, sehingga auditor membutuhkan waktu yang lama dan tingkat kesulitan yang tinggi, hal ini yang menyebabkan *audit fee* perusahaan menjadi tinggi.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan risiko perusahaan merupakan suatu kondisi perusahaan yang dapat memberi dampak pada perusahaan terkait kelangsungan hidup perusahaan, serta dapat mempengaruhi juga terkait kinerja laporan keuangan perusahaan dapat diartikan perusahaan tersebut mengalami kerugian.

2.1.6 Profitabilitas

Perusahaan yang memiliki tingkat laba yang besar diduga akan membayar *audit fee* yang lebih mahal, dikarenakan semakin tingginya tingkat laba suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap pekerjaan audit dimana semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh auditor mempengaruhi *audit fee* yang dikeluarkan perusahaan semakin besar, sehingga diperlukan pemeriksaan validasi dan pengesahan pendapatan dan biaya (Fisabilillah *et al*., 2020).

Profitabiltas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dihubungkan dengan sales, total aset, serta modalnya (Sastradipraja, 2021). Pihak *stakeholders* menginginkan perusahaan mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan peningkatan profitabilitas. Manajemen perusahaan memiliki keinginan para pemangku kepentingan merasa puas akan kinerjanya. Hal ini juga ditunjukkan dengan profitabilitas perusahaan yang meningkat dengan adanya peningkatan laba perusahaan maka *audit fee* yang dikeluarkan juga meningkat (Sitompul, 2019).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan

kemampuan perusahaan dalam memperoleh tingkat laba yang diharapkan dalam periode tertentu, sehingga dapat laba perusahaan digunakan perusahaan untuk membantu mengevaluasi kinerja perusahaan sekaligus melihat perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu, tingginya tingkat laba yang dihasilkan perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee*.

2.1.7 Jenis KAP

IAPI dalam PP Nomor 2 Tahun 2016 mendefinisikan KAP sebagai suatu badan usaha akuntansi publik yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

KAP dapat dikatakan memiliki hasil audit yang berkualitas apabila KAP termasuk ke dalam KAP *big four*, atau berafiliasi dengan *big four*, yang memiliki berbagai cabang dan kliennya merupakan perusahaan-perusahaan bonafit, serta memiliki tenaga ahli yang berjumlah di atas 30 orang (Nurdjanti, 2017). Yulinar (2017) mengatakan penggunaan kantor akuntan *big four* dapat menghasilkan kualitas audit yang berkualitas sehingga dapat mempengaruhi pemberian *audit fee*. Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam anggota *the big four* adalah:

1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sanddjaja berafiliasi dengan Ernst and Young (E & Y).
2. KAP Tanudireja Wibisana dan Rekan berafiliasi dengan Pricewater house Coopers (PwC).
3. KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Thomatsu (DTT).

4. KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan jenis KAP merupakan kantor auditor mana yang akan dipilih perusahaan untuk menjalankan tugasnya sebagai auditor yang mengaudit laporan keuangan, semakin bagus KAP dinilai lebih kredibel dalam memberi opini suatu perusahaan, KAP di Indonesia sendiri terdapat 2 jenis yakni *big four* dan non *big four*. Pemilihan jenis KAP juga dapat mempengaruhi *audit fee* yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.

2.1.8 Kompleksitas

Perusahaan yang mempunyai anak perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasi, dengan demikian, perusahaan yang mempunyai anak perusahaan dinilai memiliki transaksi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai anak perusahaan. (Huri & Syofyan, 2019). Perusahaan yang mempunyai kompleksitas tinggi membuat auditor membutuhkan lebih banyak waktu, dan harus memiliki keahlian yang lebih terspesialisasi, serta memiliki lebih banyak pengalaman dengan audit, sehingga *audit fee* yang dibayarkan menjadi tinggi (Yusica & Sulistyowati, 2020).

Semakin kompleksnya suatu perusahaan dapat dilihat terkait adanya transaksi dari anak perusahaan yang menggunakan berbagai mata uang yang berbeda, biasanya perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan diluar negeri (Cristansy & Ardiati, 2018). Jumlah anak perusahaan dapat dilihat melalui laporan tahunan perusahaan. Sehingga peneliti mengukur kompleksitas perusahaan berdasarkan jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan induk (Afdhalastin &

Yuyetta, 2021).

Perusahaan yang besar, menunjukkan jumlah anak perusahaan juga semakin banyak, dan kombinasi informasi antara perusahaan induk dan anak perusahaan membuat audit laporan keuangan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, auditor memerlukan lebih banyak waktu dan keahlian untuk melakukan pekerjaan auditor sehingga mempengaruhi penetapan *audit fee* yang lebih mahal (Sibuea, 2019).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan kompleksitas usaha merupakan tingkat kerumitan suatu laporan keuangan perusahaan dan kompleks akibat yang timbul karena adanya anak perusahaan dimana perusahaan yang mempunyai anak perusahaan cenderung akan menampilkan laporan keuangan konsolidasi. Semakin banyak anak perusahaan maka akan menimbulkan *audit fee* yang tinggi karena membutuhkan waktu dan prosedur lebih terkait proses audit.

2.2 Penelitian yang Relevan

Tabel 2. 1
Penelitian yang Relevan

No	Identitas Peneliti	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Ardianigsih & Langelo Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 25. Nomor 01. Maret 2022. determinan faktor-faktor yang mempengaruhi besaran imbal jasa auditor	**Variabel Dependen** : *Audit fee* **Variabel Independen** : - Koneksi Politik - Kompleksitas Perusahaan - Ukuran Perusahaan	- Koneksi politik memiliki pengaruh negatif terhadap *audit fee*, - Kompleksitas usaha memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee* - Ukuran	- Variabel Y: *audit fee* - Variabel X: koneksi politik - Pengumpulan data *purposive sampling*	- Tahun Penelitian - Variabel independen kompleksitas peneliti memasukan variabel tersebut ke variabel kontrol - Objek penelitian: BUMN, peneliti

No	Identitas Peneliti	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	eksternal		perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee*		seluruh perusahaan yg terdaftar di BEI
2.	Agun, Candrarin, & Parawiyati AFRE *Accounting and Financial* Review, 4(1): 155-164, 2021 Koneksi Politik, *Corporate Governance*, dan *Audit fee* di Indonesia	**Variabel Dependen**: *Audit fee* **Variabel Independen**: - Koneksi Politik - Dewan Komisaris Independen **Variabel Moderasi** : Dewan Komisaris Independen	- Pengaruh koneksi politik, komisaris independen, komite audit tidak memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee* - Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee*	- Variabel Y: *audit fee* - Variabel X: koneksi politik - Analisis data sama menggunakan SPSS - Pengumpulan data *purposive sampling*	- Tahun Penelitian - Objek penelitian: Seluruh perusahaan BEI kecuali sektor keuangan, peneliti seluruh perusahaan di BEI
3.	Yuniarti, Riswandi, & Finthasari Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 14, No. 1, Mei 2021, 133-142 Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan *Gender Diversity* Terhadap *Audit fee*	**Variabel Dependen**: *Audit fee* **Variabel Independen**: Koneksi politik & *Gender Diversity*	- Koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee* - *Gender* CEO tidak memiliki pengaruh terhadap *audit fee*	- Variabel Y: *audit fee* - Variabel X: koneksi politik - Pengumpulan data *purposive sampling* - Alat analisis data sama menggunakan SPSS - Objek penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI	- Tahun penelitian - Menghilangkan variabel independen: *Gender Diversity* - Menambahkan variabel moderasi dengan *proxy* dewan komisaris independen
4.	Simanjuntak & Prabowo	**Variabel Dependen**:	- Perusahaan yang memiliki koneksi	- Variabel Y: *audit fee*	- Tahun Penelitian

No	Identitas Peneliti	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	diponegoro journal of accounting *Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021* pengaruh koneksi politik dan tata kelola perusahaan terhadap *audit fee*	*Audit fee* **Variabel Independen**: -Koneksi Politik -Tata Kelola Perusahaan **Variabel kontrol** - Ukuran perusahaan - *Return on Asset* KAP	politik memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee* ditolak - Tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh negatif terhadap *audit fee* diterima -	- Variabel X: koneksi politik - Variabel kontrol sama menggunakan ; Ukuran perusahaan, ROA, & jenis KAP - Pengumpulan data *purposive sampling* - Objek penelitian: Seluruh perusahaan BEI	- Variabel x: Tata Kelola Perusahaan - Menambahkan variabel moderasi dengan *proxy* dewan komisaris independen
5.	Iftikah & Nazar e-proceeding of management: vol.8, no.6 desember 2021 pengaruh independensi dewan komisaris, rapat komite audit dan profitabilitas perusahaan terhadap *audit fee*	- **Variabel Dependen**: *Audit fee* - **Variabel Independen**: - Dewan komisaris independen - Rapat komite auditor - Profitabilitas perusahaan	- Independensi dewan komisaris, rapat komite audit serta profitabilitas memiliki pengaruh secara simultan terhadap *audit fee*. Secara parsial membuktikan bahwa - Rapat komite audit memiliki pengaruh secara parsial dengan arah positif terhadap *audit fee* sementara independensi dewan	- Variabel Y: *audit fee* - Variabel dewan komisaris independen sebagai variabel x -	- Tahun Penelitian - Objek perusahaan di perusahaan pertanian sedangkan peneliti menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI - Alat uji data menggunakan *eviews* sedangkan peneliti menggunakan SPSS - Variabel x profitabilitas di peneliti dijadikan

No	Identitas Peneliti	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			komisaris serta profitabilitas perusahaan tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap *audit fee*		sebagai variabel kontrol - Menambahkan variabel moderasi dengan *proxy* dewan komisaris independen
6.	Haryawan, Putra, Ekasari, & Sucahyati *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 11, Issue 8, 2020 *Are* Independen *Commissioners Able to Mitigate Higher Audit fees in Politically Connected Firms? Evidence from Indonesia*	**Variabel Dependen**: *Audit fee* **Variabel Independen**: - Koneksi Politik - Dewan Komisaris Independen **Variabel Moderasi:** Dewan Komisaris Independen **Variabel Kontrol** : - Dewan Komisaris - Jenis KAP - Ukuran Perusahaan - Risiko Perusahaan	- Koneksi politik dengan dewan direksi, CEO, dan yang berafiliasi dengan organisasi, memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *audit fee* - Keberadaan komisaris independen, hubungan keduanya menjadi tidak signifikan terhadap *audit fee* - Kehadiran komisaris independen melemahkan hubungan koneksi politik terhadap *audit fee*	- Variabel Y: *audit fee* - Variabel X: koneksi politik - Variabel moderasi: dewan komisaris independen - Objek penelitian: Seluruh perusahaan BEI - Pengumpulan data *purposive sampling* -	- Tahun Penelitian - Hipotesis: Dewan komisaris independen - Alat uji data: Univariat dan Multivariat peneliti menggunakan MRA - Proxy: Risiko perusahaan menggunakan kerugian perusahaan, peneliti menggunakan *DER*
7.	Tat & Murdiawati JIA (Jurnal	**Variabel Dependen** : *Audit fee*	- Koneksi politik perusahaan, kompleksitas	- Variabel Y: *audit fee* - Variabel X:	- Tahun Penelitian - Variabel X:

No	Identitas Peneliti	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Ilmiah Akuntansi) Vol. 5, No. 1, Hal: 177-195 Juni 2020 Faktor-faktor Penentu Tarif *Audit fee* Eksternal (*Audit fee*) pada Perusahaan Non-Keuangan	**Variabel Independen** : -Koneksi Politik -Dewan Komisaris Independen -Kompleksitas Perusahaan -Ukuran Perusahaan Profitabilitas	perusahaan, dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee*. - Peran dewan komisaris independen dan profitabilitas perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit fee*	koneksi politik - Pengumpulan data *purposive sampling* - Objek penelitian: Seluruh perusahaan BEI	- Kompleksitas Perusahaan, - Profitabilitas - Sedangkan peneliti variabel tersebut sebagai kontrol - Menambahkan variabel moderasi dengan *proxy* dewan komisaris independen
8.	Fisabilillah, Fahria, & Praptiningsih Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 8 No. 3, 2020 pg. 361-372 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Risiko Perusahaan, dan Profitabilitas Klien Terhadap *Audit fee*	**Variabel Dependen:** *Audit fee* **Variabel Independen:** - Ukuran Perusahaan - Risiko Perusahaan Profitabilitas Klien	- Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee* - Risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit fee* - Profitabilitas klien berpengaruh positif terhadap *audit fee*	- Variabel Y: *audit fee* - Alat analisis data sama menggunakan SPSS - Pengumpulan data *purposive sampling* -	- Tahun penelitian - Variabel X peneliti menambahkan sebagai variabel kontrol risiko perusahaan**,** profitabilitas klien - Objek penelitian: perusahaan manufaktur, sedangkan peneliti menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI
9.	Fitri Nurjanah (2019) Pengaruh Koneksi	**Variabel Dependen** : *Audit fee* **Variabel**	- Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *audit fee*	- Variabel Y: *audit fee* - Variabel X: koneksi	- Tahun penelitian - Hipotesis: Dewan

No	Identitas Peneliti	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Politik Terhadap *Audit fee*: Efektivitas Komite Audit Dan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi.	**Independen** : Koneksi Politik **Variabel Moderasi** : - Dewan Komisaris Independen - Komite Audit	- Kompleksitas usaha memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee* - Ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee*	politik - Variabel moderasi : dewan komisaris independen - Pengumpulan data *purposive sampling* - Objek penelitian: Seluruh perusahaan BEI -	komisaris independen - *Proxy* dewan komisaris menggunakan efektivitas dewan komisaris, peneliti menggunakan total jumlah dewan komisaris independen/total jumlah dewan komisaris - Menghapus variabel moderasi lain yaitu efektivitas komite audit
10.	Nurjanah & Sudaryanti *The Indonesian Accounting Review Vol. 9, No. 2, July - December 2019* *The effect of political connection and effectiveness of audit committee on audit fee*	**Variabel Dependen**: *Audit fee* **Variabel Independen**: -Koneksi politik -Efektivitas auditor **Variabel kontrol**: -Ukuran perusahaan Profitabilitas	- Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *audit fee* - Efektivitas audit berpengaruh positif terhadap *audit fee*	- Variabel Y: *audit fee* - Variabel X: koneksi politik - Alat analisis data sama menggunakan SPSS - Peneliti juga menggunakan variabel kontrol: ukuran perusahaan dan *profitabilitas* - Pengumpulan data *purposive sampling*	- Tahun Penelitian - Variabel X efektivitas auditor - Objek penelitian; *Jakarta Islamic Index* (JII) sedangkan peneliti seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI - Menambahkan variabel moderasi dengan *proxy* dewan komisaris independen

No	Identitas Peneliti	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
11.	Hendi & Yulinar *Global Financial Accounting Journal*, Vol. I, No. 1, Agustus 2017 Berapa Besar *Audit fee*? Ditinjau Dari Koneksi Politik Dan Tata Kelola	**Variabel Dependen** : *Audit fee* **Variabel Independen :** - Koneksi Politik - Tata Kelola **Variabel Kontrol**: **Atribut perusahaan** : - Ukuran perusahaan - Kepemilikan institusional - Kepemilikan manajerial - Anak perusahaan - Anak perusahaan asing - Aset lancar - *Return on asset* - Kerugian - *Likuiditas* - *Solvabilitas* - Jenis industrial **Atribut auditor**: jenis auditor **Atribut penugasan** : -Tahun tutup buku -Pergantian auditor	- Tata kelola perusahaan, koneksi politik, variabel kontrol ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, anak perusahaan, anak perusahaan asing, aset lancar, *return on asset* (ROA), kerugian, likuiditas, solvabilitas, jenis industri, jenis auditor, tahun tutup buku, dan pergantian auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*.	- Variabel Y: *audit fee* - Variabel X: koneksi politik - Variabel kontrol: ukuran perusahaan & *ROA* - Pengumpulan data *purposive sampling*	- Tahun penelitian - Variabel kontrol : atribusi perusahaan, auditor, & penugasan - Alat analisis data menggunakan eviews peneliti menggunakan SPSS - Menambahkan variabel moderasi dengan *proxy* dewan komisaris independen
12.	Adji, Purnomo, & widyawati Pengaruh	-**Variabel Dependen**: *Audit fee* -**Variabel**	- Pengaruh koneksi politik, komisaris independen,	- Variabel Y: *audit fee* - Variabel X: koneksi	- Tahun Penelitian - Variabel Komite audit

No	Identitas Peneliti	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	koneksi politik, komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap *audit fee*	**Independen**: -Koneksi politik -Komisaris independen, -Komite audit -Ukuran perusahaan	komite audit tidak berpengaruh positif terhadap *audit fee* - Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*	politik - Alat analisis data sama menggunakan SPSS - Pengumpulan data *purposive sampling*	peneliti dijadikan variabel kontrol - Menambahkan variabel moderasi dengan *proxy* dewan komisaris independen
13.	Yulianti, Agustin, & Taqwa Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 1, Seri B, Februari 2019, Hal 217-235 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Audit, Risiko Perusahaan, Dan Ukuran KAP Terhadap *Audit fee*	- **Variabel Dependen**: *Audit fee* - **Variabel Independen**: - Ukuran perusahaan - Kompleksitas audit - Risiko perusahaan - Ukuran KAP -	- Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee* - Kompleksitas audit berpengaruh positif terhadap *audit fee* - Risiko perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap *audit fee* - Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *audit fee* -	- Variabel Y: *audit fee* - Alat analisis data sama menggunakan SPSS - Pengumpulan data *purposive sampling* - Objek penelitian: perusahaan non keuangan	- Tahun penelitian - Variabel X peneliti menambahkan sebagai variabel kontrol seperti risiko perusahaan
14.	Pratama & Cahyonowati *Diponegoro journal of accounting* vol.4,no.2 2015 pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap *audit fee*	**Variabel Dependen:** *Audit fee* **Variabel Independen:** - Independensi dewan komisaris - Ukuran dewan komisaris - Frekuensi pertemuan	- Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit fee* - Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*	- Variabel Y: *audit fee* - Variabel X: independensi dewan komisaris - Variabel kontrol: - ukuran perusahaan - jumlah anak perusahaan - return of	- Tahun Penelitian - Variabel x: menghapus ukuran dewan komisaris, frekuensi pertemuan komisaris, ukuran komite auditor, auditor internal - Regresi

No	Identitas Peneliti	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		dewan komisaris - Ukuran komite auditor - Frekuensi pertemuan komite auditor - Auditor internal **Variabel Kontrol:** - ukuran perusahaan - jumlah anak perusahaan - *return of assets* - *Debt Ratio* - Rasio Piutang - Persediaan terhadap Aset - Kantor Akuntan Publik	- Frekuensi pertemuan dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *audit fee*or eksternal - Ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *audit fee* - Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *audit fee* - Auditor internal berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit fee*	assets - debt ratio - kantor akuntan publik	Berganda (*Multiple Regression*) sedangkan peneliti menggunakan Model analisis linier berganda (MRA) - Objek penelitian: Seluruh perusahaan BEI sedangkan peneliti mengecualikan sektor keuangan
	Riwanti, Dewi & Ahzar Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS) Vol.3, No. 2, pengaruh dewan komisaris independen, kompleksitas perusahaan, dan	- **Variabel Dependen**: *Audit fee* - **Variabel Independen**: - Dewan komisaris independen - Kompleksitas perusahaan - Konvergensi IFRS	- Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee* - Kompleksitas perusahaan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap besarnya *audit fee* - Konvergensi	- Variabel Y: *audit fee* - Variabel X: independensi dewan komisaris - Pengumpulan data *purposive sampling* - Alat analisis data menggunakan SPSS	- Tahun Penelitian - Variabel x: kompleksitas perusahaan sebagai variabel kontrol dan menghapus variabel konvergensi IFRS - Objek penelitian: *property and real estate*

No	Identitas Peneliti	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	konvergensi ifrs terhadap *audit fee*		IFRS tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*		sedangkan peneliti menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI

Sumber: Data sekunder (diolah), 2022

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori-teori yang dijabarkan di atas, pada dasarnya dalam melaksanakan suatu penelitian agar mempermudah inti permasalahan maka perlu ditampilkan kerangka berpikir sebagai suatu pondasi dalam pembahasan penelitian. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

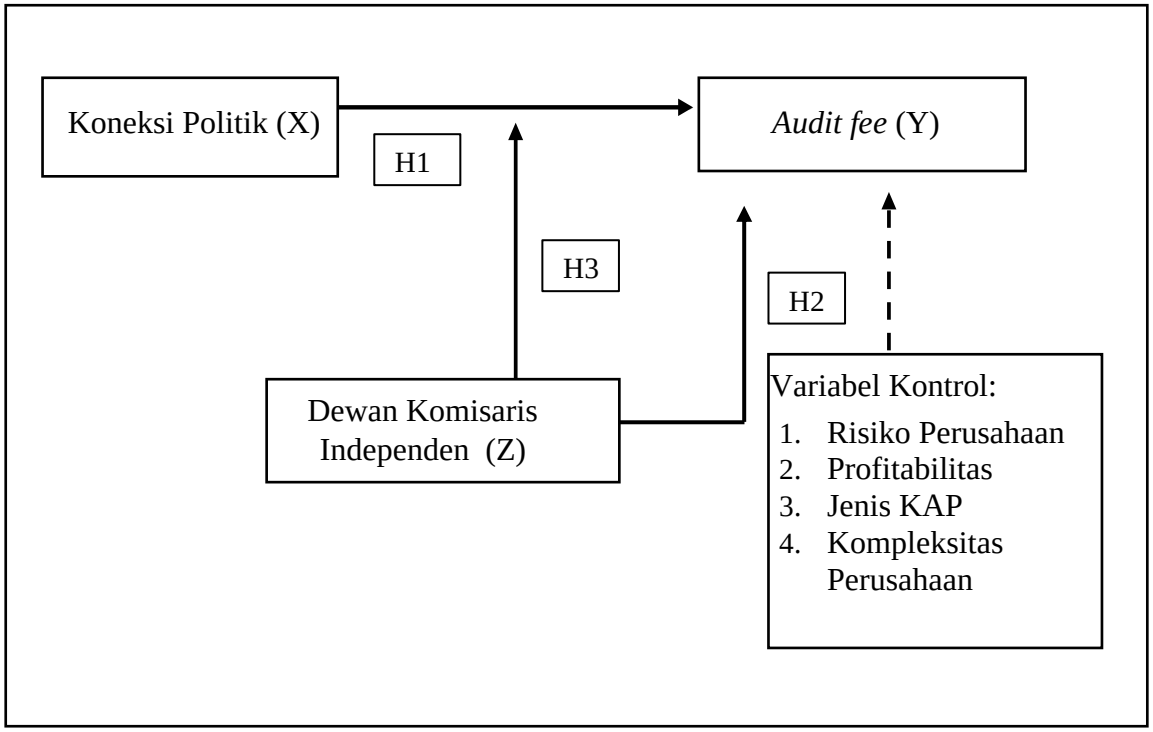

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir
Sumber: Data sekunder (diolah), 2022

Skema kerangka berpikir di atas menggambarkan pengaruh koneksi politik (X_1) sebagai variabel independen, sedangkan dewan komisaris independen berperan sebagai variabel independen (X_2) serta sebagai variabel moderasi (Z) serta terdapat variabel kontrol: risiko perusahaan, profitabilitas, jenis KAP, dan kompleksitas perusahaan berjalan searah untuk menjelaskan variabel dependen *audit fee* (Y) pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2021.

2.4 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar merupakan jawaban sementara terhadap rumusan yang masih bersifat pendugaan karena masih harus dibuktikan kebenarannya (Karjono, 2019). Hipotesis juga bisa diartikan sebagai prediksi mengenai suatu fenomena penelitian.hipotesis juga berbeda dengan proporsi, dikarenakan hipotesis merupakan dugaan yang akan diuji kebenarannya dengan fakta yang ada, sedang proporsi merupakan pernyataan yang tidak ingin diuji secara empiris (Hartono, 2017).

Jadi hipotesis memiliki arti sebagai jawaban teoritis terkait rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang merumuskan dalam penelitian (Sugiyono, 2012). Berdasarkan penelitian terdahulu hipotesis yang dapat diajukan:

2.4.1 Peran Koneksi Politik terhadap *Audit Fee*

Teori keagenan ialah teori dasar yang dapat digunakan untuk menjabarkan hubungan politik dalam penelitian ini. Perusahaan dapat dikatakan memiliki koneksi politik apabila perusahaan tersebut mempunyai kedekatan politik dengan politisi atau pemerintah (Yuniarti & Riswandi, 2021). Koneksi politik diasosiasikan

dengan perusahaan yang kurang transparan terkait penyajian laporan keuangan, dan berisiko salah saji (Chandrarin & Parawiyati, 2021).

Hubungan bisnis eksklusif perusahaan dan akses istimewa terhadap pemerintah cenderung kerap diwaspadai oleh pemilik (*principal*) sebagai salah satu tindakan nepotisme antara pemerintah dengan perusahaan/manajemen. Seorang manajemen dalam melaksanakan tugasnya, seringkali menghadapi suatu permasalahan yang timbul akibat asimetri informasi antara beberapa pihak internal dan eksternal yang menggambarkan hubungan atau afiliasi antara agen dan prinsipal. Masalah menjadi akan lebih rumit ketika aliansi terjadi di perusahaan yang terhubung secara politik lebih luas (Chandrarin & Parawiyati, 2021).

Sehingga dengan demikian, auditor percaya bahwa perusahaan dengan dewan direksi dan dewan komisaris yang memiliki hubungan koneksi politik dalam perusahaan akan meningkatkan penipuan oleh perusahaan dan meningkatkan risiko kegagalan, untuk itu, perusahaan yang memiliki hubungan koneksi politik kerap menunjuk KAP *big four* karena KAP *big for* memberikan kualitas audit tinggi secara konsisten untuk meyakinkan prinsipalnya. KAP *big four* diyakini dapat memberikan hasil kualitas audit yang lebih baik (Tat & Murdiawati, 2020).

Ariningrum & Diyanti (2017) berpendapat bahwa apabila perusahaan memiliki hubungan politik yang tinggi dapat mengakibatan semakin tinggi *audit fee* yang dibebankan kepada perusahaan tersebut. Perusahaan yang terkoneksi politik dijabarkan akan menimbulkan risiko bawaan yang lebih besar bagi auditor karena kemungkinan sering kali terjadi kegagalan dalam bisnis dan lebih mungkin menyajikan laporan informasi keuangan yang buruk (Yulinar, 2017).

Risiko perusahaan akibat koneksi politik akan melekat lebih tinggi dan dapat dilihat pada *audit fee* yang lebih mahal dibebankan kepada perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kedekatan dengan politik cenderung akan membayarkan *audit fee* yang lebih mahal kepada auditor. Hubungan ini menghasilkan lebih banyak upaya dalam melakukan proses audit, termasuk tingkat detail program audit, jumlah sampel audit, masa kerja audit, dan banyak lagi. Menghadapi situasi ini, auditor akan cenderung membebankan *audit fee* yang lebih mahal kepada klien, karena *audit fee* dianggap sebagai representasi dari upaya audit oleh auditor (Harymawan *et al*., 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riswandi *et al*. (2021) hubungan politik dapat meningkatkan *audit fee*.

Begitu pula dalam penelitian Chandrarin & Parawiyati (2021) mendapatkan hasil variabel koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee* karena perusahaan yang terkoneksi secara politik menimbulkan risiko tinggi pada perusahaan, sehingga dapat memperpanjang pekerjaan yang dilakukan oleh auditor sehingga dapat menaikkan *audit fee*. Penelitian yang dilakukan oleh Ariningrum & Diyanty (2017), Tee (2017) dan Wea (2019) juga menyimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *audit fee.*

Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

H1: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *audit fee*

2.4.2 Peran Dewan Komisaris Independen terhadap *Audit Fee*

Dewan komisaris independen memiliki peran yang berkaitan dengan sebuah kredibilitas, perancangan laporan keuangan, dan mengawasi pelaksanaan *good*

corporate governance (Renzy *et al*., 2022). Sehingga salah satu bagian dari struktur *corporate governance* adalah jumlah anggota dewan komisaris. Berdasarkan teori agensi, jumlah anggota independen yang besar dapat mempermudah dalam mengontrol dan mengendalikan manajerial perusahaan sehingga, pengawasan akan semakin efektif (Chandrarin & Parawiyati, 2021).

Dewan komisaris independen dapat mengelola fungsi pengawasan dengan baik terkait pelaporan keuangan yang disusun oleh manajemen, hingga kondisi ini bisa meminimalkan terjadinya asimetri informasi (Tat & Murdiawati, 2020). Hal ini karena agen mengawasi pengungkapan terkait informasi laporan keuangan demi kepentingan pihak prinsipal, berupa pemilihan KAP *big four* sehingga mampu memberikan kualitas audit yang tinggi (Sukaniasih, 2016).

Asimetri informasi dapat terjadi karena adanya kepentingan yang saling bertentangan antara pemilik dan manajer, untuk menurunkan permasalahan yang akan timbul akibat dari pertentangan maka dibutuhkan penerapan *corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan, salah satunya ialah memiliki dewan komisaris independen (Sitompul, 2019).

Salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan dalam suatu perusahaan adalah dewan komisaris independen, sebagai dewan pengawas, dewan komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk memantau kinerja direksi dalam rangka pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan (Setiawan *et al*., 2019). Beasley (1996), menjelaskan semakin banyak jumlah dewan komisaris independen pada sebuah perusahaan, maka akan meningkatkan independensi, karena dengan semakin banyaknya pihak yang tidak terafiliasi, akan menghasilkan pengawasan

yang lebih baik dan lebih fokus terkait pengawasan perusahaan.

Sehingga dewan komisaris independen yang banyak pada suatu perusahaan akan menjadi salah satu syarat praktik penerapan *governance* yang baik serta cenderung akan melakukan pengawasan dan menjaga kualitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabnya kepada para pemegang saham. Dengan demikian akan memilih akuntan publik *big four* untuk memperoleh kualitas audit yang berkualitas demi menjaga serta meningkatkan citra perusahaan di hadapan para pemegang saham (Sukaniasih, 2016). *Audit fee* yang tinggi kerap terjadi karena permintaan dewan komisaris independen terhadap tingginya kualitas audit (Sitompul, 2019).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anandita & Wiliasti (2020) dan Paramitha (2022) yang mendefinisikan, dewan komisaris independen akan menggunakan KAP *big four* dan cenderung meminta kualitas yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan *audit fee* yang dibebankan pada perusahaan lebih mahal. Sehingga dapat mengindikasikan bahwa apabila sebuah perusahaan memiliki *good corporate governance* yang baik akan cenderung menggunakan jasa audit yang lebih berkualitas untuk melindungi reputasi perusahaan dan kekayaan pemegang saham. Hasil kualitas audit yang tinggi cenderung akan membuat *audit fee* yang dibebankan perusahaan lebih mahal.

Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *audit fee*

2.4.3 Peran Koneksi Politik terhadap *Audit Fee* dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Masalah keagenan klasik konflik antara pemegang saham dan manajemen karena adanya asimetri informasi yang diterima. manajemen sebagai pengendali perusahaan memiliki informasi yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham. Tindakan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dapat dibatasi dengan adanya dewan komisaris independen sehingga mengurangi asimetri informasi (Tat & Murdiawati, 2020).

Di Indonesia, hubungan politik dan komisaris independen dalam bisnis adalah hal biasa (Harymawan *et al.*, 2020). Bahkan menurut peraturan daerah, dewan komisaris independen tidak bersifat wajib. Perusahaan yang terdaftar di Indonesia cenderung memiliki dewan komisaris independen untuk menjaga legitimasi perusahaan di mata publik. Adapun koneksi politik, keuntungan yang ditawarkan dengan memperoleh koneksi ini di Indonesia membuat perusahaan saling berlomba untuk mendapatkan dan mempertahankan koneksi politik.

Fama dan Jensen (1983) mendefinisikan dewan komisaris independen dapat mencerminkan mengenai pengawasan perusahaan yang efektif. Dewan komisaris independen akan menunjukkan kinerja yang efektif dengan melakukan pengawasan yang rutin terhadap pembuatan laporan keuangan sehingga mampu menurunkan risiko yang terjadi terkait masalah yang muncul dalam laporan keuangan. Berdasarkan teori keagenan, fungsi pengawasan akan semakin efektif apabila perusahaan memiliki dewan komisaris independen dalam jumlah yang banyak sehingga dapat mempermudah dalam mengendalikan manajemen puncak.

Chandrarin & Parawiyati (2021) mengungkapkan perusahaan yang mempunyai tingkat transparansi yang rendah dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas buruk dan berisiko tingginya salah saji laporan keuangan biasanya perusahaan tersebut memiliki hubungan koneksi politik. Perusahaan yang terhubung secara politik memiliki risiko yang lebih besar dengan itu peran keberadaan komisaris independen akan cenderung menurunkan risiko perusahaan. Dengan demikian maka dewan komisaris independen akan melakukan pengawasan serta menjaga kualitas pelaporan keuangan yang dibuat oleh manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemegang saham (Sukaniasih, 2016)

Sejalan dengan penelitian Harymawan *et al.*, (2020) dan Fitri (2019) yang mengidentifikasikan terkait peran dewan komisaris independen dapat melemahkan pengaruh adanya koneksi politik perusahaan terhadap *audit fee*. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen memiliki tugas terkait mengawasi dan mengendalikan manajemen agar tidak terlalu mengambil risiko bisnis yang terlalu tinggi sehingga bisa mengurangi *audit fee*. Jadi dewan komisaris independen berpotensi memoderasi hubungan antara koneksi politik terhadap *audit fee*.

Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Dewan komisaris independen memperlemah koneksi politik dan *audit fee*

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 hingga penelitian selesai. Objek dalam penelitian ini yang digunakan peneliti adalah koneksi politik dan peran dewan komisaris independen terhadap *audit fee*. Penelitian ini dilakukan pada seluruh sektor perusahaan yang tercatat di BEI pada peride 2021.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Fauzi *et al.* (2019) penelitian kuantitatif yaitu,penelitian dengan data dalam bentuk angka yang mengindikasikan "besaran" atau "jumlah" dan data ini menggunakan skala pengukuran interval dan skala rasio. Sebagai contoh, data gaji karyawan, data jumlah karyawan, dan sebagainya.

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi dalam sebuah penelitian ialah keseluruhan unsur yang akan diteliti yang didalamnya terdiri dari objek atau subjek yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti guna ditelaah dan menentukan kesimpulan yang didapat dari subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sektor perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 yang didapat melalui situs resmi website *Indonesia Stock Exchange.* Berdasarkan situs resmi Bursa Efek Indonesia terdapat 810 perusahaan pada tahun 2021.

3.3.2 Sampel

Sampel dapat menggambarkan sebuah komponen dari keseluruhan dan individual yang dipunyai oleh suatu populasi (Sugiyono, 2017). Sampel merupakan unit atau elemen yang diambil untuk mewakili populasi untuk dianalisis dan diambil kesimpulan terhadap sampel dari populasinya. Secara umum setelah populasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan sampel dengan menetapkan kriteria sampel berdasarkan sebaran data pada populasi apakah mampu mempresentasikan dari sebuah populasi yang diteliti (Hartono, 2017). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI kecuali sektor keuangan pada tahun 2021 sebanyak 810 perusahaan.

3.3.3 Teknik Pengumpulan Sampel

Dalam penelitian ini guna memilih sampel yang sesuai dengan tujuan penulis maka digunakan sebuah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* mirip dengan *snowball sampling* karena sampel dipilih oleh peneliti pada kekuatan pengalaman mereka dari fenomena yang diteliti berdasarkan pertimbangankriteria tertentu (Collis & Hussey, 2021). Kriterial sampell dalam penelitian inii adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2021.
2. Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan di BEI maupun dalam website masing-masing perusahaan secara lengkap pada tahun 2021
3. Perusahaan yang tidak menyampaikan besaran *audit fee* pada tahun 2021

Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* diharapkan dapat mendapatkan sampel yang diambil dari populasi yang representatif (mewakili).

Tabel 3. 1
Penjelasan Sampel

No	Penjelasan Sampel	Jumlah Sampel
1.	Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2021 kecuali sektor keuangan	810
2.	Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tahunan di BEI tahun 2021	29
3.	Perusahaan yang tidak menyampaikan besaran *audit fee* di tahun 2021	(361)
	Jumlah Perusahaan yang masuk sampel	420
	Jumlah data akhir yang digunakan dalam penelitian	420

Sumber: Data sekunder (diolah), 2022

Dari total 810 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2021 kecuali sektor keuangan, ternyata terdapat beberapa perusahaan yang tidak memenuhi kriteria *purposive sampling*. Sebanyak 29 perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tahunan pada tahun 2021 dan sebanyak 361 perusahaan tidak menyampaikan besaran *audit fee* pada tahun 2021. Sehingga total sampel pada penelitian ini adalah 420 perusahaan.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan termasuk kedalam jenis data sekunder. Dimana data tersebut diperoleh dari website *Indonesia Stock Exchange* untuk memperoleh data laporan keuangan perusahaan maupun laporan tahunan (*annual report)* perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2021.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara penelusuran data sekunder dengan kepustakaan manual serta data yang digunakan peneliti dikumpulkan melalui proses dokumentasi. Teknik dokumentasi sendiri dilakukan dengan menari dan mengumpulkan laporan tahunan atau laporan keuangan dan

laporan direktur dari perusahaan periode penelitian dan data lain yang diperlukan.

3.6 Variabel Penelitian

Variabel dependen ialah variabel yang merupakan inti penelitian yang diteliti oleh seorang peneliti dan menjadi minat utama dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian dimana terdapat variabel yang dipengaruhi dan menjadi akibat karena keberadaan variabel bebas atau variabel independen merupakan nama lain dari variabel dependen (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen *audit fee*.

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau terikat baik secara positif maupun negatif (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan peran koneksi politik (X_1) dan dewan komisaris independen (X_2).

Variabel moderasi merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2017). Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen.

Variabel kontrol merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen atau terikat, namun tidak menjadi fokus peneliti. Variabel kontrol dalam penelitian ini menggunakan risiko perusahaan, profitabilitas, jenis KAP, dan kompleksitas perusahaan.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjabaran dari variabel-variabel penelitian, dimensi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut.

Tabel 3. 2
Variabel Operasional

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator Pengukuran
1.	**Variabel Dependen** *Audit fee*	*Audit fee* (AFEE) *actual audit fee* ialah besaran upah audit yang berasal dari laporan tahun perusahaan untuk biaya audit yang dikeluarkan. Pengukurannya menggunakan bentuk logaritma natural dari besaran *audit fee*. Operasionalisasi variabel seperti ini juga dilakukan (Paramitha, 2022)	$AFEE = Logaritma\ Natural\ (Ln)\ Audit\ Fee$ Paramitha (2022)
2.	**Variabel Independen** Koneksi Politik	Perusahaan dapat dikatakan terkoneksi politik apabila telah memenuhi salah satu kriteria koneksi politik menurut koneksi politik dapat diamati dari ada atau tidak kepemilikan langsung oleh pemerintah (Chandrarin & Parawiyati, 2021). Dengan kriteria: 1. Perusahaan milik pemerintahan BUMN/BUMD atau; 2. Minimal memiliki persentase sebesar 10% dari salah satu pemegang saham adalah yang masih menduduki anggota parlemen atau anggota militer, menteri, atau dalam tahun sebelumnya pernah menjabat atau menduduki kursi jabatan sebagai menteri, militer, kepala daerah atau; 3. Terdapat minimal satu *board of director* yang pada saat menjabat sebagai direktur menjabat pula	Koneksi politik yang diukur dengan variabel *dummy*, apabila suatu perusahaan memiliki koneksi secara politik maka diberikan nilai 1 dan apabila suatu perusahaan tidak memiliki koneksi politik maka diberikan nilai 0 (Chandrarin & Parawiyati, 2021).

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator Pengukuran
		menjadi salah atau kursi politisi yang bekerjasama atau berafiliasi dengan partai politik, menduduki jabatan di pemerintahan, militer, pernah menjabat atau menduduki kursi jabatan sebagai menteri, militer, kepala daerah atau; 4. Minimal salah satu *board of commissioner* saat menjabat sebagai komisaris menjabat pula menjadi salah atau kursi sebagai politisi yang berafiliasi dengan partai politik, menduduki jabatan di pemerintahan, militer, pernah menjabat atau menduduki sebagai menteri, militer, kepala daerah atau; 5. Profil dewan komisaris serta direksi perusahaan tersebut adalah pernah menjabat atau menduduki sebagai menteri, militer, kepala daerah atau pernah berafiliasi dengan parta politik selama periode penelitian.	
3.	**Variabel Independen** Dewan Komisaris Independen	Dewan komisaris independen merupakan salah satu komponen dalam *good corporate governance* yang berperan untuk menjalankan fungsi pengawasan (KNKG, 2006). Dalam penelitian ini variabel dewan komisaris independen diukur menggunakan rasio dari jumlah semua anggota dewan komisaris independen perusahaan dibagi dengan	DK=$\frac{\sum Dewan\ Komisaris\ Independen}{\sum Dewan\ Komisaris}$ Paramitha, (2022)

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator Pengukuran
		jumlah dari anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan (Paramitha, 2022). Dewan komisaris juga sebagai variabel moderasi dengan *proxy* yang sama.	
4.	**Variabel Kontrol** Risiko Perusahaan	Gambaran mengenai suatu keadaan perusahaan yang terdapat kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas atau kinerja perusahaan kearah yang lebih buruk dibandingkan dengan tujuan awal atau visi dan misi perusahaan adalah pengertian dari risiko perusahaan (Naibaho *et al.*, 2021). Dalam penelitian ini untuk menggambarkan risiko perusahaan peneliti menggunakan rasio DER (Fisabilillah *et al*., 2020).	DER = $\frac{Total\ Liabilities}{Total\ Equity}$ (Fisabilillah *et al*., 2020)
5.	**Variabel Kontrol** Profitabilitas	Profitabilitas adalah kemampuan untuk mendapatkan laba pada suatu perusahaan dalam periode tertentu (Sitompul, 2019). *Profitabilitas* klien dalam penelitian ini menggunakan rasio ROA (Paramitha, 2022).	ROA = $\frac{Net\ Income}{Total\ Aset}$ (Paramitha, 2022).
6.	**Variabel Kontrol** Jenis KAP	Yulinar (2017) mengidentifikasikan penggunan kantor akuntan *big four* dan *non big four* dapat mempengaruhi besaran *audit fee* yang dikeluarkan perusahaan.	Jenis KAP yang diukur menggunakan variabel dummy yakni pemberian nilai 1 untuk perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big four* dan nilai 0 untuk perusahaan yang menggunakan jasa KAP non *Big four* (Yulinar, 2017).
7.	**Variabel Kontrol**	Kompleksitas perusahaan digambarkan dengan	Kompleksitas perusahaan dihitung menggunakan dummy

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator Pengukuran
	Kompleksitas Perusahaan	perusahaan yang mempunyai anak dan wajib untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan konsolidasi. Hal tersebut berarti perusahaan yang memiliki anak perusahaan kedepannya akan mengalami aktivitas dan transaksi yang lebih rumit daripada perusahaan biasanya (Sanisah Huri, 2019). Ketika kompleksitas perusahaan tinggi, ruang lingkup audit lebih luas dan membutuhkan waktu penyelesaian yang lama sehingga berdampak pada *audit fee* (Ardianingsih & Afifah, 2021)	dimana perusahaan yang memiliki anak perusahaan diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan diberi nilai 0. (Ardianingsih & Afifah, 2021)

Sumber: Data sekunder (diolah), 2022

3.8 Teknik Analisis Data

Seluruh penyajian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bantuan aplikasi excel dan SPSS 23 dengan Moderated Regression Analysis (MRA). Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskripsi merupakan yang berkaitan dengan pengumpulan data penyajian data supaya memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau penjelasan atas variabel-variabel yang digunakan dilihat dari nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean), sum, range, varian, standar deviasi, skewness (kemencengan distribusi), dan kurtosis (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, statistik deskriptif yang digunakan adalah maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi.

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini dalam menguji menggunakan metode analisis MRA. Sebelum melakukan pengujian menggunakan analisis MRA diperlukan adanya beberapa pengujian yang sering disebut uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Dalam sebuah penelitian untuk melakukan sebuah regresi maka harus lolos semua uji asumsi klasik slah satunya adalah uji normalitas. Dimana uji normalitas sendiri digunakan guna mengetahui apakah dalam penelitian ini berdistribusi normal dari segala pengaruh variabel pengganggu (Ghozali, 2016).). Untuk mendeteksi normalitas data dapat diuji dengan Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,05 atau lebih maka dikatakan bahwa data sudah terdistribusi normal dan lolos uji normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* atau *residual* dari data pengamatan ke data pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melakukan uji *glejser*. Data dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila probability > 0.05 (Ghozali & Ratmono, 2017).

Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan *absolut residual* (AbsolUt) sebagai variabel sedangkan variabel independen tetap. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian melihat probibalitas signifikansinya apabila diatas 5% makan diartikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.2 Teknik *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi moderasi. Menurut Ghozali, (2016) MRA adalah pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Teknik analisis data yang digunakan adalah MRA. Teknik tersebut dipergunakan guna mengetahu dan menganalisis dalam suatu penelitian akankah penambahan variabel dapat memperkuat atau justru melemahkan pengaruh hubungan antar variabel penelitian. Model Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta 0 + \beta 1PolCon + \beta 2BoardInd + \beta 4DER + \beta 5ROA + \beta 6KAPSize + \beta 7ComCorp + \in$$

$$Y = \beta 0 + \beta 1PolCon + \beta 2BoardInd + \beta 3PolCon * BoardInd + \beta 4DER + \beta 5ROA + \beta 6KAPSize + \beta 7ComCorp + \in$$

Keterangan:

Y	= Logaritma natural *audit fee*
β0	= Konstanta
β1-n	= Koefisien regresi
PolCon	= Koneksi politik
BoardInd	= Dewan Komisaris Independen
PolCon*BoardInd	= Perkalian koneksi politik dengan dengan Dewan Komisaris Independen
DER	= Risiko perusahaan
ROA	= Profitabilitas
KAPSize	= Jenis KAP
ComCorp	= Kompleksitas perusahaan
∈	= *Error term*

3.8.3 Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R2)

Dalam menilai pengaruh sejauh mana pengaruh dan konstribusi seluruh variabel independen yang dapat menggambarkan variabel dependen dalam penelitian dapat dilihat dari uji koefisien determinasi. Selain itu uji koefisien determinasi juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menggambarkan dan menjelaskan variabel independen secara simultan. Nilai adjusted R^2 dapat mengalami kenaikan maupun penurunan apabila terdapat penambahan satu variabel bebas yang ditambahkan dalam sebuah penelitia sehingga akan memengaruji adjusted R^2. Nilai Koefisien determinasi berkisar 0 sampai 1 berarti kuat kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan keragaman yang dapat dijelaskan dari variabel terikat. Sebaliknya jika adjusted R^2 semakin mendekati 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel bebas menjelaskan keragaman yang dapat dijelaskan dari variabel terikat (Widarjono, 2013).

2. Uji F

Pengujian ini merupakan suatu uji yang digunakan dalam penelitian, untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2017). Cara melakukan uji signifikansi simultan ialah dengan menilai dan menelaah hasil dari tabel anova, yang ditelaah apabila dalam tabel anova menunjukkan nilai F lebih kecil dari nilai signifikannya (nilai $F<0.05$) menunjukkan dalam penelitian tersebut terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dalam penelitian terhadap variabel terikat dalam penelitian tersebut.

3. Uji t

Uji t merupakan pengujian yang dilakukan terhadap variabel independen atau

variabel dependen (Ghozali, 2017). Adapun mengenai hipotesis-hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dilihat dari uji t dengan signifikansi 0,05 (α=5%) yaitu sebagai berikut:

a. Jika α < 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Jika α > 0,05, maka Ha ditolak dan Ho diterima, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh *audit fee* sebagai variabel dependen sedangkan koneksi politik (X_1) dan peran dewan komisaris independen sebagai (X_2) dan sebagai variabel moderasi. Serta penambahan variabel kontrol yaitu: *profitabilitas*, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, dan jenis KAP.

Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021. Pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan memilih sampel untuk diteliti menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah dibuat di bab sebelumnya, menghasilkan jumlah data sebanyak 420 perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2021 dengan pengamatan sebanyak 810 perusahaan. Berikut terkait rincian kriteria sampel:

Tabel 4. 1
Kriteria Sampel

No	Penjelasan Sampel	Jumlah Sampel
1.	Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2021	810
2.	Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tahunan di BEI tahun 2021	(29)
3.	Perusahaan yang tidak menyampaikan besaran *audit fee* di tahun 2021	(361)
	Jumlah Perusahaan yang masuk sampel	420
	Jumlah data akhir yang digunakan dalam penelitian	420

Sumber: Data sekunder (diolah), 2023

Terkait perusahaan yang terpilih menjadi sampel sebanyak 420 perusahaan terdapat di lampiran 2.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berfungsi agar menghasilkan gambaran terkait banyaknya sampel data yang diteliti untuk mendapatkan data mengenai nilai maksimum, minimum, tengah, dan standar deviasi atas masing-masing variabel yang diteliti. Berikut hasil uji statistik deskriptif:

Tabel 4. 2.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	*Minimum*	*Maximum*	*Mean*	*Std. Deviation*
Audit fee	420	17.60	24.51	20.3223	1.24828
Koneksi Politik	420	.00	1.00	.3571	.47973
Dewan Komisaris Independen	420	.25	1.00	.4498	.12508
Profitabilitas	420	-1396.86	1.93	-3.3056	68.16150
Risiko Perusahaan	420	-231.26	78.61	.9027	12.72631
Kompleksitas Perusahaan	420	.00	1.00	.7833	.41246
Jenis KAP	420	.00	1.00	.3476	.47678
Valid N (listwise)	420				

Sumber: Data sekunder (diolah), 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah data penelitian dalam observasi ini berjumlah 420 data pada tahun 2021. Hasil uji statistik deskriptif menunjukan masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

1. *Audit fee*

Variabel *audit fee* menunjukkan nilai minimum sebesar 17,60 dan nilai maksimum sebesar 24,51. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *audit fee* berkisar antara 17,60 hingga 24,51. Nilai terendah ada pada PT Menteng Heritage Realty Tbk (HRME) dengan nilai 17,60. Sedangkan nilai tertinggi terjadi pada PT Indosat Tbk (ISAT) dengan nilai 24,51. Sedangkan nilai *mean* (rata-rata) sebesar 20,3092 dan nilai standar deviasi sebesar 1,23303. Nilai rata-rata lebih besar dari

standar deviasi yang berarti simpangan data yang ada dalam sampel penelitian relatif kecil.

2. Koneksi Politik

Variabel koneksi politik adalah variabel dummy, skor 1 jika perusahaan salah satu dewan komisaris maupun direkturnya terkoneksi politik diberi skor 1 dan 0 jika perusahaan tidak memiliki koneksi politik. Sebanyak 104 data perusahaan yang memiliki koneksi politik dan 316 data perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Dengan persentase perusahaan yang terkoneksi politik sebesar 24,76% dan 75,23% perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik dalam perusahaan. Standar deviasi sebesar 0,47973. Sedangkan *mean* (rata-rata) variabel ukuran perusahaan sebesar 0,3571. Nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi yang berarti simpangan data yang ada dalam sampel penelitian relatif besar.

Tabel 4. 3
Distribusi Variabel Dummy

Koneksi Politik	Jumlah
0	316
1	104

Sumber: Data sekunder (diolah), 2023

3. Dewan Komisaris Independen

Pada variabel dewan komisaris independen, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0,25 yang dimiliki oleh PT. Astra Otoparts Tbk (AUTO), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Steel Pipe Industry of Indones (ISSP), PT Minna Padi Investama Sekuritas (PADI), PT Panin Sekuritas Tbk (PANS), PT Panin Financial Tbk (PNLF), PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB), dan PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS).

Sedangkan nilai maksimum sebesar 1 yang dimiliki oleh PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA), PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME), dan PT Bentoel Internasional Investam (RMBA). Dengan nilai standar deviasi 0,12508. Nilai *mean* (rata-rata) variabel dewan komisaris independen sebesar 0,4498. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yang berarti simpangan data yang ada dalam sampel penelitian relatif kecil. Hal ini menjabarkan bahwa nilai rata-rata dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan memiliki nilai sebesar 44% dan perusahaan patuh melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Pasal 20 (3) mengenai jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

4. Profitabilitas

Pada variabel profitabilitas, berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif memperoleh nilai minimum sebesar -1396,86 yang merupakan perusahaan Leyand International Tbk. (LAPD), sedangkan nilai maksimum sebesar 1,93 yang merupakan perusahaan PT. Bintang Oto Global Tbk (BOGA). Standar deviasi sebesar 68,16150 dan nilai *mean* (rata-rata) variabel ukuran perusahaan sebesar -3,3056. Nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi yang berarti simpangan data yang ada dalam sampel penelitian relatif besar.

5. Risiko Perusahaan

Variabel risiko perusahaan, berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif mendapatkan nilai minimum sebesar -231,26 milik PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS), sedangkan nilai maksimum menunjukkan angka sebesar 78,61 milik Anabatic Technologies Tbk (ATIC). Nilai *mean* (rata-rata)variabel risiko

perusahaan sebesar ,9027 dan nilai standar deviasi sebesar 12,72631. Nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi yang berarti simpangan data yang ada dalam sampel penelitian relatif besar.

6. Kompleksitas Perusahaan

Variabel kompleksitas perusahaan merupakan variabel dummy, skor 1 jika perusahaan mempunyai anak perusahaan diberi skor 1 dan 0 jika perusahaan tidak mempunyai anak perusahaan. Sebanyak 332 data perusahaan yang mempunyai anak perusahaan dan 88 data perusahaan yang tidak mempunyai anak perusahaan. Dengan persentase perusahaan yang mempunyai anak perusahaan sebesar 79% dan 21% terdapat pada perusahaan yang tidak mempunyai anak perusahaan dalam perusahaan. Nilai standar deviasi sebesar 0,41246 dan nilai *mean* (rata-rata) variabel kompleksitas perusahaan sebesar 0,7833. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yang berarti simpangan data yang ada dalam sampel penelitian relatif kecil.

Tabel 4. 4
Distribusi Variabel Dummy

Kompleksitas Perusahaan	Jumlah
0	88
1	332

Sumber: Data sekunder (diolah), 2023

7. Jenis KAP

Variabel jenis KAP merupakan variabel dummy, apabila perusahaan menunjuk KAP *big four* diberikan skor 1. Sedangkan untuk perusahaan yang menunjuk KAP *non big four* dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan maka diberikan skor 0. Sebanyak 148 data perusahaan yang menggunakan KAP *big four*

dan 272 data perusahaan yang tidak menggunakan KAP *big four*. Dengan nilai persentase perusahaan yang menunjuk KAP *big four* sebesar 35% dan 65% perusahaan yang menunjuk KAP *non big four*. Nilai standar deviasi sebesar 0,41246 dan nilai *mean* (rata-rata) variabel jenis KAP sebesar 0,3476. Nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi yang berarti simpangan data yang ada dalam sampel penelitian relatif besar.

Tabel 4. 5
Distribusi Variabel Dummy

Jenis KAP	Jumlah
0	272
1	148

Sumber: Data sekunder (diolah), 2023

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Berikut hasil uji asumsi klasik yang dilakukan pada model regresi.

1. Uji Normalitas

Uji *kolmogorov smirnov* (K-S) digunakan untuk uji normalitas. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Dikatakan berdistribusi normal ketika bila nilai *test statistic Kolmogorov-smirnov* lebih dari 0,05 nilai signifikansinya.

Tabel 4. 6
Hasil Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Test Statistic	.070
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000[c]

Sumber: Data sekunder (diolah), 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas mengenai output hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat diketahui nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga, disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdistribusi normal. Namun berdasarkan *Central Limit Theorem* mengatakan bahwa apabila data tidak berkontribusi normal dengan ukuran sampel yang besar yaitu berjumlah 30 (Dielma,1961). Gujarat (2004:110) menyatakan bahwa jika dihadapkan sesuatu yang serius menyatakan bahwa jika dihadapkan dengan jumlah sampel yang kecil (<100) maka masalah normalitas merupakan sesuatu yang serius. Namun jika berhadapan dengan ukuran sampel yang besar (>100) maka normalitas bukan merupakan sesuatu yang diharuskan.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menggunakan asumsi dari Gujarati dan *Central Limit Theorem* sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan walaupun tidak lolos uji normalitas dikarenakan sampel dalam penelitian ini adalah sampel besar karena meliputi 420 perusahaan sehingga lebih dari 30 berdasarkan *Central Limit Theorem* dan lebih dari 100 perusahaan berdasarkan asumsi Gujarati.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya masalah heterkedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejer, yaitu menghasilkan nilai mutlaknya (AbsRes) dengan signifikansi lebih dari 0,05.

Tabel 4. 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Standar	Keterangan
Koneksi Politik	0,529	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dewan Komisaris Independen	0,608	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Profitabilitas Perusahaan	0,178	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Risiko Perusahaan	0,559	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kompleksitas Perusahaan	0,450	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Jenis KAP	0,373	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder (diolah), 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas mengenai uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas. Hal ini karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 pada masing-masing variabel.

4.2.3 Hasil Uji Hipotesis

Tujuan dari uji hipotesis adalah menentukan apakah dugaan tentang karakteristik suatu populasi didukung kuat oleh informasi yang diperoleh dari data observasi atau tidak.

1. **Analisis Determinasi (*Adjusted* R^2)**

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi mengenai variabel koneksi politik dan dewan komisaris independen dalam menerangkan variasi variabel *audit fee*.

a. Uji R^2 Sebelum Moderasi

Tabel 4. 8
Hasil Determinasi (R^2) Sebelum Moderasi

Model Summary		
Model	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	.457	.91969
a. Predictors: (Constant), Koneksi Politik, Dewan Komisaris Independen, Profitabilitas, Risiko Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, dan Jenis KAP		

Sumber: Data sekunder (diolah), 2023

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, hasil *adjusted R square* adalah 0,457 atau 45,7%. Dapat dikatakan bahwa 44,3% variabel *audit fee* dapat didefinisikan oleh variabel independen dewan komisaris independen serta variabel kontrol seperti

Profitabilitas, Risiko Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, dan Jenis KAP. Sisanya sebesar 42,7% dapat didefinisikan oleh variabel lain atau faktor lain diluar penelitian.

b. Uji R^2 Setelah Moderasi

Tabel 4. 9
Hasil Determinasi (R^2) Setelah Moderasi

Model Summary		
Model	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	.456	.92053

a. Predictors: (Constant), Koneksi Politik, Dewan Komisaris Independen, Koneksi Politik*Dewan Komisaris Independen, Profitabilitas, Risiko Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, dan Jenis KAP

Sumber: Data sekunder (diolah), 2023

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas, hasil *adjusted R square* adalah 0,456 atau 45,6%. Dapat dikatakan bahwa 45,6% variabel *audit fee* dijelaskan oleh variabel independen dewan komisaris independen serta variabel kontrol seperti Profitabilitas, Risiko Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, dan Jenis KAP. Sisanya sebesar 44,4% dapat dijelaskan oleh variabel independen atau faktor lain diluar penelitian.

2. **Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Uji F memiliki tujuan untuk mengetahui apakah secara bersamaan-sama variabel bebas dapat terdapat pengaruh terhadap variabel terikat. Model diterima apabila nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0,05.

a. Hasil Uji F Sebelum Moderasi

Tabel 4. 10
Hasil Signifikansi Simultan (Uji F) Sebelum Moderasi

ANOVA[a]

Model		*Sum of Squares*	*Df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
1	Regression	303.563	6	50.594	59.816	.000[b]
	Residual	349.327	413	.846		
	Total	652.889	419			

Sumber: Data sekunder (diolah), 2023

Berdasarkan Tabel 4.10 mengenai hasil uji F dapat disimpulkan bahwa nilai Prob(F-stastistic) berada dibawah alpha (0,05) yang artinya memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

b. Hasil Uji F Setelah Moderasi

Tabel 4. 11
Hasil Signifikansi Simultan (Uji F) Setelah Moderasi

ANOVA[a]

Model		*Sum of Squares*	*Df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
1	Regression	303.773	7	43.396	51.213	.000[b]
	Residual	349.117	412	.847		
	Total	652.889	419			

Sumber: Data sekunder (diolah), 2023

Berdasarkan Tabel 4.11 mengenai hasil uji F dapat disimpulkan bahwa nilai Prob(F-stastistic) berada dibawah alpha (0,05) yang artinya memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat

3. **Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel bebas secara persial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji t yang telah dilakukan:

a. Hasil (Uji t) Sebelum Moderasi

Tabel 4. 12
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) Sebelum Moderasi

Variabel	B	Sig	Standar	Keterangan
Konstanta	18,887	0,000	< 0,05	Diterima
Koneksi Politik	0,662	0,000	< 0,05	Diterima
Dewan Komisaris Independen	0,916	0,013	< 0,05	Diterima
Profitabilitas	0,001	0,54	> 0,05	Ditolak
Risiko Peruahaan	0,007	0,65	> 0,05	Ditolak
Kompleksitas Perusahaan	0,357	0,001	< 0,05	Diterima
Jenis KAP	1,455	0,000	< 0,05	Diterima

Sumber: Data sekunder (diolah), 2023

Berikut adalah interpretasi dari hasil uji hipotesis dengan uji parsial atau uji t adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis dengan uji t dalam Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi variabel koneksi politik sebesar 0,000 < 0,05 hasil tersebut menunjukkan terdapat hubungan koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee*. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis pertama atau H1 yang diajukan peneliti.
2) Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis dengan uji t dalam Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi variabel Dewan Komisaris Independen sebesar 0,013 < 0,05 hasil tersebut menunjukkan terdapat hubungan dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee*. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis kedua atau H2 yang diajukan peneliti.

b. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) Setelah Moderasi

Tabel 4. 13
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) Setelah Moderasi

Variabel	B	Sig	Standar	Keterangan
Konstanta	18,961	0,000	< 0,05	Diterima

Koneksi Politik	0,496	0,153	> 0,05	Ditolak
Dewan Komisaris Independen	0,749	0,133	> 0,05	Ditolak
Koneksi Politik*Dewan Komisaris	0,364	0,498	> 0,05	Ditolak
Profitabilitas	0,001	0,055	> 0,05	Ditolak
Risiko Perusahaan	0.006	0,074	> 0,05	Ditolak
Kompleksitas Perusahaan	0.354	0,002	< 0,05	Diterima
Jenis KAP	1.460	0,000	< 0,05	Diterima

Sumber: Data sekunder (diolah), 2023

Berikut adalah interpretasi dari hasil uji hipotesis moderasi untuk menjawab hipotesis 3 dengan uji t sebagai berikut:

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis dengan uji t dalam Tabel 4.13 menunjukan bahwa nilai probabilitas signifikansi variabel moderasi sebesar 0,619 > 0,050 hasil tersebut menunjukkan tidak terdapat hubungan dewan komisaris dengan koneksi politik dan *audit fee*, maka tidak memoderasi. Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis ketiga atau H3.

4. Model Regresi Linear Berganda

a. Model Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dilihat dari nilai koefisien, dapat diperoleh persamaan model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$LnFee = 18,887 + 0,662Polcon + 0,916Bordland + 0,001ROA + 0,007DER + 0,357Komps + 1,455KAP + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan

1) Nilai konstanta model regresi sebesar 18,887 menunjukkan apabila nilai koneksi politik, dewan komisaris independen dan variabel kontrol tidak berarti apapun karena nilainya lebih dari 0.

2) Nilai koefisien koneksi politik adalah sebesar 0,662 menunjukkan hasil positif, hal ini menjelaskan bahwa adanya koneksi politik atau ketika variabel tersebut mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kenaikan *audit fee* sebesar 0,662 pada perusahaan.
3) Nilai koefisien dewan komisaris independen adalah sebesar 0,916 yang menunjukkan hasil positif, hal ini menjelaskan bahwa adanya dewan komisaris independen atau ketika variabel tersebut mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan *audit fee* sebesar 0,916 pada perusahaan.
4) Nilai koefisien profitabilitas adalah sebesar 0,001 yang menunjukkan hasil positif, hal ini menjelaskan bahwa adanya profitabilitas atau ketika variabel tersebut mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan *audit fee* sebesar 0,001 pada perusahaan.
5) Nilai koefisien risiko perusahaan adalah sebesar 0,007 yang menunjukkan hasil positif, hal ini menjelaskan bahwa adanya risiko perusahaan atau ketika variabel tersebut mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan *audit fee* sebesar 0,007 pada perusahaan.
6) Nilai koefisien kompleksitas perusahaan adalah sebesar 0,357 yang menunjukkan hasil positif, hal ini menjelaskan bahwa adanya kompleksitas perusahaan atau ketika variabel tersebut mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan *audit fee* sebesar 0,357 pada perusahaan.
7) Nilai koefisien jenis KAP adalah sebesar 1,455 yang menunjukkan hasil positif, hal ini menjelaskan bahwa adanya jenis KAP atau ketika variabel tersebut

mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan *audit fee* sebesar 1,455 pada perusahaan.

5. Model Moderated Regression Analysis (MRA)

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas dilihat dari nilai koefisien, dapat diperoleh persamaan model regresi linear sebagai berikut:

LnFee = 18,961 + 0,496Polcon + 0,001Bordland + 0,354Polcon*Bordland + 0,001ROA + 0,006DER + 0,354Komps + 1,460KAP + ε

Dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan

1) Nilai konstanta sebesar 18,896 artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak berarti apapun. Hal tersebut dikarenakan apabila variabel bebas bernilai lebih dari 0, maka konstanta tidak berarti apapun.
2) Nilai koefisien koneksi politik adalah sebesar 0,496 menunjukkan hasil positif, hal ini menjelaskan bahwa adanya koneksi politik atau ketika variabel tersebut, maka setiap peningkatan koneksi politik sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan nilai *audit fee* sebesar 0,496.
3) Nilai koefisien dewan komisaris independen adalah sebesar 0,749 yang menunjukkan hasil positif, hal ini menjelaskan bahwa adanya dewan komisaris independen atau ketika variabel tersebut mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan nilai *audit fee* sebesar 0,749 pada perusahaan.
4) Nilai koefisien moderasi dewan komisaris independen*koneksi politik adalah sebesar 0,364 yang menunjukkan hasil positif, hal ini menjelaskan bahwa adanya dewan komisaris independen atau ketika variabel tersebut mengalami

peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan nilai *audit fee* sebesar 0,364 pada perusahaan.

5) Nilai koefisien profitabilitas adalah sebesar 0,001 yang menunjukkan hasil positif, hal ini menjelaskan bahwa adanya profitabilitas atau ketika variabel tersebut mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan *audit fee* sebesar 0,001 pada perusahaan.
6) Nilai koefisien risiko perusahaan adalah sebesar 0,006 yang menunjukkan hasil positif, hal ini menjelaskan bahwa adanya risiko perusahaan atau ketika variabel tersebut mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan *audit fee* sebesar 0,006 pada perusahaan.
7) Nilai koefisien kompleksitas perusahaan adalah sebesar 0,354 yang menunjukkan hasil positif, hal ini menjelaskan bahwa adanya kompleksitas perusahaan atau ketika variabel tersebut mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan *audit fee* sebesar 0,354 pada perusahaan.
8) Nilai koefisien jenis KAP adalah sebesar 1,460 yang menunjukkan hasil positif, hal ini menjelaskan bahwa adanya jenis KAP atau ketika variabel tersebut mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan *audit fee* sebesar 1,460 pada perusahaan.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

4.3.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Audit Fee*

Hasil analisis regresi pada Tabel 4.12 memperlihatkan bahwasanya variabel koneksi politik memperoleh hasil signifikansi dengan nilai 0.000, nilai ini lebih kecil dari 0.05 yang memiliki arti bahwa koneksi politik berpengaruh positif yang terhadap *audit fee*. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima. Bahwasanya

perusahaan yang mempunyai hubungan koneksi politik terbukti membayar *audit fee* lebih mahal dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai hubungan koneksi politik.

Perusahaan yang mempunyai hubungan koneksi politik merupakan perusahaan yang memiliki risiko besar, sebab risiko yang dibebankan oleh auditor tinggi memiliki dampak pada *audit fee* yang harus dibayar sesuai dengan risiko yang nanti akan diterima (Yuniarti & Riswandi, 2021). Dalam penelitian Ariningrum & Diyanty, (2017) digambarkan bahwa entitas atau perusahaan yang memiliki koneksi politik ialah perusahaan yang menggunakan berbagai cara dari apa yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak mengenai akses yang kedepannya akan mempermudah perusahaan dan dapat memberikan fasilitas yang menguntungkan perusahaan seperti fasilitas pemerintah.

Apabila perusahaan memperoleh fasilitas pemerintah dari hubungan koneksi politik yang ada dapat digunakan untuk mendapatkan pinjaman yang nantinya dapat digunakan untuk mempermudah likuiditas perusahaan dalam mengatasi apabila perusahaan mendapatkan masalah keuangan. Namun, perusahaan yang memiliki koneksi politik diindikasikan memiliki risiko bayar yang tinggi sehingga dapat menyebabkan gagal bayar perusahaan yang semakin besar dan dapat menyebabkan risiko audit menjadi semakin tinggi sehingga meningkatkan *audit fee.*

Teori agensi dapat menerangkan hubungan perusahaan yang terkoneksi politik melalui keberadaan jumlah persentase dewan direksi serta dewan komisarisnya, hal tersebut dikarenakan dengan adanya konflik yang terjadi antara manajemen dengan para pemegang saham dapat menimbulkan memperkerjakan

audit eksternal untuk memberikan jaminan independen terkait laporan yang disusun oleh manajemen perusahaan (Yuniarti & Riswandi, 2021).

Hal ini didukung dari data perusahaan yang terkoneksi politik, dimana perusahaan yang mempunyai pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) merupakan pejabat pemerintah pusat seperti , menteri dan seseorang yang pernah menduduki jabatan penting di kementerian serta seseorang yang memiliki kedekatan erat dengan politikus atau partai politik maka akan memakai jasa audit KAP *big four* sehingga *audit fee* yang diberikan perusahaan juga semakin mahal (Tat & Murdiawati, 2020).

Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan menutupi proses kontribusi koneksi politik sehingga mengakibatkan rendahnya transparansi dalam laporan keuangan, transparansi laporan keuangan yang rendah akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang buruk dan menyebabkan risiko salah saji material (Nurjanah & Sudaryati, 2019).

Tingginya *audit fee* dipengaruhi adanya upaya yang besar bagi seorang auditor karena adanya risiko yang melekat pada perusahaan akibat adanya koneksi politik (Ariningrum & Diyanty, 2017). Pada riset ini menyimpulkan seorang auditor akan memberikan beban *audit fee* yang lebih mahal bagi perusahaan yang memiliki hubungan koneksi politik.

Hasil penelitian ini mendukung dengan teori harga audit yang menyebutkan bahwa seorang auditor akan menentukan *audit fee* pada perusahaan dengan memperhatikan ada tidaknya risiko yang dimiliki perusahaan (Chandrarin & Parawiyati, 2021). Hasil penelitian ini memiliki hasil konsisten dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti & Riswandi (2021), Wea (2019), Nurjanah (2019), dan Tee (2018).

4.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Audit Fee*

Hasil analisis regresi pada Tabel 4.13 memperlihatkan bahwasanya variabel koneksi politik memiliki hasil signifikansi dengan nilai 0.013, nilai ini lebih kecil dari 0.05 yang berarti bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima. Dikarenakan adanya dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan akan meningkatkan *audit fee*.

Hal ini sejalan dengan teori agensi dimana dewan komisaris independen mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kapasitas manajemen perusahaan dengan tujuan meminimalkan asimetri informasi antara investor dan manajemen perusahaan melalui *good corporate governance* yang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin mahal *audit fee* dipengaruhi oleh semakin tingginya tingkat independensi dewan komisaris karena dewan komisaris independen akan menuntut kualitas audit yang tinggi (Sitompul, 2019).

Keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk membuat iklim yang lebih objektif, independen, menjaga keterbukaan informasi serta mampu menghasilkan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas (Anandita & Wiliasti, 2020).

Dewan komisaris independen memiliki kepentingan untuk melakukan pengawas dari perusahaan yang dapat mempertahankan reputasi dan citranya

dengan menginginkan kualitas audit yang baik. Dewan komisaris independen akan memilih jasa KAP *big four* yang akan menghasilkan audit laporan keuangan yang berkualitas, sehingga *audit fee* yang dibebankan perusahaan lebih mahal (Nurjanah & Amrozi, 2021).

Semakin kuatnya dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan yang menjadikan salah satu struktur *governance* yang baik sehingga, cenderung menuntut akuntan publik untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi, agar dapat meningkatkan penilaian perusahaan di hadapan para pemegang saham, yang menyimpulkan bahwa dengan semakin besarnya proporsi komisaris independen, maka dewan komisaris indepeden memiliki pengaruh terhadap semakin tingginya *audit fee* (Sukaniasih, 2016).

Semakin banyak dewan komisaris independen akan menuntut kualitas dan jaminan audit yang tinggi dari Kantor Akuntan Publik. Kualitas dan jaminan audit yang besar mengindikasikan pemantauan yang teratur serta sistem pelaporan audit yang komprehensif dan bebas dari kesalahan penyajian laporan keuangan. Hal tersebut menyebabkan *audit fee* yang harus dibayar semakin tinggi (Hendi, 2022).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Paramitha (2022) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen sebagai salah satu wakil dari pemegang saham, yang mempunyai kemampuan yang kuat untuk mencegah dan mendeteksi perilaku kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam pelaporan keuangan. Sehingga guna menghindari hal tersebut dewan komisaris independen harus memastikan reliabilitas laporan keuangan dan diharapkan agar dewan komisaris independen memilih KAP yang berkualitas hal ini akan meningkatkan *audit fee*.

Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hafiza (2015) Sitompul (2019), Anandita & Wiliasti (2020), dan Nurjanah & Imam Amrozi (2021) menyatakan bawah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *audit fee*, hal ini karena seorang dewan komisaris independen akan menggunakan KAP yang berkualitas untuk meningkatkan citra perusahaan, sehingga *audit fee* yang dibebankan perusahaan juga tinggi.

4.3.3 Peran Koneksi Politik terhadap *Audit Fee* dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Hasil analisis regresi moderasi pada Tabel 4.13 memperlihatkan bahwasanya variabel dewan komisaris independen tidak memoderasi koneksi politik karena memiliki hasil signifikansi dengan nilai 0,619, nilai ini lebih besar dari 0.05 yang berarti bahwa dewan komisaris independen tidak memoderasi koneksi politik terhadap *audit fee*. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak. Dikarenakan pada praktiknya, keberadaan dewan komisaris independen terbatas pada pemberian nasihat dan pengawasan terhadap dewan direksi (Chandrarin & Parawiyati, 2021).

Berdasarkan data hasil pengamatan pada penelitian ini menunjukan justru mayoritas dewan komisaris independenlah yang memiliki koneksi politik atau sebesar 97% dari total 100% sampel. Sementara 3% lainnya yang mempunyai koneksi politik adalah dewan direksi dan dewan komisaris. Hal ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan dewan komisaris independen akan melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengawasan terhadap manajemen, terkait informasi yang terkandung pada pelaporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Sehingga kondisi ini bertolak belakang dengan asimetri informasi (Iftikha & Nazar, 2021).

Dewan komisaris independen bukan berarti independen dan objektif, dewan komisaris independen juga dapat melakukan manipulasi terkait transparansi laporan keuangan (Chandrarin & Parawiyati, 2021). Manajemen sebagai agen akan memakai otoritas yang dimiliki (*discretionary power*) untuk dapat memaksimalkan kepentingannya (*self interest*) (Widiasari & Prabowo, 2008). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan adanya keberadaan dewan komisaris independen ternyata tidak dapat menurunkan risiko *inherent* (Chandrarin & Parawiyati, 2021).

Dengan minimnya peraturan Kep-305/BEJ/07- 2004 terkait syarat pemilihan dewan komisaris independen yaitu: dewan komisaris independen yang dimaksud adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik; tidak mempunyai saham baik langsung amupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik; tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik (Peraturan Bapepam IX.I.5).

Sehingga perusahaan memanfaatkan adanya celah untuk memilih dewan komisaris independen yang terkoneksi politik karena dewan komisaris independen yang memiliki background politik, digunakan oleh perusahaan dalam menyelesaikan masalah politik yang berhubungan dengan perusahaan, dan bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan (Kristanto *et al.*, 2019)

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari komisaris perseroan

ternyata tidak dapat memperlemah risiko koneksi politik pada perusahaan, dikarenakan pengangkatan dewan komisaris independen hanya untuk memenuhi regulasi perusahaan (Renzy *et al*., 2022). Berdasarkan peraturan Peraturan Otoritas Jasa Kauangan No.33/POJK.04/2014 dewan komisaris paling kurang terdiri 2 (dua) orang, 1 (satu) di antaranya adalah dewan komisaris indipenden, maka jumlah dewan komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah anggota dewan komisaris (Liyanto & Anan, 2019). Sehingga adanya dewan komisaris independen hanya digunakan untuk menjalankan kewajiban dan mematuhi regulasi yang ada pada perusahaan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandrarin & Parawiyati (2021) dewan komisaris independen perannya hanya sebatas memantau operasi perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak tidak independen, sehingga tidak dapat mengurangi penaksiran risiko oleh auditor sehingga tidak dapat mengurangi *audit fee*. Pada data riset hal ini tidak mendukung teori Beasly (1996) yang menyatakan bahwa dewan komisaris yang independen akan memperoleh pengawasan yang efektif terhadap proses pelaporan keuangan sehingga dapat menurunkan timbulnya masalah dalam proses pelaporan keuangan dan mengarahkan auditor untuk mengurangi *audit fee*.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2019) dan (Harymawan *et al*., 2020) yang mendefinisikan bahwa dewan komisaris independen dapat memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap *audit fee*.

4.3.4 Profitabilitas Perusahaan

Hasil analisis regresi moderasi pada Tabel 4.13 memperlihatkan bahwasanya profitabilitas memiliki hasil signifikansi dengan nilai 0.055, nilai ini lebih besar dari 0.05 yang berarti bahwa profitabilitas memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap *audit fee*. Hal ini menunjukan bahwa tingkat keuntungan perusahaan yang tinggi tidak akan mempengaruhi dari besaran *audit fee*, karena perusahaan yang memiliki laba tinggi tidak memerlukan pengujian validitas dan pengakuan pendapatan dan biaya (Iftikha & Nazar, 2021).

Hal ini tidak mendukung teori agensi dimana profitabilitas tidak dapat mempengaruhi *agency cost* karena dalam praktiknya pembentukan *audit fee* adalah kesepakatan antara auditor dengan perusahaan. Sehingga profitabilitas yang digunakan untuk mengukur laba tersebut dalam menentukan besaran *audit fee* dilihat oleh auditor berdasarkan laba dari laporan laba rugi yang diperoleh dari laporan keuangan yang belum diaudit (Hasan, 2017).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan & Fatahurrazak (2013) yang mengatakan pada dasarnya besar kecilnya *audit fee* tidak dilandaskan pada tingkat keuntungan yang tinggi, hal ini disebabkan karena perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi tidak memerlukan pengujian validitas dan pengakuan pendapatan dan biaya, oleh karena itu auditor tidak akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan auditnya. Sehingga tidak menyebabkan peningkatan terhadap *audit fee*.

4.3.5 Risiko Perusahaan terhadap *Audit Fee*

Hasil analisis regresi moderasi pada Tabel 4.13 memperlihatkan bahwasanya

risiko perusahaan memiliki hasil signifikansi dengan nilai 0.074, nilai ini lebih besar dari 0.05 yang berarti bahwa risiko perusahaan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap *audit fee.* Sehingga dapat disimpulkan besar kecilnya risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit fee*.

Hal ini dikarenakan semakin besarnya risiko perusahaan belum tentu mempengaruhi *audit fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kreditur (Fisabilillah *et al*., 2020). Tanggung jawab dan proses audit tidak dilandaskan adanya risiko sehingga tidak mempengaruhi waktu dan usaha auditor maka risiko perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penentuan *audit fee* (Fajarini, 2021).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti *et al*, (2019) terkait tidak berpengaruhnya risiko perusahaan terhadap *audit fee* adalah walaupun risiko perusahaan yang dimiliki perusahaan bernilai tinggi, namun risiko perusahaan yang tinggi merupakan bagian dari bisnis perusahaan yang sudah disesuaikan dengan kemampuan bersaing perusahaan.

Dengan demikian, perusahaan yang berisiko belum tentu akan meningkatkan *audit fee*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulaiman *et al*, (2020) dan Fisabilillah *et al*, (2020). Hasil penelitian membuktikan sebuah perusahaan yang memiliki risiko tinggi tidak akan mempengaruhi usaha dan waktu auditor dalam menjalankan tanggung jawabnya dan maka akan memilih auditor yang bukan *big four* sehingga risiko perusahaan yang tinggi tidak berpengaruh terhadap mahalnya *audit fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan.

4.3.6 Kompleksitas Perusahaan terhadap *Audit Fee*

Hasil analisis regresi moderasi pada Tabel 4.13 memperlihatkan bahwasanya kompleksitas perusahaan memiliki hasil signifikansi dengan nilai 0.002, nilai ini lebih besar dari 0.05 yang berarti bahwa kompleksitas perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*. penelitian ini membuktikan bahwa semakin kompleksitas perusahaan atau semakin banyaknya anak perusahaan yang dimiliki baik diluar negeri maupun di dalam negeri dapat membuat *audit fee* yang diberikan kepada auditor eksternal atas jasa audit laporan keuangan perusahaan semakin mahal.

Penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang didefinisikan *agency cost* perusahaan dipengaruhi semakin kompleksitas tidaknya suatu perusahaan, *cost* tersebut dapat dipengaruhi adanya banyaknya anak perusahaan yang dimiliki, dan KAP harus mendapatkan bukti audit pemeriksaan pada anak perusahaan lebih banyak (Fajarini, 2021).

Perusahaan yang jumlah anak perusahaan banyak serta masing-masing anak perusahaannya tersebut terdiversifikasi baik produk maupun lokasi anak perusahaannya menyebabkan semakin tingginya tingkat kompleksitas transaksi perusahaan (Paramitha, 2022). Semakin tingginya tingkat kompleksitas transaksi perusahaan menyebabkan kompleksitas audit juga meningkat hal ini menyebabkan *audit fee* perusahaan meningkat (Yulianti, 2019).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rukmana *et al*., (2017), dan Paramitha (2022) Maka dapat disimpulkan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

4.3.7 Jenis KAP terhadap *Audit Fee*

Hasil analisis regresi moderasi pada Tabel 4.13 memperlihatkan bahwasanya jenis KAP memiliki hasil signifikansi dengan nilai 0.000, nilai ini lebih besar dari 0.05 yang berarti bahwa jenis KAP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*. Hasil ini menyimpulkan terkait penggunaan jenis KAP dalam perusahaan. Perusahaan yang menunjuk KAP *big four* terbukti mengeluarkan *audit fee* yang lebih mahal dibandingkan dengan perusahaan menunjuk KAP selain *big four* (Yulianti, 2019).

Sejalan dengan teori agensi yang dijadikan dasar bahwa klien lebih percaya pada data yang diaudit oleh KAP *big four* karena KAP *big four* memberikan jaminan secara konsisten, sehingga perusahaan akan membayarkan *audit fee* yang lebih mahal jika perusahaan menunjuk KAP *big four* karena dianggap memiliki reputasi dan kualitas yang baik (Adelina & Rachmawati, 2018).

KAP *Big four* dianggap memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan KAP Non *Big four,* karena KAP *Big four* akan berusaha dalam menjaga citra baik mereka. Jadi jika semakin tinggi tingkat kualitas audit atau kinerja audit maka menghasilkan laporan audit yang baik, sehingga dapat menaikan *audit fee* yang dibebankan pada perusahaan (Hasan, 2017).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Astuti & Sibuea, 2022) dan (Yulianti, 2019) yang menemukan bahwa jenis KAP berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

BAB V
PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui besaran pengaruh variabel terikat *audit fee*, dua variabel bebas, yaitu koneksi politik dan dewan komisaris independen, variabel moderasi yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, dan variabel kontrol yang yaitu: ukuran perusahaan, profitabilitas, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, serta jenis KAP dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Semakin besar koneksi politik akan meningkatkan besaran *audit fee*, sehingga koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee* dikarenakan suatu perusahaan yang terkoneksi politik dianggap mempunyai risiko besar akan kegagalan seperti risiko *inhern*, maka perusahaan berhubungan dengan koneksi politik akan memilih auditor *big four* guna untuk mengurangi konflik agensi yang terjadi. Penggunakan jasa auditor *big four* dapat menaikan *audit fee.*
2. Peran dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *audit fee* artinya dewan komisaris independen berkepentingan untuk menjalankan pengawas perusahaan, maka agar dapat mempertahankan reputasi dengan menginginkan kualitas auditor yang baik, sehingga dewan komisaris independen cenderung menunjuk auditor *big four* dalam mengaudit laporan keuangan yang akan menghasilkan audit berkualitas, hal ini dapat membuat perusahaan akan mengakibatkan naiknya *audit fee*.
3. Peran dewan komisaris independen tidak memoderasi koneksi politik dan

menurunkan hubungan koneksi politik dengan *audit fee*, hal ini menunjukan bahwa keberadaan dewan komisaris independen hanya sebatas kewajiban memenuhi regulasi perusahaan yaitu proporsi dewan komisaris independen sejumlah 30% dari total dewan komisaris atau sekurang-kurangnya 1 dalam sebuah perusahaan. Pada praktiknya, keberadaan dewan komisaris independen terbatas pada pemberian nasihat dan pengawasan terhadap dewan direksi. Pada data riset menunjukkan dewan komisaris independen merupakan yang terkoneksi politik sehingga tidak menurunkan penaksiran risiko akibat adanya koneksi politik dengan *audit fee*. Terkait minimnya peraturan Kep-305/BEJ/07-2004 terkait syarat pemilihan dewan komisaris independen, sehingga perusahaan memanfaatkan adanya celah untuk memilih dewan komisaris independen yang terkoneksi politik, yang digunakan oleh perusahaan dalam menyelesaikan masalah politik yang berhubungan dengan perusahaan, dan bisa memberikan keuntungan bagi perusaha

4. Variabel kontrol profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *audit fee* dikarenakan bahwa tingkat keuntungan perusahaan yang tinggi tidak menunjukkan pengaruh terkait besaran *audit fee*, sebab perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tidak membutuhkan pengujian terkait validitas dan pengakuan laporan keuangan terkait pendapatan dan biaya.
5. Variabel kontrol risiko perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit fee* dikarenakan besar kecilnya risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Hal ini menunjukan risiko perusahaan tidak memiliki hubungan dengan kenaikan *audit fee*, sehingga hal tidak berpengaruh terkait waktu dan usaha

auditor dalam menjalankan tanggung jawabnya dan perusahaan yang memiliki risiko tinggi cenderung akan menunjuk KAP non *big four.*

6. Variabel kontrol kompleksitas perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee*. Dikarenakan banyak jumlah anak perusahaan akan mempengaruhi kompleksitas audit sehingga auditor membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan serta memperoleh bukti audit sehingga dapat menaikan *audit fee*.
7. Variabel kontrol jenis KAP memiliki pengaruh positif terhadap *audit fee* dikarenakan perusahaan yang menggunakan jasa audit KAP yang termasuk ke dalam *big four* akan membayarkan *audit fee* yang lebih mahal dibandingkan dengan jasa audit KAP selain *big four*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengungkapan jasa profesional yang terdiri dari biaya jasa profesi penunjang pasar modal, biaya notaris, biaya *audit fee*. Dimana peneliti hanya fokus pada biaya *audit fee*, sedangkan terkait besaran *audit fee* yang dimiliki perusahaan bersifat *voluntary* yang mengakibatkan banyak perusahaan tidak memenuhi kriteria sampel. Kemudian tidak semua perusahaan yang terdaftar di BEI menampilkan *annual report* beserta *financial statement* hal ini mengakibatkan beberapa data perusahaan yang tidak dapat dipergunakan dalam penelitian sehingga banyak perusahaan yang tidak lolos kriteria sampel.

5.3 Saran

Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan untuk menguji variabel lain misalnya memakai komite audit, sekretaris perusahaan, dan satuan pengawas perusahaan

dipergunakan sebagai proksi dalam menambahkan *Good Corporate Governance* yang diduga dapat memoderasi hubungan koneksi politik dengan *audit fee*. Pada penelitian ini menunjukkan hasil variabel dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh hubungan koneksi politik terhadap *audit fee*, maka peneliti berharap dengan menggunakan variabel lain dapat memberikan hasil yang berbeda. Sebab adanya berbagai keuntungan yang ditawarkan kepada perusahaan yang terkoneksi politik.

Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan bobot setiap jenis koneksi politik dan mengukur koneksi politik menggunakan ordinal seperti total orang yang memiliki koneksi politik di perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggali informasi-informasi yang lebih mendalam mengenai perusahaan yang mengungkapkan cakupan untuk koneksi politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Adelina, E., & Rachmawati, S. (2018). *Besaran fee audit pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia*. *18*(1), 19–34.

Afdhalastin, A. D., & Yuyetta, E. N. A. (2021). Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi, Kompleksitas, Profitabilitas, Dan Risiko Perusahaan Terhadap Auditfee. *Jurnal Of Accounting*, *Vol.10*(4), 1–15. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/32983/26348

Agus Widarjono. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Paduan Eviews*. andi supangat.

Anandita, A., & Wiliasti, A. (2020). Pengaruh Independensi Dewan Komisaris , Komite Audit , Dan Internal Audit Terhadap Fee Audit Eksternal. *Jurnal Manajemen, Ilmu Ekonomi Kreatif Dan Bisnis*, *9*(September), 92–97. http://ekomaks.unmermadiun.ac.id/inde

Annissa Mutia. (2021). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 pada 2021*. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021

Ariningrum, I., & Diyanty, V. (2017). The impact of political connections and the effectiveness of board of commissioner and audit committees on audit fees. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, *11*(4), 53–70. https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.5

Arum Ardianingsih, J. S. L. (2021). Determinan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Imbalan Jasa Auditor Eksternal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *8*(September), 56. www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi

Astuti, S., & Putri Enjel Artauli Sibuea. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kompleksitas Perusahaan, Risiko Perusahaan, Dan Ukuran Kap Terhadap Audit Fee. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, *2*(1), 105–114. https://doi.org/10.33005/senapan.v2i1.184

Betsyeba Anggriani dan Mila Susanti Email: (2020). *Pengaruh Kompleksitas Audit Dan Risiko Keuangan Terhadap Audit Fee Perusahaan Perbankan Di Bei 2019 – 2020*. 89–101.

Chandrarin, F. S., & Parawiyati, G. (2021). Koneksi Politik Corporate Governance dan Biaya Audit di Indonesia. *AFRE Accounting and Financial Review*, *4*(1), 155–164. http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/afr

Collis, J., & Hussey, R. (2021). Business Research: A practical guide for students (5th Ed.). In *Red Globe Press*.

Cristansy, J., & Ardiati, A. Y. (2018). Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP Terhadap Fee Audit pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, *30*(2), 198–211.

Dielman, Terry,E. 1961. Applied Regression Analysis for BIsnis and Ekonomis. PWS-KENT Publishing Company.

Fajarini, A. (2021). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial , Kompleksitas , Ukuran Perusahaan , Reputasi Auditor dan Risiko Perusahaan Terhadap Fee Audit Eksternal (Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2016-2020)*. 455–466.

Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownerhsip and control. Journal of Law and Economics, 26 No. 2(2), 301–325

Fauzi, F., Dencik, A. B., & Asiati, D. I. (2019). *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*. Salemba Empat.

Fisabilillah, P. D., Fahria, R., & Praptiningsih, P. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Risiko Perusahaan, dan Profitabilitas Klien Terhadap Audit Fee. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *8*(3), 361–372. https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.388

Ghozali, A. R. S. I. (2017). Manajemen Laba Terhadap Audit Fee. *Diponegoro Journal of Accounting*, *6*(3), 1–8.

Gujarati, Damodar N, (2004). Basic Econometrics, Fourth edition, Singapore. McGraw-Hill Inc.

Hafiza. (2017). Pengaruh Kompleksitas Audit, Profitabilitas Klien, Ukuran Perusahaan, Independensi Dewan Komisaris Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Fee. *JOM Fekon*, *4*(1).

Harijanto, Gabriella Stephanie, S. (2022). *Pengaruh Dewan Terkoneksi Politik Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia*. *11*(2).

Hartono, P. D. J. (2017). *Metologi Penelitian Bisnis*. BPFE-YOGYAKARTA.

Harymawan, I., Lam, B., Nasih, M., & Rumayya, R. (2019). Political connections and stock price crash risk: Empirical evidence from the fall of Suharto. International Journal of Financial Studies. *Political Connections and Stock Price Crash Risk: Empirical Evidence from the Fall of Suharto. International Journal of Financial Studies.*

Harymawan, I., Putra, F. K. G., Ekasari, W. F., & Sucahyati, D. (2020). Are independent commissioners able to mitigate higher audit fees in politically connected firms? Evidence from Indonesia. *International Journal of*

Innovation, Creativity and Change, *11*(8), 24–43.

Hasan, M. A. (2017). Pengaruh Kompleksitas Audit, Profitabilitas Klien, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Audit Fee. *Pekbis Jurnal*, *9*(3), 214–230.

Hendi, S. (2022). *Karakteristik Dewan Direksi, Komite Audit, dan Biaya Audit*. 3318–3335.

Iftikha, M. N., & Nazar, M. R. (2021). Pengaruh Independensi Dewan Komisaris, Rapat Komite Audit dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Fee Audit. *E-Proceeding of Management*, *8*(December), 8261–8269.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2016). Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan (pp. 1–18).

Indonesia Corruption Watch. (2021). *Peraturan Menteri BUMN*. https://jdih.bumn.go.id/permenbumn

Karjono, A. (2019). Pengaruh Cash Ratio, Net Profit Margin, Debt to Equity Ratio, dan Firm Size terhadap Kebijkan Dividen. *Jurnal Manajemen Bisnis*, *22*(3), 270–288.

Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004, Peraturan No. IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komita Audit, Jakarta

Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004, Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Jakarta

KNKG. (2006). Pedoman UmumGood Corporate Governance di Indonesia. Republik Indonesia

Khan, A., Mihret, D. G., & Muttakin, M. B. (2016). Corporate political connections, agency costs and audit quality. *International Journal of Accounting and Information Management*, *24*(4), 357–374. https://doi.org/10.1108/IJAIM-05-%0A2016-0061

Kristanto, A. T., Ekonomi, F., & Dharma, U. S. (2019). Pengaruh Political Connections. *EXERO Journal of Research in Business and Economics*, *02*(01), 1–21.

Merina Ditya Paramitha, E. J. S. (2022). Pengaruh dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan kompleksitas perusahaan terhadap. *Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, *3*(1), 13–23.

M. C. Jensen dan W. H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” Journal of Financial Economics, pp.

305-360, 1976

Mulyadi. (2012). *Auditing*. Salemba Empat.

Nova Yulianti, Henri Agustin, S. T. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas audit, risiko perusahaan, dan ukuran kap terhadap fe e audit (. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(1), 217–235.

Novianto, R. (2022). *korupsi BUMN*. KBR Nasional. https://kbr.id/nasional/09-2022/korupsi-bumn-mahfud-md-masih-banyak/109576.html

Nurjanah, F., & Imam Amrozi, A. (2021). Effektivitas Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Biaya Audit. *E-Jurnal Akuntansi*, *31*(3), 667. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i03.p11

Nurjanah, F., & Sudaryati, E. (2019). The effect of political connection and effectiveness of audit committee on audit fee. *The Indonesian Accounting Review*, *9*(2), 227. https://doi.org/10.14414/tiar.v9i2.1848

Oksaviani, N. A., & Laksito, H. (2021). Pegaruh Rotasi Kantor Akuntan Publik dan Pengendalian Internal Terhadap Fee Audit Di Indonesia dan Malaysia (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia Tahun 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, *10*(4), 1–14.

Pandia, D. B., & Fachriyah, N. (2021). Faktor–Faktor Penentu Tarif Biaya Audit Eksternal Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia(Studi terhadap Perusahaan Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, *9*(2), 2016–2019.

Primayogha, E., & Aulia, Y. (2022). Tren Penindakan Kasus Korupsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2016-2021. In *Indonesia Corruption Watch*.

Putra Naibaho, D., Melisa, Fransiska, L., & Nauli Sinaga, A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Kap, Komite Audit, Resiko Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Audit. *Journal of Costing*, *5*(1), 343–350.

Renzy Octa Riwantia, Meutia Dewi, I. A. (2022). Kompleksitas Perusahaan Dan Konvergensi Ifrs Terhadap Fee Audit Pada Perusahaan Property and Real Estate. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, *3*(April). https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jmas/article/view/5725%0Ahttps://www.ejurnalunsam.id/index.php/jmas/article/download/5725/3451

Rifki Adji Sastradipraja, dkk. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Risiko Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran KAP Terhadap Fee Audit (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). *E-Proceeding of Management*, *8*(5), 5513–5521.

Riswandi, P., Yuniarti, R., & Hayadi, B. H. (2021). Hubungan Politik Dan Keragaman Gender Terhadap Biaya Audit Pedi. *Jurnal Pendidikan Komputer Dan Matematika Turki*, *12*(4), 609–614.

Rizaldy, S., Rahayu, S., & Tiswiyanti, W. (2022). Pengaruh Audit Tenure, Reputasi Auditor, Komite Audit dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks KOMPAS100 Pada BEI Tahun 2012-2016). *Paradigma Ekonomika*, *17*(1), 199–212.

Sanisah Huri, E. S. (2019). Pengaruh jenis industri, ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan dan profitabilitas klien terhadap audit fee. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(3), 1096–1110.

Sibuea, K. (2019). *Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, dan Risiko Perusahaan Terhadap Audit Fee*.

Sitompul, F. (2019). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Audit Fee Eksternal. *Ikraith-Ekonomika*, *2*(1), 67–76.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D.* alfabeta.

Sukaniasih, N. K. (2016). Pengaruh Koneksi Politik Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Biaya Audit. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2161–2187.

Surya, S., Simanjuntak, D., Jatmiko, T., & Prabowo, W. (2021). Pengaruh Koneksi Politik Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Biaya Audit. *Diponegoro Journal of Accounting*, *10*(2019), 1–8.

Sutanto, E., & Listiani, L. (2021). Pengaruh Fungsi Audit Internal dan Dewan Komisaris Terhadap Fee Auditor Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bersa Efek Indonesia. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, *9*(2), 125–136.

Syahban, L. (2021). *Isu Reshuffle Kabinet Menguat*. DetikNews. http://news.detik.com/berita/d-5845811/isu-reshuffle-kabinet-menguat-cek-kabar-terbarunya-di-sini/2

Taqi, M., Rahmawati, R., Bandi, B., Murni, S., &, & Warsina, W. (2020). Audit Quality Attibutes and Client Factors. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, *3*(1), 1–13. https://doi.org/%0A10.26905/afr.v3i1.3884

Tat, R. N. E., & Murdiawati, D. (2020). Faktor-faktor Penentu Tarif Biaya Audit Eksternal (Audit Fee) pada Perusahaan Non-Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(1), 177. https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.24543

Wea, A. N. S. (2019). Political connection, CEO gender, internal audit, corporate complexity and audit fee in go public companies in Indonesia. *Research*

Journal of Finance and Accounting, *10*(12), 10–18. https://doi.org/%0A10.7176/RJFA/10-12-02

Widiasari, E., & Prabowo, T. J. W. (2008). Pengaruh Pengendalian Internal Perusahaan Dan Struktur Corporate Governance Terhadap Fee Audit. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, *9*(2), 125–137.

Wulandari, L. (2018). pengaruh Political Connection Pada Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, *7*(1), 1196–1226.

Wulandari, S., & Nurmala, P. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Rapat Komite Audit, Dan Ukuran Komite Audit Terhadap Biaya Audit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, *7*(2), 106. https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i2.2718

Yulinar, H. (2017). Berapa Besar Biaya Audit ? Ditinjau Dari Koneksi Politik Dan Tata Kelola. *Global Financial Accounting Jurnal*, *I*(1), 117–129.

Yuniarti, R., & Riswandi, P. (2021). Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Gender Diversity Terhadap Fee Audit. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, *14*(1), 133–142.

Yusica, M., & Sulistyowati, W. A. (2020). Penentuan Audit Fee Ditinjau Dari Kompleksitas Perusahaan, Internal Audit Dan Risiko Audit. *Jurnal Akademi Akuntansi*, *3*(1), 69. https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11826

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

No	Bulan	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	x																							
2	Konsultasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3	Revisi		x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
4	Acc Proposal						x																		
5	Seminar Proposal									x															
6	Pengumpulan Data										x	x	x	x	x	x	x								
7	Analisis Data																x	x							
8	Penulisan Akhir Naskah																	x	x	x	x				
9	Pendaftaran Munaqasah																				x				
10	Munaqosah																					x			
11	Revisi Skripsi																					x	x		

Lampiran 2 :Daftar Sampel Penelitian

NO	KODE	PERUSAHAAN
1	ABDA	Asuransi Bina Dana Arta Tbk.
2	ABMM	ABM Investama Tbk.
3	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.
4	ADES	Akasha Wira International Tbk.
5	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.
6	ADMF	Adira Dinamika Multi Finance Tbk.
7	ADMG	Polychem Indonesia Tbk
8	AGII	Aneka Gas Industri Tbk.
9	AISA	FKS Food Sejahtera Tbk.
10	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
11	ALDO	Alkindo Naratama Tbk.
12	ALKA	Alakasa Industrindo Tbk
13	AMAG	Asuransi Multi Artha Guna Tbk.
14	AMAR	Bank Amar Indonesia Tbk.
15	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk.
16	ANJT	Austindo Nusantara Jaya Tbk.
17	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
18	APEX	Apexindo Pratama Duta Tbk.
19	APIC	Pacific Strategic Financial Tb
20	ARGO	Argo Pantes Tbk
21	ARNA	Arwana Citramulia Tbk.
22	ARTA	Arthavest Tbk
23	ARTO	Bank Jago Tbk.
24	ASBI	Asuransi Bintang Tbk.
25	ASDM	Asuransi Dayin Mitra Tbk.
26	ASGR	Astra Graphia Tbk.
27	ASII	Astra International Tbk.
28	ASJT	Asuransi Jasa Tania Tbk.
29	ASPI	Andalan Sakti Primaindo Tbk.
30	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.
31	ASRM	Asuransi Ramayana Tbk.
32	ASSA	Adi Sarana Armada Tbk.
33	ATIC	Anabatic Technologies Tbk.
34	AUTO	Astra Otoparts Tbk.
35	BAPA	Bekasi Asri Pemula Tbk.
36	BBCA	Bank Central Asia Tbk.
37	BBKP	Bank KB Bukopin Tbk.
38	BBLD	Buana Finance Tbk.
39	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero
40	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero

NO	KODE	PERUSAHAAN
41	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero)
42	BBYB	Bank Neo Commerce Tbk.
43	BCAP	MNC Kapital Indonesia Tbk.
44	BCIC	Bank JTrust Indonesia Tbk.
45	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.
46	BEEF	Estika Tata Tiara Tbk.
47	BEKS	Bank Pembangunan Daerah Banten
48	BELL	Trisula Textile Industries Tbk
49	BFIN	BFI Finance Indonesia Tbk.
50	BHAT	Bhakti Multi Artha Tbk.
51	BHIT	MNC Asia Holding Tbk.
52	BINA	Bank Ina Perdana Tbk.
53	BISI	BISI International Tbk.
54	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa B
55	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa T
56	BKSW	Bank QNB Indonesia Tbk.
57	BLTZ	Graha Layar Prima Tbk.
58	BMAS	Bank Maspion Indonesia Tbk.
59	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.
60	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk.
61	BNBR	Bakrie & Brothers Tbk
62	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.
63	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk.
64	BNLI	Bank Permata Tbk.
65	BOGA	Bintang Oto Global Tbk.
66	BOLA	Bali Bintang Sejahtera Tbk.
67	BOLT	Garuda Metalindo Tbk.
68	BPTR	Batavia Prosperindo Trans Tbk.
69	BRAM	Indo Kordsa Tbk.
70	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk.
71	BRMS	Bumi Resources Minerals Tbk.
72	BRNA	Berlina Tbk.
73	BRPT	Barito Pacific Tbk.
74	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.
75	BSIM	Bank Sinarmas Tbk.
76	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
77	BSWD	Bank Of India Indonesia Tbk.
78	BTPN	Bank BTPN Tbk.
79	BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk.
80	BUKA	Bukalapak.com Tbk.
81	BUMI	Bumi Resources Tbk.
82	BVIC	Bank Victoria International Tbk
83	BWPT	Eagle High Plantations Tbk.

NO	KODE	PERUSAHAAN
84	BYAN	Bayan Resources Tbk.
85	CAKK	Cahayaputra Asa Keramik Tbk.
86	CARE	Metro Healthcare Indonesia Tbk
87	CARS	Industri dan Perdagangan Bintr
88	CASA	Capital Financial Indonesia Tb
89	CASH	Cashlez Worldwide Indonesia Tb
90	CASS	Cardig Aero Services Tbk.
91	CBMF	Cahaya Bintang Medan Tbk.
92	CCSI	Communication Cable Systems In
93	CENT	Centratama Telekomunikasi Indo
94	CFIN	Clipan Finance Indonesia Tbk.
95	CINT	Chitose Internasional Tbk.
96	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk.
97	CLAY	Citra Putra Realty Tbk.
98	CMNP	Citra Marga Nusaphala Persada
99	CMPP	AirAsia Indonesia Tbk.
100	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
101	CPRO	Central Proteina Prima Tbk.
102	CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk.
103	CSRA	Cisadane Sawit Raya Tbk.
104	CTBN	Citra Tubindo Tbk.
105	CTRA	Ciputra Development Tbk.
106	CTTH	Citatah Tbk.
107	DEAL	Dewata Freightinternational Tb
108	DEWA	Darma Henwa Tbk
109	DFAM	Dafam Property Indonesia Tbk.
110	DGIK	Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
111	DIGI	Arkadia Digital Media Tbk.
112	DILD	Intiland Development Tbk.
113	DIVA	Distribusi Voucher Nusantara T
114	DKFT	Central Omega Resources Tbk.
115	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
116	DMAS	Puradelta Lestari Tbk.
117	DMMX	Digital Mediatama Maxima Tbk.
118	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk.
119	DNAR	Bank Oke Indonesia Tbk.
120	DNET	Indoritel Makmur Internasional
121	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk.
122	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk.
123	DPUM	Dua Putra Utama Makmur Tbk.
124	DSFI	Dharma Samudera Fishing Indust
125	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.
126	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk

NO	KODE	PERUSAHAAN
127	DUTI	Duta Pertiwi Tbk
128	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk.
129	EAST	Eastparc Hotel Tbk.
130	ECII	Electronic City Indonesia Tbk.
131	EKAD	Ekadharma International Tbk.
132	ELSA	Elnusa Tbk.
133	ELTY	Bakrieland Development Tbk.
134	EMDE	Megapolitan Developments Tbk.
135	EMTK	Elang Mahkota Teknologi Tbk.
136	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.
137	ENZO	Morenzo Abadi Perkasa Tbk.
138	EPAC	Megalestari Epack Sentosaraya
139	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk.
140	ERTX	Eratex Djaja Tbk.
141	ESIP	Sinergi Inti Plastindo Tbk.
142	ESSA	Surya Esa Perkasa Tbk.
143	ESTA	Esta Multi Usaha Tbk.
144	ETWA	Eterindo Wahanatama Tbk
145	EXCL	XL Axiata Tbk.
146	FAST	Fast Food Indonesia Tbk.
147	FILM	MD Pictures Tbk.
148	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk.
149	FISH	FKS Multi Agro Tbk.
150	FITT	Hotel Fitra International Tbk.
151	FMII	Fortune Mate Indonesia Tbk
152	FORU	Fortune Indonesia Tbk
153	FPNI	Lotte Chemical Titan Tbk.
154	FREN	Smartfren Telecom Tbk.
155	FUJI	Fuji Finance Indonesia Tbk.
156	GDST	Gunawan Dianjaya Steel Tbk.
157	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk.
158	GEMA	Gema Grahasarana Tbk.
159	GGRM	Gudang Garam Tbk.
160	GGRP	Gunung Raja Paksi Tbk.
161	GIAA	Garuda Indonesia (Persero) Tbk
162	GLOB	Globe Kita Terang Tbk.
163	GLVA	Galva Technologies Tbk.
164	GMFI	Garuda Maintenance Facility Ae
165	GMTD	Gowa Makassar Tourism Developm
166	GOLD	Visi Telekomunikasi Infrastruk
167	GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk.
168	GSMF	Equity Development Investment
169	GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk.

NO	KODE	PERUSAHAAN
170	HADE	Himalaya Energi Perkasa Tbk.
171	HDFA	Radana Bhaskara Finance Tbk.
172	HELI	Jaya Trishindo Tbk.
173	HERO	Hero Supermarket Tbk.
174	HEXA	Hexindo Adiperkasa Tbk.
175	HITS	Humpuss Intermoda Transportasi
176	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.
177	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk.
178	HRME	Menteng Heritage Realty Tbk.
179	HRTA	Hartadinata Abadi Tbk.
180	IBST	Inti Bangun Sejahtera Tbk.
181	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
182	ICON	Island Concepts Indonesia Tbk.
183	IDPR	Indonesia Pondasi Raya Tbk.
184	IFII	Indonesia Fibreboard Industry
185	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk
186	IKAI	Intikeramik Alamasri Industri
187	IKAN	Era Mandiri Cemerlang Tbk.
188	IMAS	Indomobil Sukses Internasional
189	IMJS	Indomobil Multi Jasa Tbk.
190	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk.
191	INAF	Indofarma Tbk.
192	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk.
193	INCO	Vale Indonesia Tbk.
194	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
195	INDR	Indo-Rama Synthetics Tbk.
196	INDS	Indospring Tbk.
197	INDX	Tanah Laut Tbk
198	INDY	Indika Energy Tbk.
199	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
200	INPP	Indonesian Paradise Property T
201	INRU	Toba Pulp Lestari Tbk.
202	INTA	Intraco Penta Tbk.
203	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tb
204	IPCC	Indonesia Kendaraan Terminal T
205	IPCM	Jasa Armada Indonesia Tbk.
206	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk
207	IPTV	MNC Vision Networks Tbk.
208	ISAT	Indosat Tbk.
209	ISSP	Steel Pipe Industry of Indones
210	ITIC	Indonesian Tobacco Tbk.
211	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.
212	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.

NO	KODE	PERUSAHAAN
213	JAWA	Jaya Agra Wattie Tbk.
214	JECC	Jembo Cable Company Tbk.
215	JIHD	Jakarta International Hotels &
216	JKON	Jaya Konstruksi Manggala Prata
217	JMAS	Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mit
218	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
219	JRPT	Jaya Real Property Tbk.
220	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.
221	JTPE	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.
222	KAEF	Kimia Farma Tbk.
223	KARW	ICTSI Jasa Prima Tbk.
224	KAYU	Darmi Bersaudara Tbk.
225	KBAG	Karya Bersama Anugerah Tbk.
226	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk.
227	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk.
228	KEEN	Kencana Energi Lestari Tbk.
229	KIAS	Keramika Indonesia Assosiasi T
230	KINO	Kino Indonesia Tbk.
231	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
232	KOIN	Kokoh Inti Arebama Tbk
233	KOPI	Mitra Energi Persada Tbk.
234	KRAS	Krakatau Steel (Persero) Tbk.
235	KREN	Kresna Graha Investama Tbk.
236	LAPD	Leyand International Tbk.
237	LEAD	Logindo Samudramakmur Tbk.
238	LIFE	Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tb
239	LINK	Link Net Tbk.
240	LMSH	Lionmesh Prima Tbk.
241	LPCK	Lippo Cikarang Tbk
242	LPGI	Lippo General Insurance Tbk.
243	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk
244	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.
245	LPLI	Star Pacific Tbk
246	LPPF	Matahari Department Store Tbk.
247	LPPS	Lenox Pasifik Investama Tbk.
248	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tb
249	LTLS	Lautan Luas Tbk.
250	MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk.
251	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tb
252	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
253	MBSS	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
254	MBTO	Martina Berto Tbk.
255	MCAS	M Cash Integrasi Tbk.

NO	KODE	PERUSAHAAN
256	MCOR	Bank China Construction Bank I
257	MDIA	Intermedia Capital Tbk.
258	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.
259	MDKI	Emdeki Utama Tbk.
260	MDLN	Modernland Realty Tbk.
261	MEGA	Bank Mega Tbk.
262	MERK	Merck Tbk.
263	MFIN	Mandala Multifinance Tbk.
264	MGRO	Mahkota Group Tbk.
265	MIDI	Midi Utama Indonesia Tbk.
266	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
267	MINA	Sanurhasta Mitra Tbk.
268	MIRA	Mitra International Resources
269	MITI	Mitra Investindo Tbk.
270	MKNT	Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
271	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk.
272	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
273	MLPL	Multipolar Tbk.
274	MLPT	Multipolar Technology Tbk.
275	MOLI	Madusari Murni Indah Tbk.
276	MPMX	Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
277	MRAT	Mustika Ratu Tbk.
278	MREI	Maskapai Reasuransi Indonesia
279	MTLA	Metropolitan Land Tbk.
280	MYOH	Samindo Resources Tbk.
281	MYOR	Mayora Indah Tbk.
282	MYTX	Asia Pacific Investama Tbk.
283	NASA	Andalan Perkasa Abadi Tbk.
284	NATO	Surya Permata Andalan Tbk.
285	NFCX	NFC Indonesia Tbk.
286	NICK	Charnic Capital Tbk.
287	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk.
288	NIRO	City Retail Developments Tbk.
289	NISP	Bank OCBC NISP Tbk.
290	NOBU	Bank Nationalnobu Tbk.
291	NRCA	Nusa Raya Cipta Tbk.
292	OKAS	Ancora Indonesia Resources Tbk
293	OMRE	Indonesia Prima Property Tbk
294	PADI	Minna Padi Investama Sekuritas
295	PAMG	Bima Sakti Pertiwi Tbk.
296	PANS	Panin Sekuritas Tbk.
297	PBSA	Paramita Bangun Sarana Tbk.
298	PEHA	Phapros Tbk.

NO	KODE	PERUSAHAAN
299	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.
300	PGUN	Pradiksi Gunatama Tbk.
301	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk
302	PJAA	Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
303	PKPK	Perdana Karya Perkasa Tbk
304	PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk.
305	PMJS	Putra Mandiri Jembar Tbk.
306	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk
307	PNGO	Pinago Utama Tbk.
308	PNIN	Paninvest Tbk.
309	PNLF	Panin Financial Tbk.
310	POSA	Bliss Properti Indonesia Tbk.
311	POWR	Cikarang Listrindo Tbk.
312	PPRE	PP Presisi Tbk.
313	PPRO	PP Properti Tbk.
314	PSGO	Palma Serasih Tbk.
315	PSKT	Red Planet Indonesia Tbk.
316	PTPP	PP (Persero) Tbk.
317	PTPW	Pratama Widya Tbk.
318	PTRO	Petrosea Tbk.
319	PTSN	Sat Nusapersada Tbk
320	PUDP	Pudjiadi Prestige Tbk.
321	PURA	Putra Rajawali Kencana Tbk.
322	PURI	Puri Global Sukses Tbk.
323	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
324	PYFA	Pyridam Farma Tbk
325	RANC	Supra Boga Lestari Tbk.
326	RDTX	Roda Vivatex Tbk
327	REAL	Repower Asia Indonesia Tbk.
328	RELI	Reliance Sekuritas Indonesia T
329	RISE	Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk
330	RMBA	Bentoel Internasional Investam
331	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
332	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.
333	SAFE	Steady Safe Tbk
334	SAME	Sarana Meditama Metropolitan T
335	SAMF	Saraswanti Anugerah Makmur Tbk
336	SAPX	Satria Antaran Prima Tbk.
337	SBAT	Sejahtera Bintang Abadi Textil
338	SDPC	Millennium Pharmacon Internati
339	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1
340	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.
341	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido

NO	KODE	PERUSAHAAN
342	SILO	Siloam International Hospitals
343	SIMA	Siwani Makmur Tbk
344	SINI	Singaraja Putra Tbk.
345	SKBM	Sekar Bumi Tbk.
346	SKLT	Sekar Laut Tbk.
347	SLIS	Gaya Abadi Sempurna Tbk.
348	SMAR	Smart Tbk.
349	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.
350	SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk.
351	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
352	SMKL	Satyamitra Kemas Lestari Tbk.
353	SMRA	Summarecon Agung Tbk.
354	SMSM	Selamat Sempurna Tbk.
355	SOFA	Boston Furniture Industries Tb
356	SOHO	Soho Global Health Tbk.
357	SONA	Sona Topas Tourism Industry Tb
358	SOTS	Satria Mega Kencana Tbk.
359	SQMI	Wilton Makmur Indonesia Tbk.
360	SRAJ	Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.
361	SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk.
362	SRSN	Indo Acidatama Tbk
363	SRTG	Saratoga Investama Sedaya Tbk.
364	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
365	SSTM	Sunson Textile Manufacture Tbk
366	STAR	Buana Artha Anugerah Tbk.
367	STTP	Siantar Top Tbk.
368	SULI	SLJ Global Tbk.
369	TALF	Tunas Alfin Tbk.
370	TAMU	Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.
371	TARA	Agung Semesta Sejahtera Tbk.
372	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk.
373	TCID	Mandom Indonesia Tbk.
374	TFCO	Tifico Fiber Indonesia Tbk.
375	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.
376	TIFA	KDB Tifa Finance Tbk.
377	TINS	Timah Tbk.
378	TIRT	Tirta Mahakam Resources Tbk
379	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
380	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk
381	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.
382	TOPS	Totalindo Eka Persada Tbk.
383	TOTL	Total Bangun Persada Tbk.
384	TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk.

NO	KODE	PERUSAHAAN
385	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk
386	TPMA	Trans Power Marine Tbk.
387	TRIM	Trimegah Sekuritas Indonesia T
388	TRIN	Perintis Triniti Properti Tbk.
389	TRIO	Trikomsel Oke Tbk.
390	TRIS	Trisula International Tbk.
391	TRJA	Transkon Jaya Tbk.
392	TUGU	Asuransi Tugu Pratama Indonesi
393	TURI	Tunas Ridean Tbk.
394	UANG	Pakuan Tbk.
395	UCID	Uni-Charm Indonesia Tbk.
396	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Tra
397	UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk.
398	UNSP	Bakrie Sumatera Plantations Tb
399	UNTR	United Tractors Tbk.
400	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
401	URBN	Urban Jakarta Propertindo Tbk.
402	VICI	Victoria Care Indonesia Tbk.
403	VINS	Victoria Insurance Tbk.
404	VIVA	Visi Media Asia Tbk.
405	VOKS	Voksel Electric Tbk.
406	VRNA	Verena Multi Finance Tbk.
407	WAPO	Wahana Pronatural Tbk.
408	WEGE	Wijaya Karya Bangunan Gedung T
409	WICO	Wicaksana Overseas Internation
410	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.
411	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.
412	WOMF	Wahana Ottomitra Multiartha Tb
413	WOWS	Ginting Jaya Energi Tbk.
414	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk.
415	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.
416	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk.
417	*YELO*	*Yelooo Integra Datanet Tbk.*
418	YPAS	Yanaprima Hastapersada Tbk
419	YULE	Yulie Sekuritas Indonesia Tbk.
420	ZINC	Kapuas Prima Coal Tbk.

Lampiran 3: Data Mentah Variabel Dependen dan Independen

NO	KODE	*AUDIT FEE*	DKI	POLCON	SIZE	ROA	DER	KOMP	KAP
1	ABDA	19,82	0,75	0	28,55	0,063	0,65	1	0
2	ABMM	22,99	0,50	0	30,33	0,180	1,90	1	1
3	ACES	19,47	0,50	1	20,39	1,000	0,30	1	0
4	ADES	19,81	0,33	0	27,90	0,204	0,34	0	0
5	ADHI	21,08	0,33	1	31,32	0,002	6,05	1	0
6	ADMF	20,50	0,33	0	30,80	0,051	1,67	0	1
7	ADMG	20,44	0,50	1	30,65	0,004	0,19	1	1
8	AGII	19,81	0,33	1	29,73	0,026	1,28	1	0
9	AISA	21,68	0,33	1	28,20	0,031	1,15	1	1
10	AKRA	21,05	0,33	1	30,79	0,048	0,52	1	1
11	ALDO	19,86	0,50	0	27,82	0,083	0,72	1	0
12	ALKA	18,82	0,33	0	26,94	0,035	2,88	1	0
13	AMAG	19,49	0,50	0	29,17	0,032	1,50	0	0
14	AMAR	21,19	0,67	0	29,28	0,001	3,88	0	1
15	AMFG	21,41	0,33	0	29,63	0,043	1,25	1	1
16	ANJT	20,50	0,43	0	29,86	0,061	0,51	1	1
17	ANTM	21,96	0,33	1	31,12	0,057	0,58	1	1
18	APEX	21,06	0,33	0	29,26	0,010	1,73	1	0
19	APIC	20,25	0,50	0	29,41	0,017	1,81	1	0
20	ARGO	18,42	0,33	0	27,75	-0,025	1,85	1	0
21	ARNA	21,32	0,50	1	28,44	0,212	0,43	1	1
22	ARTA	18,96	0,50	0	26,67	-0,033	0,16	1	0
23	ARTO	21,22	0,50	1	30,14	0,007	0,48	0	1
24	ASBI	19,23	0,60	0	27,58	0,017	1,68	1	0
25	ASDM	20,46	0,50	0	27,44	0,025	1,29	0	1
26	ASGR	20,83	0,33	0	28,61	0,033	0,63	1	1
27	ASII	22,95	0,40	1	33,54	0,070	0,70	1	1
28	ASJT	19,40	0,50	0	26,99	0,001	0,71	0	0
29	ASPI	18,83	0,50	0	25,38	-0,006	0,44	1	0
30	ASRI	20,67	0,40	0	30,72	0,007	1,30	1	0
31	ASRM	20,03	0,50	1	27,98	0,046	1,57	1	0
32	ASSA	21,49	0,33	0	29,43	0,026	2,42	1	1
33	ATIC	21,61	0,33	1	29,05	-0,061	78,61	1	1
34	AUTO	23,36	0,25	1	30,46	0,037	0,43	1	1
35	BAPA	18,42	0,50	0	25,66	-0,015	0,05	1	1
36	BBCA	21,64	0,43	1	34,74	0,026	5,03	1	1
37	BBKP	21,19	0,64	1	32,12	-0,026	5,76	1	0

NO	KODE	*AUDIT FEE*	DKI	POLCON	SIZE	ROA	DER	KOMP	KAP
38	BBLD	20,38	0,50	0	28,91	0,008	1,88	0	0
39	BBNI	23,40	0,60	1	34,50	0,011	6,63	1	1
40	BBRI	23,30	0,60	1	35,06	0,018	4,75	1	1
41	BBTN	22,12	0,43	1	33,55	0,006	15,31	0	1
42	BBYB	21,09	0,50	1	30,06	-0,087	2,92	0	1
43	BCAP	19,29	0,33	1	30,71	0,007	2,60	1	0
44	BCIC	21,95	0,60	0	30,69	-0,025	7,01	0	0
45	BDMN	22,09	0,50	1	32,89	0,009	3,26	1	1
46	BEEF	18,13	0,33	0	27,24	-0,269	-4,86	1	1
47	BEKS	21,16	0,33	1	29,81	-0,030	3,68	0	0
48	BELL	20,01	0,50	0	26,99	0,008	1,02	1	0
49	BFIN	20,23	0,50	1	30,38	0,072	1,10	1	0
50	BHAT	19,92	0,50	0	27,32	0,013	0,36	1	0
51	BHIT	19,76	0,40	1	31,81	0,038	0,70	1	0
52	BINA	20,88	0,67	0	30,34	0,003	5,34	0	1
53	BISI	21,51	0,33	1	28,77	0,122	0,15	1	1
54	BJBR	21,51	0,60	1	32,70	0,013	10,54	1	0
55	BJTM	20,99	0,50	1	32,24	0,015	8,23	0	0
56	BKSW	20,91	0,50	0	30,50	-0,089	3,40	0	0
57	BLTZ	21,13	0,50	1	28,51	-0,110	3,52	1	1
58	BMAS	20,02	0,50	0	30,29	0,006	9,69	0	0
59	BMRI	23,41	0,42	1	35,08	0,018	5,97	1	1
60	BNBA	22,18	0,67	0	29,79	0,005	2,88	0	1
61	BNBR	21,89	0,50	0	30,36	0,006	10,52	1	0
62	BNGA	22,99	0,50	0	33,36	0,013	6,28	1	1
63	BNII	22,34	0,57	1	32,76	0,010	4,87	1	1
64	BNLI	22,74	0,57	0	33,09	0,005	5,40	0	1
65	BOGA	20,28	0,50	0	30,29	1,934	0,75	0	0
66	BOLA	19,23	0,33	0	27,36	0,255	0,09	1	0
67	BOLT	20,03	0,33	0	27,94	0,060	0,67	1	0
68	BPTR	18,20	0,50	0	27,43	0,014	2,34	0	0
69	BRAM	20,79	0,40	0	29,05	0,091	0,38	1	1
70	BRIS	22,35	0,44	1	33,21	0,011	2,47	0	1
71	BRMS	21,19	0,60	0	30,27	0,071	0,11	1	0
72	BRNA	20,74	0,40	0	28,33	-0,096	1,37	1	0
73	BRPT	21,06	0,50	0	27,89	0,032	1,17	1	1
74	BSDE	20,21	0,40	1	31,75	0,025	0,71	1	0
75	BSIM	20,72	0,67	1	31,60	0,002	5,27	0	0
76	BSSR	20,64	0,36	1	29,48	0,471	0,72	1	0

NO	KODE	*AUDIT FEE*	DKI	POLCON	SIZE	ROA	DER	KOMP	KAP
77	BSWD	20,72	0,50	1	29,08	-0,010	1,11	0	0
78	BTPN	22,85	0,60	0	32,89	0,016	4,07	1	1
79	BTPS	21,09	0,50	1	30,55	0,079	0,36	1	1
80	BUKA	21,19	0,50	1	30,91	-0,063	0,13	1	0
81	BUMI	21,94	0,50	1	31,73	0,053	5,53	1	0
82	BVIC	21,16	0,67	0	23,94	-0,005	6,87	1	1
83	BWPT	22,17	0,67	1	30,12	-0,118	4,85	1	0
84	BYAN	22,75	0,50	1	21,61	0,520	0,31	1	1
85	CAKK	18,32	0,50	0	26,81	0,277	0,87	0	0
86	CARE	21,02	0,67	0	29,07	0,001	0,28	1	1
87	CARS	21,42	0,33	0	29,10	-0,103	7,83	1	0
88	CASA	21,56	0,50	0	31,27	0,002	3,23	1	0
89	CASH	18,64	0,67	0	25,77	-0,056	0,47	1	0
90	CASS	19,34	0,33	1	30,39	0,090	1,70	1	1
91	CBMF	19,09	0,50	0	26,60	0,004	0,41	0	0
92	CCSI	18,76	0,80	0	26,98	0,074	0,44	0	0
93	CENT	22,07	0,29	0	29,67	-0,041	2,47	1	1
94	CFIN	20,86	0,67	0	29,59	0,007	0,48	0	1
95	CINT	18,92	0,33	0	26,92	-0,199	0,41	1	0
96	CITA	20,94	0,50	0	29,09	0,132	0,17	1	0
97	CLAY	19,11	0,50	0	27,13	-0,143	14,14	1	0
98	CMNP	20,31	0,67	1	30,37	0,046	0,46	1	0
99	CMPP	20,82	0,33	0	29,27	-0,454	-1,99	1	1
100	CPIN	22,33	0,33	1	31,20	0,000	0,41	1	1
101	CPRO	21,39	0,29	0	29,49	0,343	0,54	1	1
102	CSAP	21,22	0,33	0	22,86	0,026	2,75	1	1
103	CSRA	20,39	0,33	0	28,19	0,148	1,24	1	0
104	CTBN	20,63	0,33	1	28,30	-0,117	0,53	1	0
105	CTRA	20,71	0,50	0	31,34	0,051	1,10	1	1
106	CTTH	19,34	0,50	0	27,26	-0,032	2,37	1	0
107	DEAL	18,42	0,50	0	25,86	-0,167	-5,87	1	0
108	DEWA	20,40	0,67	1	27,43	0,001	1,11	1	0
109	DFAM	20,37	0,33	0	26,33	-0,055	2,89	1	0
110	DGIK	20,17	0,33	1	27,64	0,005	0,11	1	0
111	DIGI	19,16	0,33	0	24,26	-0,380	1,38	1	0
112	DILD	21,34	0,50	0	30,43	0,000	1,73	1	0
113	DIVA	18,64	0,40	0	28,49	0,537	0,10	1	0
114	DKFT	20,38	0,33	0	28,44	-0,152	5,25	1	0
115	DLTA	20,99	0,40	1	27,90	0,144	0,30	1	0

NO	KODE	*AUDIT FEE*	DKI	POLCON	SIZE	ROA	DER	KOMP	KAP
116	DMAS	19,90	0,40	1	29,44	0,117	0,14	1	0
117	DMMX	18,72	0,33	0	27,71	0,220	0,14	1	0
118	DMND	20,44	0,60	0	29,47	0,056	0,25	1	1
119	DNAR	19,28	0,67	0	29,68	0,002	1,54	0	0
120	DNET	20,28	0,50	0	30,52	0,055	0,61	1	1
121	DOID	19,61	0,60	1	30,78	0,000	5,16	1	0
122	DPNS	18,45	0,33	0	26,62	0,063	0,18	1	0
123	DPUM	19,21	0,33	0	27,96	-0,057	1,24	0	0
124	DSFI	18,72	0,40	1	26,69	0,037	0,85	1	0
125	DSNG	23,56	0,33	0	30,25	0,054	0,95	1	1
126	DSSA	21,15	0,60	1	31,39	0,088	0,72	1	0
127	DUTI	19,81	0,50	0	30,36	0,048	0,40	1	0
128	DVLA	20,98	0,33	0	28,37	0,070	0,51	0	1
129	EAST	18,52	0,50	0	26,28	0,047	0,06	0	0
130	ECII	20,46	0,60	0	28,27	0,005	0,35	1	0
131	EKAD	19,09	0,50	0	27,78	0,095	0,13	1	0
132	ELSA	21,53	0,50	1	29,61	0,015	0,91	1	1
133	ELTY	21,70	0,33	0	30,09	-0,023	0,43	1	0
134	EMDE	19,57	0,50	1	28,95	0,277	1,20	1	0
135	EMTK	20,25	0,40	0	31,27	0,158	0,13	1	1
136	ENRG	18,95	0,25	0	25,66	0,013	0,55	1	0
137	ENZO	19,23	0,50	0	26,41	0,035	0,87	1	0
138	EPAC	18,76	0,50	1	26,64	0,003	1,05	1	0
139	ERAA	21,78	0,33	0	30,06	0,098	0,76	1	1
140	ERTX	19,06	0,33	0	26,95	0,002	2,65	1	0
141	ESIP	18,06	0,50	0	25,16	0,007	0,58	0	0
142	ESSA	19,38	0,33	0	29,98	0,018	1,69	1	0
143	ESTA	18,42	0,50	0	25,14	0,008	0,40	0	0
144	ETWA	20,03	0,50	0	27,68	-0,118	-10,18	1	0
145	EXCL	23,10	0,38	0	31,92	0,018	2,62	0	1
146	FAST	20,64	0,33	0	28,90	-0,057	2,38	0	1
147	FILM	19,49	0,50	0	27,90	0,023	0,04	1	0
148	FIRE	19,34	0,50	0	26,93	-0,093	0,61	1	0
149	FISH	20,56	0,40	1	29,62	0,057	2,33	1	1
150	FITT	18,13	0,50	0	24,92	-0,081	0,75	1	0
151	FMII	19,28	0,33	0	27,49	0,010	0,37	1	0
152	FORU	18,86	0,50	0	24,57	0,032	0,15	1	0
153	FPNI	21,21	0,50	0	21,68	0,052	0,75	1	1
154	FREN	20,54	0,60	1	31,40	-0,010	2,43	1	0

NO	KODE	*AUDIT FEE*	DKI	POLCON	SIZE	ROA	DER	KOMP	KAP
155	FUJI	17,82	0,50	0	25,76	0,060	0,03	0	0
156	GDST	18,83	0,33	0	28,09	-0,040	1,01	0	1
157	GDYR	20,78	0,33	0	28,17	0,020	1,48	0	1
158	GEMA	19,91	0,50	0	27,70	0,012	1,73	1	0
159	GGRM	22,91	0,50	0	32,13	0,062	0,52	1	1
160	GGRP	20,66	0,40	1	30,36	0,058	0,42	0	0
161	GIAA	22,70	0,43	1	32,26	-0,363	-2,18	1	1
162	GLOB	19,45	0,50	0	23,32	-4,375	-1,02	1	0
163	GLVA	18,77	0,50	0	27,15	0,064	1,70	0	0
164	GMFI	21,19	0,60	1	29,37	-0,320	-2,17	1	1
165	GMTD	19,78	0,43	1	27,70	-0,026	0,93	1	0
166	GOLD	18,13	0,50	0	26,61	0,040	0,11	1	0
167	GPRA	20,98	0,33	0	28,20	0,028	0,59	1	0
168	GSMF	20,08	0,50	0	29,34	0,002	1,14	1	1
169	GWSA	19,25	0,33	0	29,65	0,003	0,08	1	0
170	HADE	18,20	0,50	0	23,46	-0,020	0,15	1	0
171	HDFA	20,45	0,43	1	20,97	0,028	1,03	0	0
172	HELI	18,13	0,50	0	26,43	0,011	1,14	1	0
173	HERO	21,97	0,38	1	29,47	-0,154	6,18	1	1
174	HEXA	21,12	1,00	0	29,11	0,181	0,91	0	1
175	HITS	22,18	0,50	0	28,79	-0,058	2,52	1	1
176	HMSP	19,87	0,50	0	31,60	0,134	0,82	1	1
177	HOKI	19,49	0,33	0	27,62	0,013	0,48	1	0
178	HRME	17,60	0,50	0	27,55	-0,032	0,41	1	0
179	HRTA	19,43	0,33	1	28,88	0,056	1,29	1	0
180	IBST	20,13	0,33	0	29,89	0,007	0,45	0	0
181	ICBP	22,77	0,50	1	32,40	0,067	1,16	1	1
182	ICON	19,67	0,50	1	26,64	0,001	0,52	1	0
183	IDPR	18,89	0,50	0	28,03	-0,097	1,41	1	0
184	IFII	19,07	0,33	0	27,78	0,071	0,07	0	0
185	IGAR	20,68	0,33	0	27,42	0,129	0,17	1	1
186	IKAI	18,73	0,50	1	27,85	-0,046	0,59	1	0
187	IKAN	19,11	0,50	0	25,58	0,012	0,83	0	0
188	IMAS	20,65	0,50	0	31,56	-0,001	2,97	1	1
189	IMJS	20,19	0,33	0	30,84	-0,003	5,49	1	1
190	IMPC	20,37	0,50	0	28,68	0,072	0,71	1	0
191	INAF	20,23	0,67	1	28,33	-0,019	2,96	1	0
192	INAI	19,17	0,33	0	28,07	0,003	2,99	1	0
193	INCO	22,29	0,30	1	26,59	0,067	0,15	1	1

NO	KODE	*AUDIT FEE*	DKI	POLCON	SIZE	ROA	DER	KOMP	KAP
194	INDF	22,23	0,67	1	28,33	-0,019	2,96	1	0
195	INDR	20,75	0,50	0	30,19	0,093	0,95	1	0
196	INDS	20,03	0,67	1	28,89	0,017	0,24	1	0
197	INDX	21,76	0,50	1	24,90	-0,016	0,22	1	0
198	INDY	20,95	0,40	1	31,24	0,017	3,18	1	1
199	INKP	21,51	0,43	1	32,48	0,059	0,89	1	0
200	INPP	20,57	0,50	1	29,80	-0,003	0,53	1	0
201	INRU	19,88	0,75	1	29,54	0,001	2,05	0	0
202	INTA	20,66	0,33	0	28,52	-0,191	-2,45	1	0
203	INTP	22,34	0,43	1	30,89	0,068	0,27	1	1
204	IPCC	20,71	0,50	1	28,31	0,031	0,84	0	1
205	IPCM	20,49	0,50	1	27,99	0,096	0,23	0	1
206	IPOL	20,26	0,50	0	29,08	0,032	0,62	1	0
207	IPTV	19,01	0,33	1	30,14	0,016	0,05	1	0
208	ISAT	24,51	0,30	1	31,78	0,108	5,15	1	1
209	ISSP	20,21	0,25	0	29,59	0,068	0,87	1	0
210	ITIC	19,76	0,50	0	26,99	0,035	0,62	0	0
211	ITMA	19,11	0,33	0	28,59	0,067	0,06	1	0
212	ITMG	21,17	0,43	0	23,89	0,285	0,39	1	1
213	JAWA	20,59	0,33	0	28,90	-0,050	14,96	1	0
214	JECC	18,77	0,33	0	28,18	-0,027	1,49	1	0
215	JIHD	19,47	0,33	1	29,52	-0,017	0,38	1	0
216	JKON	20,52	0,50	0	29,05	-0,009	0,56	1	0
217	JMAS	18,52	0,50	0	26,24	0,005	1,17	0	0
218	JPFA	22,55	0,33	1	30,98	0,075	1,18	1	1
219	JRPT	20,48	0,33	0	30,09	0,067	0,44	1	0
220	JSMR	22,03	0,33	1	32,25	0,009	2,97	1	1
221	JTPE	19,53	0,33	0	27,82	0,080	0,33	1	0
222	KAEF	20,69	0,50	1	30,51	0,016	1,46	1	0
223	KARW	20,26	0,33	0	26,27	-0,033	-1,52	1	1
224	KAYU	18,60	0,50	0	25,39	0,001	0,35	0	0
225	KBAG	19,50	0,50	0	26,85	0,003	0,20	1	0
226	KBLI	20,44	0,60	1	28,63	0,034	0,11	1	1
227	KDSI	19,45	0,40	0	27,93	0,054	0,87	1	0
228	KEEN	20,50	0,50	0	29,09	0,027	0,84	1	0
229	KIAS	20,25	0,33	0	27,63	-0,006	0,18	1	1
230	KINO	20,10	0,50	1	29,31	0,019	1,01	1	0
231	KLBF	22,35	0,50	0	30,88	0,126	0,21	1	1
232	KOIN	20,19	0,33	0	27,70	-0,026	9,85	1	1

NO	KODE	*AUDIT FEE*	DKI	POLCON	SIZE	ROA	DER	KOMP	KAP
233	KOPI	18,95	0,50	0	25,66	0,013	0,55	1	0
234	KRAS	22,17	0,33	1	26,66	0,016	6,23	1	1
235	KREN	19,23	0,50	0	28,77	-0,105	0,26	1	0
236	LAPD	17,91	0,50	0	18,17	-1396,86	-1,00	1	0
237	LEAD	19,99	0,33	0	28,30	-0,019	2,88	1	1
238	LIFE	21,16	0,50	0	29,18	0,019	1,07	0	1
239	LINK	20,91	0,40	1	29,91	0,091	0,86	1	1
240	LMSH	19,01	0,50	0	25,70	0,045	0,26	0	0
241	LPCK	20,59	0,33	1	29,84	0,015	0,43	1	0
242	LPGI	19,67	0,67	0	28,70	0,034	2,35	1	0
243	LPIN	19,25	0,33	0	26,46	0,075	0,09	1	0
244	LPKR	21,44	0,50	1	31,58	-0,031	1,32	1	0
245	LPLI	19,37	0,33	0	27,60	0,255	0,01	1	0
246	LPPF	21,28	0,50	0	29,40	0,156	4,82	1	1
247	LPPS	18,13	0,33	0	27,82	0,096	0,00	0	0
248	LSIP	22,11	0,40	0	30,10	0,084	0,17	1	1
249	LTLS	22,33	0,67	1	29,46	0,050	1,30	1	1
250	MAPI	20,82	0,50	0	30,45	0,029	1,37	1	1
251	MAYA	21,41	0,33	0	32,41	0,000	7,52	0	0
252	MBAP	20,70	0,33	0	28,93	0,390	0,29	1	1
253	MBSS	19,86	0,50	0	28,56	0,068	0,05	1	1
254	MBTO	19,34	0,33	0	27,30	-0,208	0,62	1	0
255	MCAS	19,33	0,50	0	28,39	0,066	0,41	1	0
256	MCOR	21,36	0,50	0	30,90	0,003	3,31	0	1
257	MDIA	19,21	0,50	0	29,33	0,015	1,08	1	0
258	MDKA	18,83	0,33	1	32,48	0,026	0,64	1	0
259	MDKI	19,16	0,40	0	27,62	0,039	0,09	1	0
260	MDLN	21,30	0,60	1	30,31	0,000	2,47	1	0
261	MEGA	21,15	0,60	1	32,52	0,030	5,94	1	0
262	MERK	20,56	0,50	0	27,66	0,128	0,50	1	1
263	MFIN	21,03	0,50	0	29,31	0,091	0,93	1	1
264	MGRO	18,92	0,33	0	28,23	0,049	1,56	1	0
265	MIDI	20,34	0,50	0	29,48	0,043	2,92	1	1
266	MIKA	21,45	0,67	1	29,56	0,000	0,16	1	0
267	MINA	18,52	0,50	0	25,44	-0,043	0,07	1	0
268	MIRA	18,96	0,33	0	26,43	-0,044	0,48	1	0
269	MITI	19,01	0,33	0	25,78	0,059	0,13	1	0
270	MKNT	20,13	0,50	0	26,92	-0,071	21,74	1	0

NO	KODE	*AUDIT FEE*	DKI	POLCON	SIZE	ROA	DER	KOMP	KAP
271	MKPI	20,15	0,31	0	29,71	0,041	0,37	1	0
272	MLBI	21,20	0,50	1	28,70	0,228	1,66	1	1
273	MLPL	19,80	0,40	1	30,32	0,002	2,26	1	0
274	MLPT	19,50	0,50	0	28,73	0,087	2,12	1	0
275	MOLI	20,10	0,33	0	21,55	0,017	0,52	1	0
276	MPMX	21,31	0,40	0	29,92	0,043	0,58	1	1
277	MRAT	19,35	0,33	0	27,08	0,001	0,68	1	0
278	MREI	19,41	0,33	0	29,01	-0,073	1,88	0	0
279	MTLA	21,62	0,40	0	29,49	0,059	0,45	1	1
280	MYOH	20,62	0,33	0	28,48	0,164	0,17	0	1
281	MYOR	20,72	0,40	0	30,62	0,061	0,75	1	0
282	MYTX	18,42	0,33	1	28,95	-0,037	-30,15	1	0
283	NASA	20,08	0,50	0	27,76	-0,004	0,06	1	0
284	NATO	19,92	0,50	0	27,41	-0,007	0,00	1	0
285	NFCX	19,04	0,33	0	28,29	0,176	0,39	1	0
286	NICK	17,82	0,33	0	26,48	0,686	0,00	0	0
287	NIKL	20,32	0,33	0	26,48	0,686	0,00	0	0
288	NIRO	20,67	0,33	0	30,09	-0,014	0,82	1	1
289	NISP	22,23	0,56	0	33,00	0,012	5,63	1	1
290	NOBU	21,56	1,00	1	30,66	0,003	10,75	0	0
291	NRCA	18,88	0,33	0	28,39	0,024	0,84	1	0
292	OKAS	19,55	0,25	1	28,50	-0,036	-231,26	1	0
293	OMRE	21,23	0,60	1	29,04	-0,041	0,21	1	1
294	PADI	18,68	0,67	0	26,31	-0,211	0,10	0	0
295	PAMG	19,41	0,50	0	27,09	-0,018	0,37	0	0
296	PANS	18,91	0,25	0	28,35	0,077	0,41	1	0
297	PBSA	19,09	0,50	0	27,38	0,107	0,34	1	0
298	PEHA	19,58	0,50	1	28,24	0,006	1,48	1	0
299	PGAS	23,10	0,50	1	32,31	0,049	1,29	1	1
300	PGUN	18,37	0,50	1	28,55	0,015	0,62	1	0
301	PICO	18,83	0,50	0	27,70	-0,045	4,67	0	0
302	PJAA	20,62	0,33	1	29,12	-0,062	1,96	1	0
303	PKPK	18,13	0,33	1	24,89	-0,014	0,61	0	0
304	PLIN	21,93	0,33	1	30,11	0,037	0,11	0	1
305	PMJS	19,34	0,33	0	29,02	0,049	0,62	1	0
306	PNBN	22,18	0,50	1	32,95	0,009	3,21	1	1
307	PNGO	18,81	0,33	0	28,04	0,125	1,36	1	0
308	PNIN	20,97	0,67	0	31,19	0,042	0,14	1	0

NO	KODE	*AUDIT FEE*	DKI	POLCON	SIZE	ROA	DER	KOMP	KAP
309	PNLF	20,97	0,25	0	31,13	0,045	0,15	1	0
310	POSA	20,82	0,50	0	27,53	-0,155	-55,73	1	0
311	POWR	21,05	0,43	0	30,60	0,067	0,95	1	1
312	PPRE	19,52	0,33	1	29,58	0,021	1,36	1	0
313	PPRO	20,23	0,67	1	30,68	0,001	3,69	1	0
314	PSGO	19,73	0,33	0	28,95	0,057	1,62	1	1
315	PSKT	20,32	0,67	1	26,77	-0,029	0,19	1	0
316	PTPP	20,72	0,33	1	31,65	0,007	2,88	1	0
317	PTPW	19,01	0,50	0	27,02	0,096	0,25	0	0
318	PTRO	20,30	0,40	0	29,66	0,064	1,05	1	1
319	PTSN	19,92	0,33	0	28,54	0,041	0,93	1	0
320	PUDP	19,21	0,33	0	26,92	-0,036	0,63	1	0
321	PURA	18,98	0,50	0	26,90	0,017	0,09	0	0
322	PURI	18,68	0,33	0	26,14	0,040	0,77	1	0
323	PWON	21,94	0,33	0	30,99	0,054	0,51	1	1
324	PYFA	21,16	0,50	0	27,42	0,007	3,82	1	0
325	RANC	20,12	0,33	0	28,04	0,007	1,98	1	0
326	RDTX	20,03	0,33	1	28,78	0,062	0,09	1	0
327	REAL	18,83	0,33	0	26,59	0,004	0,01	0	0
328	RELI	19,81	0,50	0	27,18	0,033	0,28	0	0
329	RISE	19,67	0,33	0	28,60	0,015	0,17	1	0
330	RMBA	21,56	1,00	1	29,87	0,001	0,38	1	0
331	ROTI	20,56	0,33	0	29,06	0,067	0,47	1	1
332	RUIS	19,87	0,33	0	27,89	0,014	1,68	1	0
333	SAFE	18,78	0,50	0	26,42	0,003	-5,38	1	0
334	SAME	21,00	1,00	1	29,23	0,030	0,12	1	1
335	SAMF	20,03	0,33	1	28,20	0,097	0,10	1	0
336	SAPX	19,16	0,50	0	26,25	0,178	0,49	0	0
337	SBAT	19,67	0,33	0	27,27	-0,068	1,68	1	0
338	SDPC	19,34	0,67	1	27,82	0,008	4,09	0	0
339	SDRA	20,72	0,67	0	31,41	0,014	3,73	0	0
340	SGRO	20,11	0,50	1	29,91	0,084	1,12	1	1
341	SIDO	21,02	0,50	0	29,03	0,310	0,17	1	1
342	SILO	21,51	0,50	0	29,86	0,075	0,43	1	0
343	SIMA	22,78	0,29	1	31,97	0,027	0,88	1	1
344	SINI	20,51	0,50	0	25,91	0,003	6,06	1	0
345	SKBM	20,40	0,33	0	28,31	0,015	0,99	1	0
346	SKLT	19,57	0,33	0	27,51	0,095	0,64	1	0
347	SLIS	19,01	0,50	0	26,70	0,064	0,93	1	0

NO	KODE	*AUDIT FEE*	DKI	POLCON	SIZE	ROA	DER	KOMP	KAP
348	SMAR	21,82	0,43	1	31,33	0,070	1,80	1	0
349	SMBR	20,29	0,60	1	29,39	0,009	0,68	1	0
350	SMCB	22,62	0,25	1	30,70	0,034	0,92	1	1
351	SMGR	22,78	0,29	1	31,97	0,027	0,88	1	1
352	SMKL	18,98	0,33	0	28,28	0,056	1,35	0	0
353	SMRA	22,53	0,80	0	30,89	0,021	1,32	1	1
354	SMSM	21,03	0,50	0	28,98	0,188	0,33	1	1
355	SOFA	18,98	0,50	0	24,88	-0,048	0,47	1	0
356	SOHO	20,03	0,33	0	29,02	0,137	0,82	1	1
357	SONA	19,67	0,43	1	27,33	-0,077	0,14	1	0
358	SOTS	19,21	0,33	1	26,75	-0,032	0,55	1	0
359	SQMI	20,25	0,50	0	26,82	-0,040	1,32	1	1
360	SRAJ	20,29	0,43	1	29,21	0,034	1,53	1	0
361	SRIL	20,99	0,33	0	30,50	-0,876	4,09	1	0
362	SRSN	19,18	0,33	0	20,57	0,031	0,41	0	0
363	SRTG	22,12	0,40	0	31,74	0,407	0,09	1	1
364	SSMS	21,89	0,50	1	30,26	0,110	1,27	1	1
365	SSTM	18,83	0,50	0	26,88	0,120	0,93	0	0
366	STAR	20,07	0,50	0	26,95	0,021	0,00	1	0
367	STTP	19,81	0,50	0	29,00	0,158	0,19	1	0
368	SULI	20,46	0,33	1	27,88	0,038	-7,18	1	0
369	TALF	18,92	0,33	0	28,08	0,014	0,50	1	0
370	TAMU	19,52	0,50	0	27,64	-0,007	0,97	1	0
371	TARA	20,86	0,50	0	27,71	0,020	0,02	1	0
372	TBLA	21,07	0,33	0	30,68	0,038	2,25	1	0
373	TCID	20,63	0,43	0	28,46	-0,033	0,26	1	1
374	TFCO	20,34	0,50	1	29,20	0,040	0,10	0	1
375	TGKA	21,28	0,50	0	28,86	0,141	0,93	1	1
376	TIFA	19,40	0,50	0	27,97	0,019	0,35	0	0
377	TINS	21,96	0,50	1	30,32	0,089	1,33	1	1
378	TIRT	18,60	0,50	0	26,37	-0,448	-1,55	0	0
379	TKIM	20,82	0,43	1	31,44	0,079	0,80	1	0
380	TLKM	20,37	0,44	1	33,26	0,122	0,91	1	1
381	TOBA	21,37	0,33	1	30,14	0,076	1,42	1	1
382	TOPS	19,61	0,25	0	28,49	0,000	1,79	0	0
383	TOTL	20,27	0,33	0	28,35	0,050	1,21	1	0
384	TOWR	21,50	0,40	1	31,82	0,052	2,64	1	1
385	TPIA	21,23	0,30	1	31,90	0,030	0,71	1	1
386	TPMA	19,21	0,33	0	27,98	0,040	0,29	1	0

NO	KODE	*AUDIT FEE*	DKI	POLCON	SIZE	ROA	DER	KOMP	KAP
387	TRIM	20,96	0,67	0	28,23	0,029	1,07	1	1
388	TRIN	19,63	0,50	0	28,26	-0,027	1,85	1	0
389	TRIO	20,15	0,50	0	25,30	-1,593	-1,02	1	0
390	TRIS	18,68	0,33	0	27,69	0,017	0,61	1	0
391	TRJA	19,11	0,33	0	27,19	0,071	1,01	0	0
392	TUGU	21,22	0,50	1	30,64	0,016	1,30	1	1
393	TURI	21,74	0,40	0	29,55	0,079	0,60	1	1
394	UANG	20,11	0,33	0	27,64	-0,076	24,36	1	0
395	UCID	22,40	0,50	0	29,68	0,061	0,59	1	1
396	ULTJ	21,18	0,50	1	29,63	0,172	0,44	1	0
397	UNIC	20,58	0,33	1	29,07	0,198	0,22	1	1
398	UNSP	20,11	0,40	0	29,74	0,014	-2,20	1	0
399	UNTR	21,13	0,33	1	32,35	0,094	0,57	1	1
400	UNVR	22,61	0,83	1	30,58	0,302	3,41	0	1
401	URBN	18,95	0,50	0	29,03	0,016	1,00	1	0
402	VICI	20,02	0,40	0	27,63	0,178	0,33	0	1
403	VINS	18,79	0,67	0	26,60	0,035	0,48	0	0
404	VIVA	19,34	0,67	1	29,78	-0,103	-14,89	1	0
405	VOKS	19,66	0,29	1	28,69	-0,073	2,19	1	0
406	VRNA	19,94	0,33	0	28,47	-0,003	2,72	0	0
407	WAPO	17,66	0,50	0	25,33	-0,017	0,34	0	0
408	WEGE	19,77	0,40	1	29,42	0,036	1,51	1	0
409	WICO	19,95	0,40	1	27,14	-0,188	5,55	1	0
410	WIKA	20,75	0,43	1	31,87	0,003	2,98	1	0
411	WINS	20,57	0,67	0	28,66	0,001	0,27	1	0
412	WOMF	20,24	0,40	1	29,27	0,021	2,86	0	1
413	WOWS	19,41	0,33	0	27,30	-0,047	0,28	0	0
414	WSBP	20,41	0,40	1	29,56	-0,282	-3,48	0	0
415	WSKT	22,03	0,38	1	32,27	-0,018	5,70	1	0
416	WTON	19,87	0,40	1	29,82	0,009	1,59	1	0
417	YELO	18,20	0,50	0	26,40	0,050	0,01	1	0
418	YPAS	19,02	0,33	0	26,28	-0,037	1,12	0	0
419	YULE	18,83	0,50	0	26,83	0,179	0,05	0	0
420	ZINC	19,30	0,33	1	28,35	0,038	1,32	1	0

Lampiran 4: Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LNFEE	420	17.60	24.51	20.3223	1.24828
POLCON	420	.00	1.00	.3571	.47973
DKI	420	.25	1.00	.4498	.12508
ROA	420	-1396.86	1.93	-3.3056	68.16150
DER	420	-231.26	78.61	.9027	12.72631
KOMPS	420	.00	1.00	.7833	.41246
KAP	420	.00	1.00	.3476	.47678
Valid N (listwise)	420				

Lampiran 5: Hasil Uji Asumsi Klasik

a) Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		420
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.91308011
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.037
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000[c]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

b) Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.622	.118		5.259	.000
	POLCON	.035	.056	.032	.630	.529
	DKI	.110	.214	.026	.513	.608
	ROA	.001	.000	.066	1.349	.178
	DER	-.001	.002	-.029	-.585	.559
	KOMPS	.049	.065	.038	.757	.450
	KAP	.050	.056	.044	.892	.373

a. Dependent Variable: ABS_RESS

Lampiran 6 : Hasil Uji Hipotesis

a) Hasil Koefesien Determinan (R^2) Sebelum Moderasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682[a]	.465	.457	.91969

a. Predictors: (Constant), KAP, DKI, ROA, DER, KOMPS, POLCON

b. Dependent Variable: LNFEE

b) Hasil Koefesien Determinan (R^2) Setelah Moderasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682[a]	.465	.456	.92053

a. Predictors: (Constant), X.Z, DER, ROA, KOMPS, KAP, DKI, POLCON

c) Hasil Uji F Sebelum Moderasi

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	303.563	6	50.594	59.816	.000[b]
	Residual	349.327	413	.846		
	Total	652.889	419			

a. Dependent Variable: LNFEE

b. Predictors: (Constant), KAP, DKI, ROA, DER, KOMPS, POLCON

d) Hasil Uji F Setelah Moderasi

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	303.773	7	43.396	51.213	.000[b]
	Residual	349.117	412	.847		
	Total	652.889	419			

a. Dependent Variable: LNFEE

b. Predictors: (Constant), X.Z, DER, ROA, KOMPS, KAP, DKI, POLCON

e) Uji T Sebelum Moderasi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.887	.202		93.371	.000
	POLCON	.662	.096	.254	6.898	.000
	DKI	.916	.366	.092	2.501	.013
	ROA	.001	.001	.070	1.935	.054
	DER	.007	.004	.067	1.848	.065
	KOMPS	.357	.112	.118	3.198	.001
	KAP	1.455	.095	.556	15.253	.000

a. Dependent Variable: LNFEE

f) Uji T Setelah Moderasi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.961	.252		75.344	.000
	POLCON	.496	.346	.191	1.433	.153
	DKI	.749	.497	.075	1.505	.133
	ROA	.001	.001	.069	1.920	.055
	DER	.006	.004	.065	1.790	.074
	KOMPS	.354	.112	.117	3.170	.002
	KAP	1.460	.096	.558	15.212	.000
	X.Z	.364	.731	.070	.498	.619

a. Dependent Variable: LNFEE

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

Nama	: Erna Kusuma Wardhani
Tempat, Tanggal Lahir	: Wonogiri, 26 April 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Bulusari RT 01 RW 02, Bulusari, Slogohimo
No HP	: 082328799769
E-mail	: ernaksmwrdh@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:

1. TK Pertiwi — Lulus Tahun 2005
2. SDN III Slogohimo — Lulus Tahun 2011
3. SMPN I Slogohimo — Lulus Tahun 2014
4. SMAN I Slogohimo — Lulus Tahun 2017
5. UIN Raden Mas Said Surakarta — Angkatan Tahun 2019

erna turnitin

ORIGINALITY REPORT

30%	32%	14%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.unmer.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	3%
3	jurnal.pcr.ac.id Internet Source	2%
4	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
7	text-id.123dok.com Internet Source	1%
8	docplayer.info Internet Source	1%
9	lib.ibs.ac.id Internet Source	1%
10	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1%
11	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to Deptford Township High School Student Paper	1%
13	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
14	id.scribd.com Internet Source	1%
15	core.ac.uk Internet Source	1%
16	jurnalnasional.ump.ac.id Internet Source	1%
17	jurnal.kwikkiangie.ac.id Internet Source	1%
18	rinadestiana.weebly.com Internet Source	<1%
19	antikorupsi.org Internet Source	<1%